

**PEMIKIRAN POLITIK SOE HOK GIE
DALAM BUKU CATATAN SEORANG
DEMONSTRAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar S.Sos. Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

OLEH:

Irvan Meidiansyah

NIM: 1617020050

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
1442 H/2021 M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irvan Meidiansyah

Nim : 1617020050

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pemikiran Politik Soe Hok Gie Dalam Buku Catatan Seorang Demonstran.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 22, 07, 2021



Irvan Meidiansyah

NOTA PEMBIMBING

Hal Pengajuan Sidang Munaqosah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr Wb

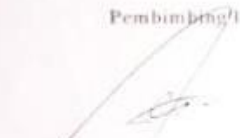
Setelah mengadakan bimbingan dan kami periksa serta diadakannya perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul judul "**Pemikiran Politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demonstran**" yang ditulis oleh saudara Irvan Meidiansyah (1617020050) telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Waalaiikumussalam Wr Wb

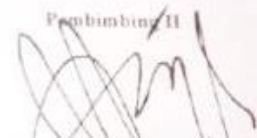
Palembang, 5 Juli 2021

Pembimbing I



Amur Ropik, M.Si
NIP. 197906192007011005

Pembimbing II



Mustafah, M.A. Si
NIDN.2011049001

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Irvan Meidiansyah
Nim : 1617020050
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Pemikiran Politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demonstran

Telah dimunaqosahkan dalam sidang *Online* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Hari / Tanggal : Rabu / 04 Agustus 2021
Tempat : Di Rumah Via *Online (daring)* melalui Aplikasi Zoom.

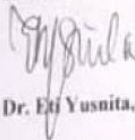
Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 09 Agustus 2021


Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI


KETUA


Dr. Eri Yusnita, S.Ag M.Hi
NIP. 197409242007012016

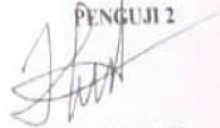
PENGUJI 1


Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP.197612072007011010

SEKRETARIS


Ryllian Chandra Eka Viana, MA
NIP. 198604052019031011

PENGUJI 2


Hatta Azzuhri, M. Si
NIDN.2016028804

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Jangan menyerah saat kamu belum mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, sang pencipta maha tahu waktu yang tepat untuk kamu miliki sesuatu yang kamu inginkan.

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak yakinah proses tidak pernah mengkhianati hasil.

Persembahan

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT atas semua keridohnya serta izinnya sehingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya terimakasih Bapak Toharo (Toro) dan ibu Widiarti (Widi) yang sangat kucintai dan ku sayangi, yang selalu mendoakan serta berusaha untuk memberikan yang terbaik untukku. Dan tidak lupa pula adikku tersayang Dwi Yulinda, M. Ikhsan Juniansyah, M. Fachri Apriansyah. Serta kakek Almarhum Tartomo Burnawi dan nenek Dinem yang selalu mendoakan saya yang selalu menasehati saya.
3. Bapak Ainur Ropik, M.Si. Ibu Mariatul Qibtiyah, MA.Si. Selaku pembimbing skripsi. Bapak Dr. Kun Budianto S.Ag., S.H., M.Si dan bapak Hatta Azzuhri, M.Si selaku

penguji saya, terimakasih katena sudah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Keluarga yang selalu memberikan semangat semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Sahabat saya Hari, Shandika, Wawan, Azizah, Herlin.
6. Teman seperjuanganku mahasiswa Ilmu Politik B 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Dan pasangan saya yang telah menemani saya sampai ketitik ini Rani Ananda.
8. Almamater tercinta Uin Raden Fattah Palembang.
9. Fakultas tercinta Ilmu Sosial dan Ilmu politik.

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai “Pemikiran Politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demonstran”. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana pemikiran politik Soe Hok Gie dalam buku “Catatan Seorang Demonstran”, maka gerak penguasa Indonesia berawal dari tindakan gerakan pada anak didik yang mempunyai peran penting dibelakang “aksi gerakan mahasiswa” untuk menjatuhkan rezim Soekarno dengan aksi kritis dan pemikirannya. Teori yang digunakan adalah teori oposisi oleh Skilling Gordon yang dikaitkan dengan melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah Soekarno pada pemerintahan Orde Lama yang menentang ketidakadilan pemerintahan Soekarno dengan aksi demonstran dan kritiknya. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, skripsi terdahulu, jurnal dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pemikiran politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa yang dipimpinnya dengan anak didik yang konsisten tajam mengimbangi situasi yang bertemu harus menghendaki bukti atas alur aktivitas, sehingga karakter Gie dalam tindakan melalui anak didik yang menyingkirkan tingkah unjuk rasa beserta wacana, wujud dari moral yang menuju ketidakadilan dengan wadah tambahan perguruan tinggi.

Kata Kunci : Pemikiran politik, Gie.

ABSTRACT

The study is about “Political thinking in Soe Hok Gie in a demonstrator’s notebook”. The study considers the question of how soe hok’s political thinking is in “a demonstrator’s record” book, that Indonesian government dynamic does not fall behind the student movement’s crucial role in overthrowing the Soekarno regime with its critical and ideological overheads. The theory used is the theory of opposition by Skilling Gordon, which is attributed to performing a control function of the policies of Soekarno government in old order government that opposes the inequities of the Soekarno government with its demonstrators and criticism. The type of research used is descriptive with a qualitative approach to library research. The results of this study suggest that soe hok’s political thinking asa student led by him asa critical student, responds to conditions and wants righteousness asa basis for life, so that the role of Soe Hok Gie in the student movement asa party to reject compromise in demonstrations and discussions, a moralist student who stands in opposition to injustice and the figure that keeps his idealis out of the influence of a university’s outside world.

Keywords: *Political thinking in, Gie.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah SWT., berkat segala nikmat kesehatan, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemikiran Politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demontran” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si., selaku Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang .
4. Ainur Ropik, M.Si., selaku Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus pembimbing 1 saya.
5. Dr. Kun Budianto, M.Si., selaku Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus penguji 1 saya.
6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi, sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang .
7. Rylia Candra Eka Viana, MA sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Mariyatul Qibtiyah, MA, Si sebagai Dosen Pembimbing II saya.
9. Hatta Azzuhri, M.Si sebagai Dosen Penguji II saya.
10. Dosen-dosen FISIP UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.

11. Seluruh Staff dan Karyawan FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
12. Orang tuaku yang telah mendidik, selalu mendo'akan, memberi dukungan dan semangat kepada penulis hingga saat ini.
13. Keluargaku dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna kesempurnaan di masa yang akan datang. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun dikemudian hari.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 25 Agustus2021

Irvan Meidiansyah
NIM. 1617020050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	26
H. Teknik Pengumpulan Data	27
a. Pendekatan Penelitian.....	27
b. Data dan Sumber Data.....	27
c. Penyajian Data	28
d. Teknik Analisis Data	28
Sistematika Penulisan Laporan.....	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN	30
a. Dinamika Pemikiran Politik Indonesia.....	30
b. Peran Penting Mahasiswa Dalam Pemerintahan Politik Ibn Khaldun	48
BAB III Gambaran Umum Soe Hok Gie	63
A. Biografi Soe Hok Gie	63

B. Tentang Jejak Seorang Aktivis	70
BAB IV HASIL PENELITIAN	77
A. Pemikiran Politik Soe Hok Gie	77
B. Aksi Soe Hok Gie dalam Meruntuhkan PKI.	99
C. Analisis Teori Ibn Khaldun Terhadap Pemikiran Politik Soe Hok Gie Dalam Buku Catatan Seorang Demonstran	100
BAB V	113
Kesimpulan	113
Saran	113

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Indonesia lahir dan di Proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 oleh Dwitunggal Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sejak pengakuan kedaulatan, nyaris tidak ada hari tanpa konflik yang menerpa Indonesia. Peristiwa sejarah Indonesia ketika menghadapi Agresi Militer Belanda II, setelah itu perang-perang menyusul menghantam Republik Indonesia sampai Indonesia terseret dalam konfrontasi merebut Papua Barat yang kemudian di beri nama Irian Jaya (Rhoma Dwi, 2006:121).

Usai konflik ini melanda lahir kembali konfrontasi menentang pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat menguras energi nasional, kehidupan berbagai sektor tidak stabil. Namun bagi Angkatan Darat, keadaan ini membuka peluang untuk tampil sebagai benteng pertahanan republik (Kuntowijoyo, 1955:13).

Salah satu organ yang perlu dimiliki negara adalah Militer, yang merupakan satu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang diperbedakan dari orang-orang sipil. Membicarakan keterlibatan militer dalam politik, khususnya peranan mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara, dan kiprah mereka dalam proses sosial politik sehari-hari menimbulkan pro dan kontra. Ada tiga unsur yang mendominasi kekuatan politik Indonesia, pada tahun

1963 yaitu: unsur kekuatan Presiden RI, unsur kekuatan TNI, dan unsur kekuatan PKI (Partai Komunis Indonesia) (Suradi Salim, 1984:39).

Pada tahun 1965, pergerakan mahasiswa dan tatanan politik di Indonesia bergerak dinamis dalam beberapa fase besar. Di antaranya beberapa organisasi mahasiswa pada masa itu adalah CGMI (*Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia*) menonjol setelah kemenangan PKI di tahun 1955. Dampak dari demokrasi yang liberal adalah lahirnya organisasi ekstra kampus seperti HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, GEMSOS dan lain-lain (Sunarti, 1982:22).

Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik, dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di sekolah tinggi kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan di penjarakan (Putranto, 2005:12).

Pada saat itu Mahasiswa banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan 66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkaran kekuasaan Orde baru.

Sedangkan pada tahun 1965 suatu narasi besar diperlihatkan melalui peristiwa dan tokoh besar dengan mendokumentasikan asal-usul kejadian, menganalisis genologi, lalu membangun dan mempertahankan keistimewaan suatu peristiwa, memilih peristiwa yang dianggap spektakuler (seperti perang). Bagi sejarawan yang ingin memahami perjalanan sejarah Indonesia modern, hal yang terkadang menimbulkan rasa frustrasi ialah justru karena kejadian yang paling misterius ternyata merupakan salah satu babak kejadian yang terpenting. Kebenaran sejarah terletak dalam kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas, sehingga dapat diharapkan sejarawan akan mengungkapkan secara objektif. Salah satu tokoh pergerakan tahun 1965 melalui kritikan - kritiknya adalah Soe Hok Gie (Bachtiar Wardi, 1999:69).

Soe Hok Gie adalah seorang yang menentang kediktatoran berturut-turut dari Presiden Soekarno dan Soeharto, ia adalah mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jurusan Sejarah tahun 1962-1969. Soe adalah seorang etnis Tionghoa katolik Roma. Leluhur Soe Hok Gie sendiri berasal dari Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok. Ayahnya bernama Soe Lie Piet alias Salam sastrawan. Ia anak keempat dari lima bersaudara di keluarganya; (Suryadinata, 1981:29). Kakaknya Arief Budiman, Seorang sosiolog dan dosen di Universitas Kristen Satya Wacana, juga cukup kritis dan vokal dalam politik Indonesia. Gie adalah sosok pemberani, penentang, penggerak, dan pembawa perubahannya pada Era Orde Lama (Lesmana, 1989:2).

Dalam dirinya tercermin contoh segelintir anak muda yang mampu merepresentasikan rasa cinta terhadap bangsanya dengan berani berkata “tidak” dan “membenarkan apa yang dianggap orang salah” untuk suatu perubahan yang lebih baik. Gie sang aktivis, pemuda penggerak perubahan, dan jurnalis Indonesia yang merepresentasikan apa yang disebutnya dengan kebenaran yang diutarakannya, terhadap Pemerintah.

Pemuda yang lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian ini sangat senang mencatat beragam permasalahan dan problematika kehidupan yang terjadi, baik yang dialami olehnya, maupun yang dialami orang-orang sekitar (Gie, 1961:9). Laki-laki peranakan Tionghoa ini terkenal “sangat berani” menantang maut, hal ini dikarenakan sikap antusias yang ditunjukkannya dalam mengkritik pemerintah melalui tulisannya di media massa, ia seringkali menyebutkan nama-nama oknum tertentu yang dianggapnya “bertanggung jawab” atas persoalan bangsa yang terjadi. Contoh keberanian Gie terungkap dalam kutipan. *”Sebagian dari pemimpin KAMI adalah maling juga. Mereka korupsi, mereka berebut kursi, rebut-ribut pesan mobil dan tukang kecap pula. Tapi sebagian mereka jujur”* (Gie, 1957:22).

Dalam buku harian inilah Gie berkeluh kesah tentang perjuangan dan pemikirannya terutama berkaitan dengan masalah krusial bangsa yang banyak mengulas tentang ketertarikan dan kepedulian Gie sebagai generasi penerus yang peduli terhadap persoalan bangsa. Mulai dari politik Indonesia modern yang kacau hingga masalah pribadi yang dialami olehnya sebagai pemuda kala itu. Semua dipikirkan dan

dikisahkannya jujur dalam buku harian miliknya. Salah satu kegelisahan yang di alami Gie tercermin dalam *“Minggu-minggu ini adalah hari-hari yang berat untuk saya , karena saya memutuskan bahwa saya akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.”*(Gie, 1958:23).

Meskipun para mahasiswa merupakan golongan yang amat penting, golongan yang pada pertengahan tahun 1960-an ikut menjalankan peranan yang amat besar dalam meruntuhkan Orde Lama yang di pimpin oleh Presiden Soeharto, sebenarnya tak banyak yang diketahui mengenai kehidupan para mahasiswa di negeri kita. Hanyalah pada waktu-waktu tertentu tersebar berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan politik mereka yang mencolok, penguasa, dan oleh sebab itu mendapat perhatian dari surat-surat kabar, majalah, radio, dan sebagainya sehingga di ketahui oleh masyarakat ramai (Gie, 1958:24).

Pada pertengahan tahun 1960-an. Soe Hok Gie sadar sepenuhnya bahwa keadaan yang dihadapinya adalah akibat perkembangan di masa lampau yang terus menerus berlangsung, sekarang dan di masa akan datang. Soe Hok Gie adalah seorang cendekiawan yang ulung yang terpicat pada ide, pemikiran dan yang terus menerus menggunakan akal pikirannya untuk mengembangkan dan menyajikan ide-ide yang menarik perhatiannya. Tulisan-tulisannya menggugah hati pembaca, menjadikan mereka menyokong sepenuhnya pandangan-pandangan yang di kemukakannya atau membenci pada Orde Lama tersebut (Lesmana Mira, 1960:44).

Peranan Soe Hok Gie dalam usaha menegakkan Orde Baru yang di pimpin oleh Jendral Soeharto tidak kecil. Ia sangat mengharap agar Pemerintahan Orde Baru mengembangkan dan memperkuat keadilan sosial. Justru untuk memperkuat Orde Baru ia tidak segan-segan melancarkan kritikan pedas terhadap segala sesuatu yang menurut anggapannya tidak dapat dibenarkan, tidak wajar. Tidak selalu kecam-kecamannya didasarkan atas pengetahuan mengenai sekalian kenyataan-kenyataannya yang perlu diperhatikan berhubungan dengan masalah yang menjadi sasaran kecaman.

Sering ia hanya mendengar dan membaca berita yang menggugah hati, menggugah perasaannya, sehingga dengan rasa yang belum tentu benar atau didasarkan pengetahuan mengenai kenyataan atau apa yang ia anggap adalah kenyataan, adalah sering pedoman seorang pemuda bercita-cita tinggi, pedoman yang idealis, yang sering sukar digunakan sebagai pedoman bertindak (Soe Hok Gie, 1966:56).

Catatan harian Soe Hok Gie tidak spektakuler itu, namun buku Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demontran mempunyai lika-liku perjalanan tersendiri. Soe Hok Gie termasuk dalam kalangan yang sangat menyadari adanya "*lapisan baru*" itu. Di dalam tulisannya untuk penerbitannya yang sama dia tidak menyebutkan sebagai lapisan atau generasi yang baru. Sebenarnya Soe Hok Gie sadar bahwa kalau yang dimaksudkan adalah mereka yang lahir setelah kemerdekaan.

Dendam kesumat yang tadinya hanya berada dalam ikrar dalam Proklamasikan atas nama generasinya "*mereka generasi*

tua”, Soe Hok Gie adalah salah satu dari mereka yang menjadi arsitek gerakan-gerakan mahasiswa pada awal tahun 1966, dia yang mengetahui semacam *Long March (Istilahnya Sendiri)* Untuk gerak jalan yang menuntut penurunan harga bensin, penurunan harga karcis bis kota, dia juga ketika berhadapan dengan tentara yang masih setia membela Soekarno dengan panser-panser, yang mengambil tindakan nekad merebahkan diri di depan panser, sehingga panser-panser, di paksa menghentikan gerakannya.

Soe Hok Gie sendiri bukan orang yang ahli memimpin gerakan di lapangan, tapi dia sering menjadi *auctor Intellectualis* di baliknya. Maka semua gerakan itu ber “*crescendo*” dan mencapai puncak ketika runtuh seluruh rezim Soekarno secara *de facto* pada tanggal 11 maret 1966. Soekarno bukan tidak mengetahui semua itu. Ketika wakil mahasiswa menemuinya di istana, semua wakil itu menjadi sasaran pelampiasan amarahnya.

Namun kebenaran dan kejujuran itu pulalah yang sejak garis batas, atau batu apal sejarah itu yang menggungunya terus menerus. Di satu pihak dia melihat bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran ternyata hanya menumbangkan apa yang menurut anggapan mereka kebathilan. Dan ternyata pula bahwa kebathilan tidak sirna bersama sinarnya Bung Karno dari pentas politik nasional. Karena itu perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran tidak, sebagaimana diharapkan, membuahakan kebenaran dan kejujuran (Suryadinata 1977:37).

Dalam keputusan semacam ini dia lebih-lebih memusatkan perhatian pada kegiatan kurikuler dan yang ekstra kurikuler seperti mendaki gunung dan memimpin organisasi yang disebut sebagai Mapala (Mahasiswa Pencita Alam, UI), menyelenggarakan Radio Ampera, Radio Universitas Indonesia, dan terakhir turut mendirikan Group Diskusi Universitas Indonesia. Berulang kali di dalam catatan hariannya dikatakan bahwa dalam situasi semacam ini hanya ada dua pilihan yang bisa dibuat yaitu menjadi apatis atau ikut arus. Tetapi dia mempunyai pilihannya sendiri yaitu menjadi “ manusia bebas “.

Sehingga Soe Hok Gie dalam pemikirannya mempunyai 5 pemikiran politik yang dimana antara lain dalam buku Catatan Seorang Demontran:

1. Saya kira saya menyukai Soekarno sebagai seorang manusia, tapi sebagai pemimpin tidak.
2. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus.
3. Politik adalah barang yang paling kotor.
4. Saya bermimpi tentang sebuah dunia dimana tokoh agama, buruh dan pemuda bangkit dan berkata: Stop semua kemunafikan! Stop semua pembunuhan atas nama apapun! Tak ada rasa benci pada siapapun, agama apapun, dan bangsa apapun. Dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik.
5. Sebenarnya dijelaskan apa sebenarnya maksud ini. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang

tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak memungkinkan tumbuh dari hipokrasi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung, Soe Hok Gie.

Sehingga dalam pemikiran politik Soe Hok Gie inilah gie tidak segan-segan melakukan sebuah aksi dan kritikan terhadap pemerintahan Soekarno dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah yang dianggap tidak masuk akal dan menyusahkan masyarakat dalam sebuah pemikirannya.

Alasan Peneliti memilih Pemikiran Politik Soe Hok Gie “Dalam Catatan Seorang Demonstran ini karena banyak mengandung pesan dan makna kritik sosial terhadap pemerintahan Soekarno yang menggambarkan keadaan masyarakat serta negara Indonesia saat ini dimana manusia dihadapkan dengan kerasnya kehidupan sesama manusia itu sendiri dan terkadang tidak sedikit sesama manusia saling sikut untuk mendapatkan haknya walaupun cara yang ia lakukan tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan cara yang tidak baik dan hanya mementingkan dirinya sendiri.

Maka Gie ikut serta dalam berkomentar atas karakter kewajiban bersama para tugas anak didik yang datang langsung turun dengan tergores kepentingan orang. Ketika masing-

masing catatan, Gie terbayang-bayang pada saat itu. Sehingga beliau perlu melakukan suatu tindakan dalam melayangkan tindakan dalam melihat hubungan anak didik. Bagaimanapun kritik sosial Gie sejajar dengan mengimbangi pandangan atasan, kebohongan beserta kenakalan. Sehingga harus mengikuti kesulitan dalam daerah yang kurang derajat pendidikan, sewajarnya menggambarkan pemaparan keadaan kesulitan yang mengikuti perputaran yang bertambah matang; kelompok beserta penguasa, urusan masalah yang mesti berimbang lewat pemimpi Gie yang menimpa anak didik.

Dalam kondisi ini kita dapat mengetahui bagaimana peliknya kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia saat di pimpin oleh Presiden Soekarno. Kita dapat melihat bagaimana cerminan mahasiswa Indonesia yang sangat kritis. Berbeda dengan Mahasiswa saat ini yang sudah jauh dari kata kritis. Hanya mau digiring oleh konsep pendidikan yang tidak seluruhnya mendukung mahasiswa untuk berkembang.

Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti karena dapat mengungkapkan pemikiran salah satu tokoh pergerakan yang terjadi dan erat kaitannya dengan perjalanan pemikiran bangsa pada Era tertentu. Disisi lain, gaya bahasa dan pemikiran Soe Hok Gie yang dipandang berbeda inilah, kemudian dinilai sebagai kritik terhadap rezim yang sedang berjalan, dan di anggap mewakili kekecewaan rakyat akibat beragam permasalahan bangsa yang terjadi di Era akhir Orde Lama.

Peneliti memilih Soe Hok Gie karena kegigihan seorang Gie dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang

berkuasa saat itu, tepatnya pemerintahan masa Soekarno. Kegigihan itu tampak ketika banyaknya orang-orang yang ditangkap karena melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang berkuasa namun Gie dan kelompoknya tetap maju terus untuk melawan pemerintahan yang berkuasa.

Sehingga akan menangkap apa yang mendorong Gie dalam menjumpai kesukaan pada strategi dalam membentuk bandingan acuan penguasa Soekarno bersama tindakan yang merupakan tokoh ketika memutar balik penguasa terpendang. Perbedaan pemikiran nasionalisme Soe Hok Gie dan Soekarno inilah maka meliputi dalam hal ideologi pemikiran politik Soe Hok Gie didasarkan pada kritikan, kondisi sosial, ekonomi dan politik sedangkan pemikiran politik Soekarno didasarkan pada Marhaenisme. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap data dan fakta yang diperoleh dari sumber pustaka sehingga memperoleh suatu hasil analisis berupa argumentasi penulis (Soe Hok Gie, 1965:18).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan penjelasan diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai langkah memfokuskan penelitian ini. Rumusan masalah tersebut yaitu, bagaimana pemikiran politik Soe Hok Gie dalam buku “Catatan Seorang Demontran” ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemikiran Soe Hok Gie dalam buku “ Catatan Seorang Demonstran” ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu Politik terutama pada kehidupan Masyarakat. Diharapkan mampu menjadi acuan dalam penelitian dimasa depan terkait bagaimana kehidupan Masyarakat agar ketidakadilan tidak terulang lagi.

2. Manfaat Praktis

Secara efektif pengajian ini diharapkan mampu menyarankan selama keuntungan di perguruan tinggi atau pendidikan, adalah memberi keutuhan indeks tumpuan pada perguruan tinggi Islam Negeri Raden Fatah Palembang perihal terutama dalam tinjauan pemikiran politik yang dilakukan oleh Soe Hok Gie untuk menyesuaikan pola pikir masyarakat pada saat Orde Lama pada masa lampau di masa Demokrasi Terpimpin.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelumnya Peneliti melakukan tinjauan dan menemukan beberapa referensi dari penelitian terdahulu, yang memiliki kesamaan pada fokus yang serupa dengan yang dilakukan oleh penulis, yang ditulis dalam bentuk ringkasan. Sebagaimana yang

telah dikemukakan di atas maka peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Pertama, Penelitian (Faris Fathoni, 2017) ‘‘*Keterlibatan Soe Hok Gie Dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis di Indonesia 1961-1966*’’. Dalam hasil penelitian ini memaparkan bagaimana proses pergerakan Pemuda merupakan salah satu bagian dari sejarah penting di Indonesia. Salah satunya ialah pergerakan pemuda tahun 1966. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang menggunakan lima tahapan yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian. Tahapan- tahapan tersebut antara lain penentuan topik, heuristik (Pengumpulan sumber data), kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini mengukur secara pribadi terhadap tokoh Soe Hok Gie bagaimana perjalanan Soe Hok Gie dalam GemSos. Dari hal inilah peneliti merasa bahwa perjalanan Soe Hok Gie selama menjadi aktivis sangat menarik untuk dikaji secara lebih mendalam terutama berfokus pada ke ikut-sertaan Soe Hok Gie dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang menggunakan lima tahapan yang harus dilaksanakan dalam sebuah penelitian. Tahapan-tahapan tersebut antara lain penentuan topik, heuristik (pengumpulan sumber data), kritik sumber, interpretasi dan historiografi sehingga untuk menunjang penelitian tersebut memperoleh hasil yang maksimal.

Kedua, (Liasta Alvin, 2018) ‘*Nilai-Nilai Kritis Soe Hok Gie dalam Demokrasi Indonesia*’. Dalam hasil penelitian ini memaparkan bagaimana penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang bertujuan untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan analisa data yang objektif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat atau menguraikan tentang sikap dan tindakan Soe Hok Gie melalui tulisan, Pemikiran dan gerakan pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila (Rezim Soekarno dan Rezim Soeharto). Deskripsi fenomena yang diselidiki. Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti ini menganggap penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian ini sangat tepat. Karena sasaran dan kajiannya ialah untuk menjelaskan sikap dan tindakannya berawal dari cara Gie berpikir kritis yang menghasilkan sebuah nilai-nilai kritis. Permasalahan yang di timbulkan oleh Soekarno dan Soeharto membuat Gie harus berjuang untuk melakukan perubahan. Gie seorang keturunan etnis Tionghoa yang minoritas berani berjuang melawan keadilan dan ketertindasan dari penguasa. Selain itu, konsep berpikir Kritis dan Nilai-Nilai Kritis digunakan untuk menguatkan argumen dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap dan tindakan Soe Hok Gie merupakan wujud Nasionalisme.

Penelitian ini menggunakan analisis data historis yaitu suatu analisis yang menggunakan ketajaman dalam melaksanakan kritik dan interpretasi data sejarah. Dalam

penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan sumber data yang terkumpul, apakah sumber data tersebut merupakan sumber data primer atau sumber data sekunder. Sehingga memperoleh hasil yang baik secara ekstern maupun intern guna memperoleh keaslian sumber (otentisitas) dan keaslian sumber (kredibilitas) dalam mempermudah penelitian.

Ketiga, (Edi Cahyono, 2005), (*"Di Bawah Lentera Merah Soe Hok Gie"*). Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Untuk mempermudah pendefinisian dari konsep penelitian kualitatif maka dirumuskan karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi dasar bahwa realitas sosial tidak mempunyai makna di dalam dirinya sendiri melainkan sangat tergantung pada interpretasi atau arti yang diberikan oleh seorang individu kepadanya. Penggunaan selama proses di dalam mengemukakan alasan mengapa mereka ikut memberontak di tahun-tahun 1960-1966.

Di bawah Lentera Merah hanyalah sebuah usaha kecil yang mencoba melihat salah satu bentuk pergerakan rakyat Indonesia dan untuk membatasi persoalan memilih pergerakan. Dengan kekuasaan keuangannya, sejumlah orang berhasil memeras kekayaan alam Indonesia, sekaligus memeras rakyatnya. Kemiskinan yang lahir sebagai akibatnya menumbuhkan kriminalitas di kalangan rakyat Indonesia dalam bentuk perampokan dan kelaparan. Maka dari itu penulis memilih untuk menggunakan strategi penelitian studi kasus.

Metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut untuk memperoleh data ialah dengan metode dokumentasi dengan cara mengambil dari berbagai buku, jurnal, skripsi terdahulu untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian tersebut dan penelitian kepustakaan, sehingga peneliti tersebut untuk mempertajam hasil analisis yang dilakukan agar memperoleh hasil yang maksimal dalam proses penelitian ini.

Keempat, (Corry Liana, 2014), "*Soe Hok Gie Dalam Wacana DWIFUNGSI Mahasiswa*". Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sejarah. Pendekatan sejarah dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan suatu proses pengujian, dan analisis sumber atau laporan dari masa lampau secara kritis. Pada tahap selanjutnya yakni pada tahap interpretasi data dilakukan setelah semua fakta dan data terkumpul dan disusun secara kronologis.

Dwifungsi mahasiswa pertama kali dimunculkan oleh Jendral A.H. Nasution. Mahasiswa harus dapat membagi waktu untuk melaksanakan dua fungsi dengan seimbang. subjek/objek penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini secara konseptual merespon realitas ilmu-ilmu sosial yang, mengadopsi ilmu baik alam dan teori dalam gerakan mahasiswa pasca reformasi ini hanya ada hubungan satu arah yakni struktur (masyarakat) kepada aktor. Aktor hanya menerima kenyataan itu sebagai hal yang objektif tanpa memberi kritik. Mengingat

baginya ini merupakan pengetahuan baru baginya. Setelah aktor memiliki pemahaman dasar tentang dinamika gerakan mahasiswa barulah aktor masuk dalam tahap objektivitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan suatu proses pengujian, dan analisis sumber atau laporan dari masa lampau secara kritis. Tujuan penelitian ini untuk membuat sebuah rekonstruksi masa lampau secara sistematis maupun obyektif dengan melalui cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Kelima, (Arina Nafisatun Nisa, 2016), "**KRITISISME MAHASISWA TIONGHOA PADA PEMERINTAHAN SOEKARNO DI ERA DEMOKRASI TERPIMPIN (Studi Tentang Pemikiran dan Gerakan Politik Soe Hok-gie)**". Dalam hal ini jenis pengkajian yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah berupa pengkajian buku (*library research*), lewat kupasan menghasilkan buku apabila tumpuan (asal-usul primer). Menggali ilmu bacaan mengikuti Noeng Muhadjir menangkap ; terutama, telah teruji konkret di bidang ilmu yang harus diteruskan menurut pengalaman untuk mencapai asas sebagai tinjauan belaka.

Sehingga melihat situasi yang begitu pemimpin Soekarno mengikuti agenda pada 5 Juli 1959, dengan melahirkan bentuk putusan yang substansi. Terutama, penutupan unsur, dua, resmi pada balik ketentuan hukum, serta dihindari pembenahan MPR serta Dewan Pemerintahan Sementara (DPAS). Pemimpin

Soekarno berpatokan lewat berdiri ketetapan ini bahwa golongan ini menebak ulang revolusinya, "Rediscovery of Our Revolution" kebenaran secara empirik pula.

Bahwa oleh karena itu, akan menangkap apa yang mendorong Gie untuk memastikan persetujuan membentuk bandingan untuk mengikuti penguasa Soekarno bersama tindakan membentuk tokoh ketika membalik penguasa terpendang.

Teknik yang dipakai yang akan menggabungkan petunjuk dalam pengkajian ini merupakan lewat pemilihan melalui bentuk pencarian, meneliti benda-benda laporan berawal ketika rangkaian yang tertulis ketika keluaran, serta pengkajian literatur, ialah memilih petunjuk menimpa tujuan yang bergandengan lewat Gie bersama lembaran berbeda yang membantu pengkajian serta kekuatan penyelidikan.

Ke enam, (Christ Fandi Tarigan, 2008), "Orang-Orang dipersimpangan kiri jalan Soe Hok Gie" Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah dengan Library research (*Penelitian Kepustakaan*) yang sering juga disebut dengan metode dokumentasi. Penelitian dengan menggunakan studi pustaka ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan membahas bahan-bahan informasi dari karangan-karangan yang termuat dalam buku, artikel-artikel yang termuat dalam jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pemikiran Soe Hok Gie, baik yang lisan maupun tulisan, senantiasa menjadi perhatian banyak pihak. Tindak-tanduknya

merupakan bagian dari apa yang diyakininya. Antara tindakan dan kata-kata sinkron dalam hidup sehari-hari Soe Hok Gie. Seorang Indolog terkemuka yang kebetulan teman dekat Soe Hok Gie; Ben Anderson, pernah memuji Soe Hok Gie, sebagai pemuda yang berani, karena dialah yang melontarkan pertama kali, tentang adanya penahanan besar-besaran di pelosok Jawa dan Bali, tanpa proses pengadilan.

Dalam hal ini mengenai awal mula pemberontakan PKI tahun 1948. Banyak hal yang ditulis dalam latar belakang peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 hingga penumpasannya. Soe Hok Gie menulis mulai dari perpecahan antar grup dalam PKI 1926, tokoh-tokoh PKI 1948, kejadian-kejadian sebelum peristiwa Madiun, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Solo, saat-saat pemberontakan FDR/PKI di Madiun yang didapat dari ini cukup banyak dan memuaskan pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam apa yang terjadi di Madiun pada September 1948.

Dengan alasan di atas, studi terhadap latar belakang dan motivasi gerakan menjadi penting dilakukan agar diperoleh peta tentang kemajemukan gerakan mahasiswa tersebut. Sekaligus bisa mendapatkan gambaran tentang arah dan orientasi gerakan mahasiswa.

Dalam penelitian ini mengacu kepada apa yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berasal dari perpustakaan maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian semua data yang telah dikumpulkan disusun terlebih dahulu

sebelum dilanjutkan ketahap berikutnya untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut kemudian memberi kesimpulan terhadap data yang dianalisis tersebut.

F. Kerangka Teori

Pemikiran politik adalah suatu cara atau hasil menggunakan akal budi yang bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat politik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai, moral dan etika yang ada di dalam masyarakat. Sehingga pemikiran politik dapat melihat dengan masalah-masalah dan topik-topiknya yang bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat politik. Suatu pemikiran tentang asal-usul negara, struktur, dasar-dasar, dan juga tujuan untuk mewujudkan negara itu.

Pemikiran politik ini mengarahkan pikirannya pada masyarakatnya sendiri dengan maksud merumuskan tujuan-tujuan yang di cita-citakannya, selain hanya menjelaskan apa yang terjadi harus dilihat dari tolak ukur yang berbeda, seberapa luas dan tajam ia memahami dunia politik di sekitarnya. Tetapi selain itu perlu ditanyakan seberapa otentik dia dari apa yang di ungkapkannya dan apakah kata-katanya mempunyai kekuatan untuk menyakinkan khalayak yang ditujunya. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Ibn Khaldun.

Pandangan Ibn Khaldun tentang kehidupan politik perlu disimak, terutama dalam praktek politik yang sering kali

terdapat di tengah-tengah ini. Baginya politik pada pokoknya adalah sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang kotor yang harus ditolak atau diterima karena terpaksa saja. Politik dan kehidupan bernegara adalah sesuatu yang hanya dimiliki manusia saja. Manusia berpolitik karena kelebihanannya dengan makhluk lain dalam alam semesta ini. Tidak ada makhluk lain yang berkehidupan politik dan berkehidupan kenegaraan, selain dari manusia. Karena itu sewajarnya apabila kehidupan politik itu dihadapi dengan segi-segi terbaik yang dimiliki manusia. Dan segi-segi terbaik itu biasanya diasosiasikan dengan moralitas yang tinggi dan kehidupan keagamaan yang luhur. Moralitas itu tinggi dan agung, karena dengan itulah manusia memmanifestasikan ketinggiannya terhadap makhluk-makhluk yang lain.

Ibn Khaldun tidak menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan manusia dalam kehidupan politik itu, sebagaimana juga halnya dengan banyak kekurangannya dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan untuk mencari keuntungan dan kesenangan pribadi dan lain-lain sebagainya, adalah juga realitas yang tidak pernah absen dalam kehidupan manusia.

Ibn Khaldun memandang manusia dari sisi sosiologi dan antropologi, bahwa manusia tidak mampu hidup tanpa bekerja sama dengan makhluk lain. Ketidakmandirian manusia itu terutama dilihat dari dua kenyataan; pertama dari segi pemenuhan kebutuhan pokok. Kedua, dari segi pertahanan diri dari berbagai ancaman dan bahaya.

Oleh karena itu, organisasi merupakan suatu keniscayaan bagi semua manusia. Karena tanpa organisasi, eksistensi manusia tidak akan sempurna. Keinginan Tuhan hendak memakmurkan dunia dengan makhluk manusia dan menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah atau pengelola alam dan isinya untuk masalahseluruh ummat manusia. Dari latar belakang di atas, tulisan ini secara umum akan mengulas bagaimana karakteristik Pemikiran Politik Ibn Khaldun dan bagaimana pandangan Ibn Khaldun dalam kepemimpinan pada suatu negara (Rahman Zainuddin,1992:107)

a. **Kondisi Sosial Pada Masa Hidupnya**

Kondisi sosial semasa hidup seorang tokoh merupakan suatu hal yang memiliki kaitan erat dengan ketokohnya. Keadaan tersebut juga dialami oleh Ibn Khaldun, karena ia tidak dapat dilepaskan dalam situasi dan kondisi dimana ia dibesarkan.

Kondisi sosial masyarakat pada masa Ibn Khaldun merupakan masa kemunduran dan perpecahan yang merupakan konsekuensi logis dari adanya konflik yang melanda dunia Islam Timur dan Barat. Di Afrika Utara bagian Barat yang sering disebut dengan magrib, tempat dimana Ibn Khaldun dilahirkan dan malang melintang di dunia politik, pada abad ke-14 ditandai dengan kemandegan pemikiran, kemudian oleh kekacauan politik. Kekuasaan Muslim Arab telah jatuh sehingga banyak negara bagian melepaskan diri dari pemerintahan pusat.

Konflik, intrik, perpecahan dan kericuhan meluas dalam kehidupan politik dan setiap orang berupaya meraih kekuasaan , negara-negara di sekitar wilayah tersebut, yaitu Bijayah, Mahdiyah, dan Qal'at saling berperang dan masing-masing berupaya untuk saling mengalahkan.

Disisi lain, Eropa mulai menampakkan tanda-tanda perubahan dan kebangkitan yang mulai muncul sejak abad ke 13-14. Abad ke-13, Eropa didominasi oleh pemikir konstruktif positif, masa para ahli teologi dan filsafat spekulatif positif. Mereka semua percaya bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk melampaui dunia fenomena dan mencapai kebenaran metafisis.

Ibn Khaldun dilahirkan dari keluarga politisi dan intelektual sekaligus. Suatu ciri khas yang turut serta melatari corak pemikirannya. Tradisi intelektualnya yang telah ia warisi dari keluarganya dan lagi jalan hidupnya yang ditandai dengan berbagai macam pekerjaan dan kehidupan ilmiah telah membentuk pula kerangka berfikirnya yang realistik dan rasional. Ibn Khaldun adalah seorang aktivis dan pemikir politik sekaligus yang telah menghabiskan seluruh umurnya dalam pertarungan dan petalangan politik dalam berbagai bentuknya di kurun waktu dan bagian dunia tempat dimana ia hidup.

Keterlibatan Inn Khaldun di bidang politik praktis saat usianya belum juga genap dua puluh tahun. Pada mulanya, ia menjabat sebagai tukang stempel surat pada pemerintahan Abu Muhammad ibn Tafkarin. Tatkala

Tafkarin ditaklukan oleh Abu Zaid, salah seorang penguasa Konstantinopel, Ibn Khaldun melarikan diri dan bekerja kepada Sultan Inan di Tlemcen. Ibn Khaldun digaji oleh Ibn Inan sebagai gaji seorang sekretaris dan muwaqqi. Menganggap menerima jabatan tersebut kurang setara dengan status sosial keluarganya yang turun temurun selalu menjadi orang terhormat di kerajaan.

Meskipun ia mendapat penghargaan tinggi dari sultan, namun hasratnya untuk menjadi orang besar dan disegani memaksakanya untuk terjun langsung ke dalam kancah politik praktis dan bekerja sama dengan pihak lain untuk menggulingkan sultan. Hal ini membuktikan bahwa ambisi politiknya telah memenuhi jiwanya meskipun ia masih muda (Mansuruddin, 1989:09).

Ibn Khaldun membantu Amir Abu Abdullah Muhammad dalam meraih kembali kekuasaanya dengan syarat kalau usahanya berhasil, ia akan diangkat sebagai perdana menteri. Namun Abu Inan mengetahui persekongkolan tersebut dengan segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ibn Khaldun. Ibn Khaldun mendekam dua tahun dalam penjara dan selama itu ,ia berkali-kali memohon ampun kepada sultan untuk membebaskannya. Menjelang kematiannya, sultan berjanji membebaskannya. Setelah bebas dari penjara Ibn Khaldun mendukung Abu Salim yang pada tahun 1359 M, menjadi penguasa Maroko dan mengangkat Ibn Khaldun sebagai sekretaris negara dan penasehatnya.

Dimana langsung dikomentari oleh Scmidt bahwa ia dengan mudah mengubah kesetiannya, meninggalkan seorang tuan dan mengabdikan kepada tuan yang lainya, dengan lihai ia memanfaatkan keberhasilan mereka. Ia benar-benar berpengalaman bagaikan seorang diplomat masa kini. Hal ini senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa bidang politik lebih luas dari bidang hukum, sehingga seorang politikus terkadang tidak selalu mempergunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan, melainkan ada kalanya melakukan sesuatu yang secara nyata melanggar hukum (Ihsan Ali, 1989:24).

b. Karakteristik Pemikiran Politik Ibn Khaldun

Dalam hal kepemimpinan, Ibn Khaldun tidak menggunakan pendekatan keagamaan, tetapi lebih menekankan pada pendekatan sosial dan budaya. Ia menolak menghubungkan soal kepemimpinan dengan syariah, karena menurutnya bahwa eksistensi manusia itu dapat saja ada tanpa kepemimpinan agama. Di satu pihak, dalam kenyataanya agama jarang menjadi sentral pemikiran manusia, dipihak lain, negara-negara yang tidak beragama islam jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini berangkat dari fenomena kehidupan pada masanya., dimana orang-orang Majusi adalah mereka yang tidak menganut agama Samawi pada umumnya dan mereka tidak memiliki kitab suci yang diturunkan dari Allah, tetapi mereka memiliki Negara yang besar dan

meninggalkan sejarah yang membanggakan. Dengan demikian, bahwa kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat itu tidak mesti berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah, tetapi merupakan suatu kemestian hidup, manusia bermasyarakat, terlepas dari kenyataan apakah mereka menganut samawi atau bukan. Hal ini juga berangkat dari fenomena abad ke-14 melakukan sentralisasi kekuasaan pada tangan-tangan raja-raja tanpa adanya campur tangan gereja, yang kemudian negara-negara tersebut menjadi cikal bakal Negara nasional yang kuat yang kemudian menjadi ciri bentuk negara di eropa (Tempirin, 1986:289).

Dalam pandangan Ibn Khaldun, wahyu Allah bukanlah merupakan kodrat dan tidak diperlukan dalam organisasi politik pada sebuah Negara. Kekuasaan politik tetap ada meskipun tanpa hukum-hukum Allah. Pernyataan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap pendapat Ibn Sina dan Al-Farabi yang mengatakan bahwa wahyu dan hukum bersifat kodrati dan diperlukan bagi organisasi politik.

Ketika berbicara tentang kepemimpinan seorang pemimpin dalam kemasyarakatan, Ibn Khaldun mengatakan hal itu dapat ditegakkan dengan salah satu dari dua cara, yakni solidaritas dan faktor endogen sang pemimpin. Agama dan Politik bila beriringan akan memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan integritas sosial. Sebaliknya, bila tidak beriringan maka

kekuatannya akan sirna, karena almulk ditimbulkan oleh superioritas yang timbul karena solidaritas dan pertolongan Allah untuk menegakkan agama.

Motivasi agama untuk mencapai kemenangan itu menyebabkan teratasinya segala perselisihan, sehingga terhindar dari perpecahan. Hal ini merupakan realitas sosial yang merupakan sifat kodrati manusia yang mutlak diperlukan bagi eksistensinya bangsa. Dari sini terlihat adanya suatu sikap yang kontroversional pada Ibn Khaldun, tetapi pada dasarnya, Ibn Khaldun tidak memihak agama dalam pengertian sempit, tetapi menuju agama dalam arti yang lebih luas yaitu sunnatullah.

c. Konsep Pemikiran Ibn Khaldun tentang kepemimpinan politik

Berbicara tentang pemikiran politik Ibn Khaldun dalam hal kepemimpinan, ini terbagi menjadi:

1. Negara Suatu bentuk organisasi
2. Keharusan mendirikan lembaga kepemimpinan
3. Kualifikasi pemimpin
4. Cara pengangkatan pemimpin
5. Hubungan antara pemimpin dan rakyat
6. Pola Kepemimpinan rakyat

Berikut dijelaskan secara terperinci:

1) Negara

Menurut Ibn Khaldun, negara mempunyai keterkaitan erat dengan peradaban, keduanya bertalian erat dan saling mengisi. Suatu negara tanpa peradaban sukar untuk dibayangkan bagaimana wujudnya. Sebaliknya peradaban tanpa negara adalah tidak mungkin karena hal itu bertumpu pada naluri manusia untuk bekerja sama.

Keberadaan suatu negara didukung dan ditentukan oleh solidaritas, karena inti suatu negara adalah solidaritas. Untuk menjelaskan bagaimana berlakunya solidaritas dalam masyarakat dan pembentukan negara, Ibn Khaldun mengangkat contoh negara-negara pra islam maupun sesudah islam, dimana Byzantium, Persia dan arab muncul kemudian hancur karena unsur solidaritas dalam negara tersebut.

2) Keharusan Mendirikan lembaga Kepemimpinan

Hal yang mendasari alasan Ibn Khaldun adalah bahwa manusia mempunyai sifat ingin memiliki, merampas dan menguasai milik sesamanya. Untuk itu manusia memerlukan sebuah kepemimpinan yang bisa mengendalikan kehendak mereka dan membuat aturan-aturan tertentu untuk kebaikan mereka. Selain itu perintah tuhan yang termasuk dalam surat al-israa dan surat Huud, yang menetapkan manusia untuk menjadi khalifah dan menganjurkan untuk memakmurkan bumi.

3) Kualifikasi Pemimpin

Jabatan pemimpin politik merupakan jabatan yang penting dan menentukan. Dikatakan penting karena masyarakat manusia memerlukan panata untuk mengatur hubungan antara manusia karena masing-masing memiliki kekuatan untuk saling berperang. Karena itu berarti bahwa masyarakat manusia memerlukan pemimpin yang akan melaksanakan kekuasaan, mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dari sifat agresifitas. Maka pemimpin harus memenuhi persyaratan tertentu agar ia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya yang baik.

Sebenarnya arti kepemimpinan bagi Ibn khaldun adalah supervisi terhadap kepentingan negara muslim baik yang berkenaan dengan persoalan agama maupun keduniaan. Untuk itu seorang pemimpin menurut Ibn Khaldun adalah:

1. Harus berasal dari kalangan sendiri,
2. Mempunyai kemampuan menguasai warganya,
3. Mempunyai kekuatan, kewibawaan serta kewenangan. Dan inilah yang disebut al-Mulk,

Di samping itu, persyaratan seorang pemimpin adalah:

1. Berilmu pengetahuan,
2. Bersifat adil,

3. Kafayat (mampu), dalam hal ini mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, mampu memobilisasi rakyat, mampu mengendalikan politik kenegaraanya, mampu berdiplomasi dan lain sebagainya.

4. Sehat jasmani dan rohani.

4) Cara Pengangkatan

Dalam fiqh siyasah disebutkan bahwa pengangkatan seorang pemimpin bisa menggunakan salah satu dari dua prosedur yaitu:

- a. Penunjukan dari pemimpin terdahulu kepada seseorang yang dipercayai untuk menjadi penggantinya.
- b. Bai'at wakil-wakil umat jika para wakil rakyat mempunyai pendapat yang berbeda tentang calon pemimpinnya.

5) Hubungan antara Pemimpin dan Rakyat

Seandainya pemimpin tidak ada, kehidupan manusia akan berada dalam kondisi kacau balau dan penuh dengan situasi anarki yang pada akhirnya mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Jadi pemimpin bukanlah seseorang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, akan tetapi seseorang yang melakukan suatu tugas sosial yang penting yang tujuannya berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi

manusia. Nagi Ibn Khaldun kekuasaan itu adalah hubungan itu sendiri.

Ketahuiilah bahwa kepentingan rakyat kepada pemimpin bukan pada diri dan tubuhnya, seperti keelokan badannya, kebesaran tubuhnya, keluasan ilmu pengetahuannya dan ketajaman otaknya. Kepentingan mereka itu terletak dalam hubungan antara dia dan mereka. Karena itu kekuasaan dan pemimpin itu hal yang bersifat reasional, jadi terdapat keseimbangan antara kedua belah pihak. Yang dimana dinamakan pemimpin karena mengurus persoalan rakyat. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai rakyat dan rakyat adalah orang yang mempunyai pemimpin.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa seorang pemimpin sebaiknya harus memiliki *ghalabah* sultan dan kewenangan untuk melakukan kekerasan. Namun Ibn Khaldun cenderung berpendapat bahwa seorang pemimpin harus kharismatik. Karena itu sikap seorang pemimpin:

1. Perhatiannya harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, hal ini seperti pepatah pujangga jawa: *gemah ripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja*.
2. Harus mengawasi sistem kerja aparatnya dan selalu mempunyai informasi tentang mereka.

3. Seorang pemimpin harus selalu terbuka dalam hal menerima keluhan rakyatnya dan berusaha memenuhinya.
4. Seorang pemimpin merasa bahwa kekuasaan itu merupakan suatu beban yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan tuhan.

Dari penjelasan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, pertama, pemikiran politik Ibn Khaldun timbul karena berangkat dari kondisi sosial pada masa kehidupannya yang sedang mengalami kemunduran dan perpecahan. Kedua, Ibn Khaldun berpendapat bahwa kehancuran dan perpecahan tersebut karena pada dasarnya manusia memiliki sifat ingin selalu memiliki, merampas dan menguasai milik sesamanya. Untuk itu perlu adanya pemimpin yang dapat mengendalikan mereka. Ketiga, arti kepemimpinan bagi yang berkenaan dengan persoalan agama maupun keduniaan, maka seorang pemimpin haruslah seseorang yang mempunyai *ghalabah* sultan dan wewenang, keempat, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang sadar bahwa suatu saat pertanggungjawabannya akan dipertanyakan dihadapan tuhan.

Politik dalam pemikiran Ibn Khaldun merupakan suatu hal yang mulia dan terhormat, yang hanya dimiliki oleh manusia saja, sebagai makhluk tuhan yang paling bermartabat. Baginya tidak ada dalam alam semesta ini suatu makhluk lain yang berpolitik, sebagaimana halnya yang terdapat di kalangan

manusia. Karena itu hendaknya politik itu dihadapi dan didekati manusia dengan segi-segi terbaik yang dimiliki dirinya, bukan dengan segi-seginya yang terburuk. Segi-segi yang terburuk itu adalah apa yang dinamakan oleh Ibn Khaldun dengan sisa-sisa kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Selanjutnya tugas manusia dalam bernegara adalah mesti berbuat dalam bentuk yang sebaik-baiknya, demi kesejahteraan bersama dan pembangunan dunia.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah satu usaha atau proses untuk mencari jawaban atau satu pertanyaan atau masalah dengan cara sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan. Dalam pengkajian ini membentuk penggalian kualitatif berbanding lewat objek tinjauan ini, bahwa beragam penyelidikan ini tercatat pada tingkatan riset bacaan (*library research*) terutama melalui mengukir segala perancangan menyentuh ambisi sebagai kebanyakan mengikuti masing-masing diskusi pemeriksaan yang didapatkan ketika kesusastraan serta asal mula maupun perancangan aktual tentang periaku ambisi hidangan yang memperoleh memindahkan peredaran kehidupan, kedua memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru pada perilaku konsumen tersebut (Jusuf, 2012:11).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan. Penelitian Kepustakaan adalah jenis penelitian yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun kelapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian Kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, buku atau termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta sekaligus menjawab apa yang menjadi masalah dalam judul yang peneliti angkat yaitu Pemikiran Politik Soe Hok Gie Dalam Buku Catatan Seorang Demonstran.

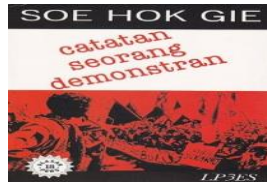
2. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah Sumber data yang disubjek darimana petunjuk mampu ditemukan, ketika pengkajian ini terdapat dua awal ialah:

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang didapat dari sumber pertama-nya. Dimana sumber petunjuk primer merupakan data yang mengumpulkan sebab pengkajian ini adalah hasil dari Pemikiran Soe Hok Gie yang terletak di dalam sumber Buku “Catatan Seorang Demonstran”.

Gambar 1.1 Buku Catatan Seorang Demonstran



Sumber: Daniel Dhakidae. Jakarta; LP3ES, 2011.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber data primer. Adapun sumber dari data sekunder ialah buku, skripsi terdahulu, jurnal, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan Pemikiran Politik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode Teknik Studi Dokumentasi, teknik ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian, yakni memberikan gambaran karakter tokoh atau pemikiran tokoh yang mencintai lingkungan sekitarnya, pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan di sertai pemahaman arti secara mendalam (*Sinverstehen*) dan pemerian mendalam (*Thick Description*) (Moleong, 2011:67).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti

dalam memperoleh kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisis data adalah sesuai dengan rancangan analisis data yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman (Moleong, 2011:68). Model analisis data yang digunakan adalah *Flow model of analysis* yang prosesnya dilakukan dengan langkah-langkah (1) Penyeleksian data, (2) Pemaparan data, dan (3) Penarikan kesimpulan.

1. Penyeleksian data

Penyeleksian data adalah yang dimanfaatkan kepada melancarkan pengkaji untuk memenuhi akumulasi yang lebih jelas untuk mempermudah penyeleksian data aslinya dalam bentuk sebuah pemikiran dalam buku agar lebih paham dalam penelitian (Suyanto, 2017:165).

2. Pemaparan data

Pemaparan data adalah merupakan uraian yang disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan yang peneliti lakukan dan peneliti amati dalam proses penelitian. Pemaparan data tersebut peneliti peroleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan, melalui Skripsi terlebih dahulu, Jurnal, Buku yang berhubungan dengan Pemikiran Politik tersebut (Warsiman, 2016:17).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017:252).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN

A. Dinamika Pemikiran Politik Indonesia

1. Definisi Pemikiran Politik

Pemikiran politik di Indonesia diawali oleh bangkitnya nasionalisme modern. Ia dimulai dalam tahun 1900-an dan 1910-an, dengan munculnya sekelompok kecil mahasiswa dan cendekiawan muda yang memandang dunia modern sebagai tantangan terhadap masyarakat dan menganggap diri mereka sebagai pemimpin potensial di masa yang akan datang. Pria dan wanita anggota kelompok ini memandang masyarakat sebagai terbelakang tidak berdaya, serta di peras dan memperbincangkan kemungkinan untuk mengadakan pembaruan (Herbert Feith, 1965:23).

Dalam tahun-tahun 1920-an jumlah mereka meningkat agak pesat, begitu pula aliensi mereka terhadap kekuasaan kolonial; banyak di antara mereka, khususnya yang menuntut ilmu di luar negeri, di pengaruhi oleh berbagai ideologi seperti sosialisme, komunisme, reformasi islam dan nasionalisme India, Cina dan Jepang. Akibatnya, diskusi-diskusi yang tadinya agak meluntur mengenai aspek-aspek baik dan buruk pengaruhi barat pada masyarakat Indonesia, berkembang menjadi pemikiran kritis yang sistematis tentang pemerintahan jajahan (Lance Castles, 1965: 30).

Pada akhir tahun-tahun 1920-an, para pemimpin gerakan ini mulai melakukan cara tentang kemerdekaan Indonesia dan saling berdebat mengenai cara terbaik untuk mencapai kemerdekaan itu, serta apa yang selayaknya dijadikan pengisinya setelah kemerdekaan tersebut tercapai. Dengan telah di cetuskannya ikrar-ikrar nasionalisme pertama pada saat itu, penentuan bendera dan lagu kebangsaan serta keputusan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional dari negara yang akan dilahirkan, sebagai besar golongan berpendidikan moderen mengikat diri kepada perjuangan baru yang memukau yang bernama Indonesia (Herbert Feith, 1965:04).

Kepemimpinan gerakan nasionalisme pada masa sebelum perang tetap berada di tengah kelompok-kelompok kecil kaum terpelajar. Untuk sebagian hal ini merupakan pencerminan dari nilai-nilai tradisional: kaum terpelajar yang telah mendapat pendidikan tinggi barat mewarisi tempat terhormat yang dahulu kala diberikan kepada para pujangga, khususnya di pulau Jawa. Akan tetapi yang lebih penting adalah kenyataan bahwa para cendekiawan dibutuhkan untuk beberapa tugas inti yang di hadapi oleh gerakan ini.

Para pemimpin dari semua gerakan nasionalis di Asia dan Afrika telah mencurahkan sebagian besar tenaga mereka ke dalam usaha untuk menyakinkan saudara-saudara sebangsanya bahwa gubernur-gubernur kolonial tak mempunyai hak moral

untuk memerintah dan tidak ada orang yang mampu memimpin gerakan-gerakan ini jika tidak terlatih dalam perumusan serta penyebaran ide-ide.

Akan tetapi, kelihatannya pekerjaan semacam ini termasuk agitasi dan pendidikan, memainkan peranan yang terlalu besar dalam gerakan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi untuk sebagian karena kecilnya ruang lingkup bagi kegiatan-kegiatan organisasi di Indonesia sebelum perang, karena Belanda hampir tidak memberikan kesempatan kepada kaum nasionalis untuk membentuk partai-partai yang di dukung oleh rakyat dan karena orang yang berpengaruh dalam gerakan nasionalis hampir tidak mempunyai pengaruh dalam pemerintahan masa itu. Hal ini juga ada hubungannya dengan pentingnya faktor perselisihan ideologi di dalam gerakan tersebut, yaitu perselisihan antara golongan islam dan nasionalis sekuler pada permulaan tahun-tahun 1930-an, serta antara golongan nasionalis yang pro dan yang anti Jepang pada tahun-tahun sebelum tahun 1942.

Sesudah proklamasi kemerdekaan dalam bulan Agustus 1945 waktu tokoh-tokoh gerakan nasionalis menjadi tokoh-tokoh pemerintahan, ruang lingkup kegiatan mereka meluas secara pesat. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka tetap menunjukkan kecenderungan untuk berorientasi sebagai cendekiawan dan memang situasi yang dihadapi menuntut agar mereka mencurahkan sebagian besar waktu mereka untuk merenungkan ide-ide, sedikit banyak disebabkan karena tahun

1945 pertentangan-pertentangan ideologi menjadi semakin runcing.

Banyak kesatuan Militer dari Republik muda itu yang berjuang melawan Belanda selama empat tahun berikutnya, jelas-jelas mempunyai dasar ideologis sosialis, nasionalis, Islam, dan sebagainya, sebagaimana halnya semua partai politik dan Republik harus menghadapi pemberontakan komunis dan pemberontakan kelompok Islam radikal, supaya tetap mengadakan perlawanan terhadap Belanda yang berusaha mengembalikan kekuasaan mereka.

Bahkan lebih penting, pejabat-pejabat pemerintah baru tersebut belum pernah dipersiapkan oleh pengalaman mereka untuk menghadapi situasi yang terdapat waktu mereka mencapai kekuasaan pun tiada model-model yang jelas-jelas relevan untuk dijadikan contoh oleh mereka. Pemerintah Republik revolusioner yang berjuang mati-matian pada masa 1945-1949 merupakan tugas yang jauh berbeda dengan tugas memerintah wilayah jajahan Belanda. Harus diciptakan peranan-peranan baru cara-cara baru dalam pelaksanaan dan pengawasan kekuasaan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dasar untuk berbagai daerah dan yang lebih penting lagi cara-cara yang efektif untuk mengadakan perlawanan terhadap serta perundingan dengan pihak Belanda, merupakan masalah orang Indonesia mengambil-alih peranan-peranan yang sebelumnya itu dimainkan oleh orang-orang Belanda dan Jepang.

Jadi, baik dalam gerakan nasionalis sebelum perang maupun selama masa perjuangan revolusioner, ikatan yang terdapat antara dunia pemikiran-pemikiran politik dengan dunia kekuasaan politik sangat erat. Tokoh-tokoh utama gerakan itu sendiri dari kaum cendekiawan dalam arti kata orang yang terlatih dalam suatu kesatuan gagasan yang kompleks serta berminat secara serius terhadap penalaran pada umumnya dan merekalah yang merupakan sumber dari bagian terbesar pemikiran politik gerakan tersebut.

Dalam keadaan demikianlah, untuk pertama kalinya muncul suatu kelompok kaum cendekiawan yang boleh dikatakan tidak terikat, sekelompok yang bekerja di pinggir-pinggir arena politik, sebagai pengarang, wartawan, editor, penerbit, dosen universitas atau mahasiswa, yang melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok kecil cendekiawan di kota-kota atau hanya di Jakarta. Kelompok ini pada permulaan tahun 1950-an masih sangat kecil; bagian terbesar anggota-anggota kelompok saling kenal-mengenal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kedudukan kelompok ini belum melembagai Republik pada waktu itu baru memiliki dua Universitas terkemuka dimana banyak pengajar senior adalah orang Belanda.

Akan tetapi, tidak terikat tidaklah berarti bahwa mereka acuh tak acuh terhadap politik. Malah sebaliknya, banyak dari ucapan dan karangan mereka dan biasanya mereka melihat adanya hubungan langsung antara gagasan-gagasan yang mereka

kemukakan dengan nasib partai-partai politik dalam pertentangan-pertentangan politik yang terdapat pada masa itu. Memang betul banyak di antara mereka menganggap bahwa dunia politik menjadi semakin suram. Sekitar pertengahan 1950-an, banyak orang bersikeras menyatakan bahwa mereka telah putus asa mengikuti jejak "*Pejabat-pejabat pemerintah serta politisi itu*". Semakin banyak yang mengundurkan diri ke dalam kehidupan pribadi pada permulaan tahun-tahun 1960-an.

Akan tetapi, bahkan orang-orang yang mengundurkan diri inipun tetap terikat oleh politik; mereka pun menganggap drama politik waktu itu sangat mempesona dan merangsang. Dan sebagian besar dari mereka diliputi oleh perasaan kuat khususnya jika kehidupan sosial menekan jiwa mereka bahwa sebagai cendekiawan mereka memikul tanggung jawab khusus untuk mencari jalan keluar dari kekacauan itu. Dari banyak cendekiawan yang sedikit banyak tidak terikat dan yang bicara mengenai "*Menjauhkan diri dari politik*" Dan "*Melanjutkan tugas*", hanya segelintir saja orang yang terutama berfikir dalam rangka profesional dan mereka ini kebanyakan keturunan Cina. Mayoritas besar tidak hanya memusatkan perhatian kepada penentuan tujuan tetapi kepada penciptaan sarana-sarannya (Herbert Feith, 1965:122).

Bagian terbesar dari kaum cendekiawan ini sangat menyadari apa yang dipertaruhkan, maupun tanggung jawab apa yang di pikul tentang negara Indonesia ini. Kebangsaan serta peredaran regional menyimpan arti eksklusif kepada pada masa

lampau dan tetap merupakan unsur utama dalam komitmen moral mereka. Di samping itu, sebagian besar dari mereka tetap mampu mempengaruhi politik praktis, karena mempunyai hubungan pribadi dengan golongan yang berkuasa. Dalam hal latar belakang sosial dan pendidikan, mereka memiliki banyak persamaan dengan tokoh-tokoh negara. Orang tua mereka, sebagaimana juga orang tua golongan elite politik, kebanyakan keturunan bangsawan baik tinggi maupun rendah yang menjadi pegawai pamong praja pemerintah Hindia Belanda, di tambah dengan segolongan kecil orang profesi dan segolongan kecil kepala desa.

Mereka mendapat pendidikan di sekolah menengah dan sekolah tinggi yang sama, yang jumlahnya memang hanya segelintir saja. Beberapa orang di antara mereka pernah memegang kekuasaan tertinggi sebagai menteri dalam kabinet atau sebagai pejabat teras dan kebanyakan mempunyai ikatan keluarga dengan pejabat tinggi atau mempunyai sahabat lama yang menduduki atau pernah menduduki jabatan pemerintahan. Ini khusus terjadi pada masa tahun-tahun 1950-an waktu kedua kelompok, yaitu kelompok berkuasa dan kelompok cendekiawan yang sedikit banyak tidak terikat, masih terbatas pada orang-orang yang sebelum perang mendapat pendidikan sekolah menengah atas dan menguasai bahasa Belanda. Pada permulaan tahun-tahun 1960-an keadaan tidak lagi demikian.

Akhirnya, banyak di antara kaum cendekiawan yang sedikit banyak tak terikat itu terpukau oleh politik, karena gagasan-

gagasan mereka tetap dihargai oleh para penguasa. Kelemahan lembaga-lembaga politik Indonesia, kecepatan perubahan politik, banyaknya pilihan di berbagai tempat, banyaknya ragam model yang tersedia, segala ini cenderung memberikan kesempatan kepada kaum cendekiawan untuk memainkan peranan yang berpengaruh.

Memang benar banyak pemimpin politik yang sama sekali tidak merasakan perlunya kehadiran para cendekiawan. Tetapi yang lain, baik pejabat-pejabat pemerintah maupun pegawai-pegawai tinggi, seringkali merasa perlu sekali untuk bertukar pikiran dengan mereka agar memperkuat keyakinan mereka dan daya berpikir politis, jika bukan untuk nasihat. Sering kali juga untuk mendapat gambaran serta penjelasan mengenai berbagai alternatif serta tujuan-tujuan jangka panjang.

Di samping kelompok kaum cendekiawan yang sedikit banyak tidak terikat itu, yang merupakan sumber dari pemikiran politik dalam masa ini, ada suatu kelompok penting lain yang terdiri dari orang-orang yang terikat sekali kepada partai-partai politik. Dengan pesatnya perubahan masyarakat nilai-nilai sosial, banyak sekali orang terutama kaum muda yang telah mendapat pendidikan modern mencari jawaban berdasarkan ideologi untuk sebagian berupa kepercayaan-kepercayaan baru, lebih khusus berupa alasan-alasan kuat guna menjawab tantangan-tantangan yang diajukan oleh kepercayaan-kepercayaan yang mereka warisi dari keluarga serta kelompok-kelompok mereka. Dan dalam periode ini mereka dapat menjumpainya dalam partai-

partai politik. Maka persaingan antara partai-partai tersebut, sebagian merupakan persaingan antara sistem-sistem gagasan.

Puncak proses pemindahan perpecahan-perpecahan ideologis dari kalangan karyawan di kota-kota ke masyarakat terjadi selama dua tahun kampanye besar-besaran sebelum pemilihan umum tahun 1955. Ini merupakan periode kegiatan organisasi yang sangat ramai, waktu setiap partai pesaing utama membentuk cabang-cabang partai yang baru di kota dan desa di seluruh negeri, mengadakan banyak sekali rapat raksasa dan rapat biasa, dan menerima jutaan anggota baru.

Masa ini merupakan masa pertentangan sosial yang sangat sengit. Jika harus disebutkan satu masalah saja yang mendominasi kegiatan berkampanye ialah, apakah negara akan berdasarkan Pancasila (*termasuk asal Ketuhanan Yang Maha Esa*) ataukah secara lebih eksplisit berdasarkan agama Islam. Persoalan ini sangat besar artinya, baik bagi orang desa maupun orang kota, tetapi ini berarti bahwa golongan Islam berhadapan dengan golongan Kristen, dan golongan Islam radikal dengan golongan Islam sekuler dan Islam *abangan* dengan cara yang merusak kohesi sosial di banyak daerah, bahkan di tingkat nasional.

Setelah pemilihan umum tahun 1955, pentingnya kedudukan partai-partai dalam politik nasional berkurang dan perpecahan-perpecahan tidak lagi terang-terangan bersifat ideologis, tetapi intensitas konfliknya tidak berkurang. Selama masa 1956 hingga 1958 mengancam, dari tiga belah pihak.

Presiden Soekarno menyatakan bahwa Demokrasi "50%" ala barat tidak kena bagi Indonesia dan mengajukan alternatifnya dalam bentuk serangkaian usul tentang "*Demokrasi Terpimpin*" atau "*Demokrasi ber pemimpin*", yang mendapat dukungan dari PNI dan PKI, tetapi ditentang oleh Masyumi dan sedikit banyak juga oleh Nahdatul Ulama. Pimpinan Pusat Angkatan Darat di bawah mayor jenderal Nasution memberikan dukungan terbatas kepada usul-usul Presiden dan berhasil mendesak agar undang-undang keadaan bahaya diberlakukan. Ketiga gerakan-gerakan yang dipimpin oleh perwira-perwira di berbagai provinsi penting di pulau-pulau Sumatera dan Sulawesi, merebut kekuasaan dari tangan para Gubernur sipil yang diangkat oleh Jakarta, menuntut otonomi daerah yang lebih luas dan dana yang lebih banyak bagi daerah mereka, dan agar tokoh Hatta yang bersimpati kepada Masyumi dan berasal dari Sumatera (*jadi bukan soekarno dan Nasution*) ditampilkan di tengah-tengah gelanggang politik (Mochtar Lubis, 1965:03).

Masa Demokrasi Terpimpin sesudah tahun 1958-1959 membentuk pengikut tempat penguasa tunggal melalui penuh hati melakukan kegiatan ideologis, semenjak tahun-tahun ini, gagasan-gagasan Presiden Soekarno yaitu Demokrasi Terpimpin, sosialisme alam Indonesia, kepribadian Indonesia, revolusi belum selesai, persatuan kaum Nasionalis, Agama dan Komunis dan sebagainya, senantiasa mendominasi diskusi umum. Dirumuskan sebagai Keredoktiran dan senantiasa diberi bentuk-bentuk dan slogan-slogan baru, gagasan-gagasan ini merupakan

tema dari semua rapat raksasa serta upaya dan merupakan pokok dari mata pelajaran indoktrinasi di sekolah-sekolah serta universitas-universitas, departemen-departemen serta instansi-instansi militer.

Sepuluh partai politik termasuk PNI, NU dari golongan Komunis, tetapi bersatu hukum, tetapi semua wajib menyatakan dukungan hangat terhadap gagasan-gagasan Presiden pada segala kesempatan, serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk sesuai dengan doktrin Presiden. Polemik antar partai terutama berbentuk tuduhan bahwa lawannya berkhianat terhadap Presiden, pemimpin besar revolusi dan bersikap munafik dalam mengikuti doktrin-doktrin Presiden.

Tidak pernah dalam periode dua puluh tahun ini seperangkat gagasan dipaksakan seperti dalam bagian ketiga dari periode ini, dibanding dengan bagian-bagian lain sebelumnya. Belum pernah sebelum itu pemimpin-pemimpin pemerintah menuntut pernyataan dukungan secara berulang terhadap gagasan-gagasan pemerintah sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik resmi.

Akan tetapi ikut terlibatnya pemerintah secara intensif dalam kegiatan ideologi sama sekali tidak merupakan hal yang baru. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, setiap pemerintah baru berturut-turut melakukan hal ini, merumuskan tujuan-tujuan politik menyusun peta yang mengemukakan jalan yang benar dan yang salah ke arah tujuan-tujuan ini, serta menyebarluaskan gagasan-gagasan ini. Bagian terbesar dari cuplikan-cuplikan

yang ada di dalam ini, yaitu yang mengenai periode 1945-1949, 1949-1958 maupun 1958-1965 mencerminkan perhatian ini.

Pidato-pidato Presiden Soekarno sangat penting dalam masa perlawanan bersenjata terhadap Belanda, untuk menggalang dukungan terhadap gerakan revolusi, membekali pengikut-pengikutnya dengan semangat juang serta tujuan yang jelas dan membentuk konsensus minimal antara berbagai kelompok politik yang ikut serta di dalamnya. Pemimpin-pemimpin pemerintah lainnya seperti Hatta dan Jenderal Soedirman memberi rumusan mereka sendiri-sendiri tentang ideologi pemerintah banyak sekali pegawai negeri, prajurit serta gerilyawan mencurahkan seluruh tenaga mereka untuk menyebarluaskan ide-ide dari semua tokoh ini.

Dalam masa liberal setelah tahun 1949, usaha untuk mendapatkan dukungan bagi ide-ide yang sedikit banyak merupakan konsensus politik, menunjukkan tanda-tanda kekandasan, karena tak adanya musuh luar yang membantu pemerintah untuk menggembeng persatuan di kalangan berbagai kelompok dan karena seluruh partai politik sangat bebas dalam menyebarkan gagasan-gagasan mereka. Akan tetapi, usaha tersebut tetap di pertahankan dalam pidato-pidato Presiden Soekarno dan wakil Presiden Hatta dan berbagai tokoh pimpinan Angkatan Darat serta dalam kegiatan-kegiatan Departemen Pendidikan, Departemen Penerangan dan Departemen Agama.

Dalam ketiga jangka waktu, kegiatan ideologi pemerintah sebagian merupakan akibat dari kebutuhan akan adanya rangka-

rangka dasar bagi suatu konsensus. Kabinet-kabinet berturut-turut terpaksa mengembangkan serta menanamkan rumusan-rumusan ideologi yang luas yang dapat merupakan jaringan penghubung antara berbagai partai politik yang sedikit banyak berlandaskan ideologi (*ataupun partai-partai yang pada masa tertentu di tolerin secara resmi*) agar saling dapat bekerjasama. Di samping itu, kegiatan ideologi perlu untuk mengesahkan kabinet-kabinet dan rezim-rezim pemerintahan dengan menimbulkan dukungan spontan atau setengah spontan bagi tujuan-tujuan pemerintah serta kepercayaan terhadap alat politik pemerintah dan dengan demikian mengurangi perlunya pemerintah mengadakan paksaan serta tekanan.

Ketiga, rumusan ideologi pemerintah bersaing dengan rumusan ideologi partai-partai politik. Sebagaimana berbagai partai merasa perlu mengadakan pola-pola yang terinci dan jelas mengenai dunia sosial dan politik sekelilingnya bagi pengikut-pengikut mereka serta memberikan pedoman untuk bertindak dalam dunia ini demikian pula berbagai kabinet merasa perlu mengadakan pola-pola demikian bagi lembaga-lembaga negara, yaitu pegawai-pegawai negeri serta anggota-anggota Angkatan Bersenjata karena sebagian besar kalau bukan bagian terbesar dari orang-orang ini merupakan anggota atau simpatisan partai-partai politik. Dan bagi suatu pemerintah, penting sekali bahwa tindakan-tindakan pegawainya di tentukan tidak hanya oleh perspektif ideologi mereka, tetapi juga oleh perspektif ideologi

partai-partai dimana mereka menjadi anggotanya (Lance Castles, 1965:04).

Akhirnya, kegiatan ideologi pemerintah sering merupakan usaha menanggulangi sinisme, rasa malu, dan rasa putus asa. Karena menyadari adanya rasa kekecewaan dan pesimisme di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat politik pada umumnya berbagai waktu, kabinet berturut-turut mengadakan kegiatan-kegiatan simbolis dan ideologis yang bertujuan untuk membangun kembali harapan, semangat serta momentum perjuangan.

Reaksi ini berakar dalam perspektif tradisional, dan mencerminkan kepercayaan akan manfaatnya, memberi dorongan semacam itu, serta keyakinan bahwa setiap tugas dapat di selesaikan asal di hadapi dengan sikap mental yang tepat (dan seluruh pikiran terpadu padanya). Hal ini mungkin juga mencerminkan pemikiran tradisional bahwa raja adalah lambang pranata jagad raya dan mungkin juga mencerminkan pemikiran non-tradisional bahwa negara harus merupakan perintis kemajuan (Herbert Feith, 1965:10).

2. Aliran dalam Pemikiran Politik

Bahwa dalam lima aliran dalam pemikiran politik ini di bagi tiga cara pembagian, yaitu berdasarkan jangka waktu, aliran pemikiran serta pertentangan-pertentangan tertentu. Argumentasi bahwa jangka waktu dua puluh tahun harus di bagi dalam tiga periode yaitu revolusi bersenjata Agustus 1945- Desember 1949, masa "*liberal*" yang berlangsung hingga 1958-1959, serta masa

demokrasi dipimpin yaitu sampai kudeta dan kontra kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965, rasanya tak akan di tentang; beginilah umumnya pembagian masa yang diadakan oleh orang Indonesia. Akan tetapi, mungkin pertentangan keras akan timbul terhadap anggapan kami mengenai adanya lima aliran dalam Pemikiran politik: Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokrat dan Komunisme.

Pada akhir masa penjajahan serta permulaan masa kemerdekaan, orang Indonesia umumnya berpendapat bahwa ada tiga aliran politik. Pada tahun 1926. Soekarno menulis tentang Nasionalisme Islam dan Marxisme sebagai tiga rumpun ideologi utama yang menangani seluruh organisasi politik Indonesia. Berbagai macam pemerintahan mengenai partai-partai serta perwakilan rakyat terbitan Departemen Penerangan antara tahun 1950-1955 mengadakan tiga pembagian yang agak berbeda, dengan menganggap seluruh partai termasuk kelompok Marxis, kelompok Nasionalis ataupun kelompok Islam. Partai-partai Marxis dalam kategorisasi ini mencakup Partai Komunis Indonesia (PKI) yang Ortodok dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang mewakili tradisi sosial sosialisme demokratis, serta Partai Murba yang mulanya terbentuk sekitar Tan Malaka seorang tokoh nasionalis radikal, pengikut Marxis yang eklektik nasionalis mencakup PNI yang nasionalis radikal, Partai Indonesia Raya (PIR) yang lebih bersifat ningrat, serta sederetan

partai kecil yang berorientasi pada salah satu dari kedua partai ini.

Di bawah Demokrasi Terpimpin, klasifikasi tiga golongan ini diberi status resmi dalam bentuk baru. Koalisi partai-partai pro pemerintah di sebut NASAKOM, singkatan dari Nasionalis, Agama dan Komunis. Tetapi penafsiran tidak resmi dari singkatan ini mengimplikasikan bahwa masih ada pengelompokan keempat, yaitu partai-partai terlarang yang mencakup Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) penentang ide Demokrasi Terpimpin.

Kenyataan bahwa empat partai yang secara ideologis jelas-jelas menonjol sebagai partai terpenting sewaktu Pemilihan Umum 1955, dengan menerima jauh lebih banyak suara dari partai-partai peserta lain maupun, telah mengakibatkan banyak orang membayangkan arena ideologi Indonesia sebagai terbagi empat. Kami sendiri terkesan betapa pentingnya pembagian demikian tetapi kaitan antara partai-partai penting dengan aliran-aliran khusus pemikiran politik tidaklah lengkap.

Salah satu di antara kedua partai ini, yang jelas PNI, dipengaruhi oleh lebih dari satu aliran demikian. Yang lain, yaitu Nahdatul Ulama tidak memperkembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan politik moderen, dengan akibat bahwa pemimpin-pemimpin partai ini cenderung meminjam konsep-konsep Masyumi, sekalipun gaya hidup pemimpin-pemimpin kedua partai ini saling berbeda dan kegiatan politik mereka seringkali menunjukkan permusuhan sangat tajam. Akhirnya,

terdapat dua aliran pemikiran yang penting, yaitu tradisionalisme Jawa dan Sosialisme Demokrasi, yang tidak secara khas terpancang dalam salah satu dari keempat partai utama tersebut, sekalipun masing-masing berpengaruh sekedarnya di dalam beberapa partai tersebut.

Jadi untuk keperluan tujuan, disini pemikiran politik membedakan lima aliran pemikiran yang berhubungan dengan sesama aliran, serta dengan keempat partai besar tersebut, digambarkan secara grafis. Aliran-aliran pemikiran politik dalam kaitannya dengan ketegangan antara warisan-warisan tradisional khusus serta kaitannya dengan dunia moderen terutama dunia Barat dan ide-idenya.

Pada hal ini memberikan tekanan pada sifat ganda warisan-warisan tradisional Indonesia, fakta bahwa tradisi Jawa yang lebih tua serta terjalin erat dengan tradisi Hindu dan Buddha terpisah jelas dari Islam (sekalipun hampir seluruh orang-orang Jawa ini secara nominal penganut agama Islam dan sekelompok minoritas di antaranya menganut nya secara lebih mendalam selama empat abad). Pengaruh yang paling penting adalah Marxisme, yang sangat kuat baik dalam bentuk Leninisme maupun bentuk Demokrasi sosialnya.

Unsur yang paling kontroversial dalam klasifikasi kita mungkin adalah gambaran tentang tradisional Jawa sebagai aliran pemikiran tersendiri. Tidak ada tokoh luar biasa yang muncul seperti semacam soekarno, Sjahrir atau adiknya tradisionalisme Jawa dan cita-citanya tidak pernah dikemukakan

secara sistematis. Tetapi ide-idenya jelas ada dan pengaruhnya selama periode pembicaraan kita memang besar. Memang benar bahwa tidak ada satu organisasi masa pun yang muncul untuk mendukung ide-ide ini.

Organisasi yang paling dekat mencerminkan ide-ide ini PIR (Partai Indonesia Raya), dalam pemilihan umum 1955 malah lebih gagal dari pada PSI dengan Sosialisme Demokratisnya,. Tetapi sebagaimana pemikiran sosialisme demokratis mempengaruhi banyak anggota golongan nasionalis, Islam, Kristen, perwira-perwira Angkatan Darat, serta cendekiawan yang tidak terikat pada partai politik, demikian pula tradisionalisme Jawa sangat merasuk PNI, NU dan barangkali paling kuat merasuki golongan ABRI, polisi dan golongan pamong praja.

Akhirnya kita sampai pada Nasionalisme Radikal, yang terutama diwakili secara organisatoris dalam PNI. PNI menempati bagian terbesar dari wilayah tengah arena politik Indonesia yang terbagi dalam tradisionalisme Jawa, dengan Komunisme dan dengan sosialisme demokratis. Konsep Nasionalisme sebagai faktor persatuan yang dijunjung tinggi, yang dapat mempersatukan rakyat, telah dimiliki oleh kaum Nasionalisme Radikal semenjak tulisan Soekarno pada tahun 1926 mengenai "Nasionalisme, Islam dan Marxisme". Seorang penyanjung kemudian, pada tahun 1963 menyatakan bahwa orang Indonesia manapun apakah dari golongan Protestan, Katolik, Islam, Sosialis ataupun Komunis dapat menyatakan,

55

"*Andai kata partai saya tidak ada, bagian terbesar anggotanya akan menjadi anggota partai Saudara (PNI)*".

Klasifikasi lima golongan ini komunisme, Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam dan Sosialisme Demokratis agaknya mendobrak kesemrawutan pandangan ideologi dari periode ini, sehingga menjadi kelompok-kelompok pemikiran yang lebih berarti dan harmonis. Dan pendobrakan ini sedikit banyak memberikan gambaran yang agak sesuai dengan pengamatan sejarah mengenai siapa yang merasa dirinya dekat dengan tokoh mana dalam politik Indonesia.

Disamping itu, mungkin ada gunanya menggambarkan konflik antara golongan kiri dan golongan kanan dengan menggunakan istilah ini di sini semata-mata dengan menunjukkan pada kriteria simpatik dan antipati terhadap Komunisme, sejajar dengan ketegangan-ketegangan yang terdapat antara kelompok berhaluan moderen dan yang berhaluan tradisional dalam kedua tradisional utama ini. Tetapi perlu di catat bahwa keselarasan yang terdapat antara Islam dan anti komunisme di pihak lain, sekalipun merupakan fakta nyata dalam politik Indonesia periode pembicaraan kita, tidak pernah sempurna pun ia tidak secara *inherent* diperlakukan sebagaimana yang digambarkan oleh para tokoh.

Lagi pula, sekalipun melukiskan hubungan antara kelima aliran pemikiran politik serta keempat partai politik utama sebagaimana muncul dalam Pemilihan Umum tahun 1955, ia tidak mencantumkan kekuatan-kekuatan politik penting lainnya

termasuk Presiden Soekarno, Angkatan Darat, Pamong Praja, serta partai politik yang kecil-kecil. Kekurangan ini sedikit banyak dapat diatasi dengan risiko terlalu mengacaukan bagian tersebut.

Mungkin Presiden Soekarno dapat ditempatkan pada pusat lingkaran sosial demokrat dan Partai Indonesia Raya (PIR) sebagai segi empat kecil di tengah-tengah lingkaran tradisional Jawa melalui lingkaran nasionalis radikal sampai ke lingkaran sosial demokrat bahkan beberapa di antara kelompok etnis dan kelompok daerah utama dapat ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda. Tetapi kelihatannya untuk Partai Murba yang "Komunis nasional" tidak dapat ditemukan cara penempatan yang jelas, demikian pula partai-partai Kristen ataupun tokoh-tokoh yang penting seperti Hatta dan Nasution.

Setiap generalisasi yang dapat dirumuskan mengenai ciri-ciri pemikiran politik yang dikumpulkan sifatnya dan dapat dipertanyakan kebenarannya. Tetapi berusaha mengemukakan tiga macam generalisasi. Ditinjau dari perspektif, pemikiran politik dalam periode yang sedang kita bahas bersifat moralis, bercirikan kecenderungan untuk melihat masyarakat sebagai tidak berbeda-beda dan pemikiran ini bersifat optimis.

Dengan mengatakan bahwa ia bersifat moralis, bermaksud menunjuk pada fakta bahwa kebanyakan pemikir politik cenderung berpendapat bahwa tiada aspek politik yang termasuk daerah yang netral dilihat dari segi moralitas. Politik yang termasuk daerah yang netral dilihat dari segi moralitas. Politik

jarang dianggap sebagai suatu bidang dimana banyak terdapat paradoks dan ironi. Dan dia jarang dilukiskan sebagai sesuatu yang mirip dengan mesin yang bercirikan proses-proses, dengan individu-individu yang sedikit banyak di batasi untuk melakukan peranan-peranan tertentu. Pun tidak dianggap sebagai terdiri dari lembaga-lembaga khusus yang dapat dipersoalkan apakah berfungsi atau tidak. Orang cenderung menyoroiti kekuatan dan kelemahan moral dari pelaku-pelaku utama, apakah mereka beritikad baik atautakah haus akan kekuasaan, pemberani atau pengecut kah, bijaksana atau bodohlah, bersifat patriot atau memikirkan kepentingan diri sendiri belaka.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pemikiran-pemikiran normatif demikian mendominasi politik periode ini, sehingga pemikiran-pemikiran yang mempertimbangkan manfaat umumnya diabaikan. Pemikiran mengenai apa yang seharusnya dilakukan memenuhi perhatian orang hampir sebagai satu-satunya pemikiran, jarang ada pemikiran politik yang mempertanyakan bagaimana, untuk mencari cara-cara efektif guna mengatasi tugas-tugas tertentu dan ini bukanlah karena telah mendefinisikan pemikiran tentang cara mencapai sesuatu.

Kedua, pemikir-pemikir politik Indonesia cenderung untuk melihat masyarakat mereka sebagai terbagi dalam berbagai golongan yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Satu pembagian sangat disoroiti, yaitu pembagian yang bersifat saling mengisi antara "Para pemimpin" dengan "Rakyat". Banyak sekali di perbincangkan mengenai kualitas yang seharusnya dimiliki

oleh para pemimpin, tanggung jawab mereka yang berat harus dekat kepada rakyat dan sekaligus mengangkat serta membebaskan mereka dari lembah kebodohan dan peluang yang harus mereka miliki untuk mentransformasikan lingkungan kerja mereka.

Tetapi hubungan-hubungan konflik sedikit sekali mendapat perhatian. Sekedar perhatian diberikan kepada konflik antara partai dan kelompok-kelompok ideologis dan kepada konflik antara partai dan kelompok-kelompok ideologis dan kepala konflik antar generasi, tetapi sedikit sekali kepada konflik antar golongan etnis dan boleh dikatakan sama sekali kepada konflik antar golongan etnis dan boleh dikatakan sama sekali tidak kepada pertentangan kelas, kecuali di kalangan kaum komunis (Burhanuddin Harahap, 1955: 21).

Ketiga pemikiran politik Indonesia umumnya bersifat optimis. Beberapa orang Islam dan beberapa orang Kristen menyatakan bahwa mungkin sekali manusia sendirilah yang akan merusak rencana-rencananya yang paling muluk, tetapi ini merupakan pendapat minoritas. Dan boleh dikatakan tidak ada pemikiran yang mirip dengan konstitusionalisme Barat yang mementingkan peradaban, sikap moderat (*measure*) serta pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*). Lagi pula ada kesana bahwa kebanyakan pemikiran ini merasa sangat yakin akan masa depan negara mereka, jauh lebih yakin daripada orang Barat yang mengamati keadaan Indonesia waktu itu. Dan memang benar bahwa hanya beberapa orang di antara mereka

59

yang memikirkan masalah-masalah yang mencekam seperti soal penduduk kemiskinan petani di pulau Jawa, jurang yang semakin mengantarkan antara bangsa kaya dan bangsa miskin di dunia, serta ancaman bahaya nuklir.

Suatu bentuk tertentu dari optimisme adalah *voluntarisme* atau anggapan bahwa segala sesuatu akan tercapai asal di hadapi dengan pikiran yang jernih, itikad baik, penuh keyakinan, serta dengan solidaritas persaudaraan. Anggapan ini sering dituangkan ke dalam asumsi atau keyakinan bahwa masalah-masalah Indonesia akan terpecahkan dengan mudah, andai kata semangat masa silam, biasanya yang dimaksud semangat "45, dapat dibangkitkan kembali (Herbert Feith, 1965:14).

Bentuk kedua kelihatannya seolah-olah berlawanan dengan itu, namun sama-sama ditemukan dalam diri orang-orang yang sama adalah *progresivisme*, dimana tahap sejarah masa bersangkutan di anggap sebagai menanjak dengan cara yang telah ditentukan lebih dahulu. Ini juga sangat umum dan memang banyak yang mengungkapkan rasa sangat tidak puas dengan keadaan yang menjadi pokok pembicaraan mereka, tetap terlihat tahap sejarah masa tersebut sebagai ungkapan dari suatu rangkaian perkembangan dari tahap rendah menuju tahap lebih tinggi, dari masyarakat tua yang statis dan berkarat menjadi masyarakat baru yang dinamis. Kepercayaan dan keyakinan terhadap pendidikan dan terhadap kaum pemuda terdapat baik pada golongan *Voluntaris* maupun golongan *Progresivis* (Lance Castles, 1965:21).

Salah satu cara untuk memahami segi-segi yang kelihatannya bersifat khas ini, adalah dengan memandangnya sebagai unsur-unsur dari cara pemikiran tradisional Indonesia, yaitu unsur-unsur yang telah demikian kuat berakar, sehingga menentukan pilihan mereka antara ideologi-ideologi moderen, bertahan terhadap kemenangan dari ideologi-ideologi itu dan kemudian terserap ke dalamnya. Bentuk lain lagi meluaskan pandangannya sehingga menganggap perumusan-perumusan tertentu sebagai khas, tidak hanya khas Jawa atau khas Agama Islam, atau khas Indonesia, melainkan khas pemikiran "Timur" pada umumnya.

Tetapi benar juga jika dikatakan bahwa, ketiga aspek ini didapati dalam pemikiran politik dalam masyarakat-masyarakat di dunia non-Barat, termasuk wilayah-wilayah yang jeas-jelas berada di luar dunia pemikiran "Timur". Hal ini menimbulkan kesana bahwa sejumlah perumusan yang mula-mula kelihatan bersifat khas Indonesia atau khas timur, sewajarnya dilihat dalam kaitan-kaitan dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu dan dengan tipe-tipe dan tahap-tahap tertentu dalam transisi sosio-politik, disamping dianggap sebagai endapan dari nilai-nilai serta perspektif tradisional.

Pada akhirnya yang dapat dikatakan hanyalah bahwa orang yang mencari penjelasan mengenai aspek-aspek khas dari pemikiran Indonesia harus senantiasa siap sedia menggunakan kaca mata perhitungan baik bentuk-bentuk pemikiran yang telah lama terwujud, maupun proses-proses pemikiran yang telah

mempengaruhi dan mentransformasikan. Jika sepintas lalu ini keliatan sebagai meremehkan sifat khas pemikiran politik Indonesia, maka kesana itu salah. Karena kreativitas para pemikiran politik Indonesia dewasa ini tampak paling tidak dalam pergumulan mereka dengan perubahan yang penuh kemelut, maupun dalam usaha mereka mempertahankan kesinambungan pemikiran dengan perspektif para pendahulu mereka.

B. Peran Penting Mahasiswa dalam Pemikiran Ibn Khaldun

1. Mahasiswa dalam Pemerintahan dalam Pemikiran Ibn Khaldun

Mahasiswa dikenal sebagai *agen of change* yaitu mahasiswa sebagai perintis, penggerak untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Mahasiswa sebagai *agen of change* adalah mahasiswa sebagai pemuda yang memiliki potensi kepekaan dan kritis yang tinggi terhadap kehidupan sosial. Kematangan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membuat perubahan terhadap masyarakat dari kebodohan dan keterbukaan. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa lebih berfokus pada perubahan sosial, misalnya dengan potensi keilmuan yang dimiliki, mahasiswa banyak melakukan gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat sebagai peningkatan kehidupan kearah yang lebih baik.

Perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh mahasiswa muncul sejak masa penjajahan, pemuda melakukan

gerakan untuk memberontak penjajah agar Indonesia terbebas dari negara-negara penjajah. Ketika masa Reformasi 1998 mahasiswa yang memiliki peran dalam perubahan sistem di Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto yang dipandang otoriter, rakyat tidak memiliki hak untuk berbicara, berubah menjadi sistem demokrasi. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemuda atau mahasiswa sesuai dengan pendapat Alhandi yang mengatakan bahwa pemuda adalah *agen of change*, agen perubahan mahasiswa atau pemuda harus memiliki sifat kritis, peduli dan peka terhadap kerusakan-kerusakan atau ketidakseimbangan dalam segala aspek kehidupan sehingga dapat mewujudkan perubahan tatanan ke arah yang lebih baik, menciptakan keseimbangan aspek kehidupan dari kerusakan.

Mahasiswa berjuang untuk mementingkan suatu nilai serta orientasi keluar dari dirinya, perjuangan untuk membela kepentingan orang lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Mahasiswa yang masuk dalam kelompok tersebut sering disebut aktivis mahasiswa. Sedangkan menurut Abdulgani organisatoris adalah orang yang aktif dalam organisasi untuk mengembangkan organisasinya, sedangkan aktivis adalah selain mengembangkan organisasinya juga memikirkan perubahan pada masyarakat untuk menjadi lebih baik.

Aktivis mahasiswa pergerakan dalam menjalaninya visi, misi dan tujuannya tidak berjalan dengan lancar. Banyak dinamika yang terjadi pada masing-masing organisasi pergerakan sendiri perjalanan perjuangannya banyak hal yang terjadi dalam

organisasi tersebut, selain banyak agenda yang lancar namun banyak juga permasalahan yang muncul di tengah jalan. Permasalahan yang muncul tersebut adalah permasalahan internal dan juga permasalahan eksternal.

Sehubungan dengan kedaulatan rakyat tersebut, menemukan relevansinya. Hal ini mengingatkan tidak ada jaminan jika kedaulatan rakyat dapat seluruhnya terpampang dan diterjemahkan seutuhnya oleh pemerintah. Sejarah memperlihatkan bahwa tidak jarang pemerintahan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat dalam praktiknya justru menjauhi hakikat kedaulatan rakyat tersebut. Oleh karena itu, perlu kekuatan di luar pemerintahan atau pemikiran menjadi penting adanya, terutama untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berjalan tetap berada dalam rel kepentingan rakyat. Dengan kata lain, eksistensi Pemikiran politik terkait erat dengan kepentingan kedaulatan rakyat itu sendiri. Sehingga oposisi sangat berperan penting dalam pemerintahan.

Gerakan mahasiswa harus merupakan suatu aksi masa dengan didahului oleh rapat umum yang dihadiri ribuan mahasiswa, untuk melakukan demonstrasi mahasiswa yang membawakan suara hati nurani rakyat yang didukung oleh seluruh masyarakat dan mahasiswa dalam jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Selain itu gerakan mahasiswa harus dikoordinasikan secara resmi, melalui saluran organisasi mahasiswa ekstra dan intra universitas. Gerakan mahasiswa tidak ditunggangi oleh kepentingan – kepentingan politik dan harus

berdasarkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Kebijakan suatu pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat melahirkan reaksi bagi gerakan mahasiswa yang di pelopor oleh Soe Hok Gie, yaitu dengan melakukan demonstrasi di kota-kota besar dengan perlawanan yang tidak berhenti pada tuntutan ataupun penolakan pada kebijakan pemerintah, tetapi berlanjut pada aksi-aksi turun ke jalan sampai tuntutan-tuntutan terpenuhi meskipun harus berhadapan dengan aparat keamanan.

Secara khas aksi-aksi semacam itu hanya akan menjatuhkan pemerintah apabila tindakan itu dapat mempertajam situasi yang ada sehingga memaksa golongan militer menentang pemerintah. Sehingga mahasiswa dapat diharapkan tetap sebagai kelompok yang relevan secara politik, khususnya jika pertumbuhan politik lambat atau tidak ada. Dengan bekerjasama dengan para buruh atau suatu fraksi militer, mereka dapat melakukan peran penting dalam mendirikan atau menggulingkan pemerintah.

Sebagai kaum intelektual, mahasiswa berpeluang untuk berada pada posisi terdepan dalam proses perubahan masyarakat. Mahasiswa kini dan sampai kapan pun akan diterima masyarakat sebagai kelompok pembaharu kehidupan masyarakat, itulah gerakan mahasiswa dianggap sebagai bagian dari gerakan moral.

Berhasilnya suatu gerakan mahasiswa ditunjukkan oleh tuntutan-tuntutan yang dipenuhi oleh penguasa, diantaranya adalah: 1) Perubahan pada undang-undang dasar dan peraturan

pemerintah menjadi lebih demokratis, 2) Penghapusan peran militer dalam kancah politik menuju profesionalitas militer dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara, 3) Desentralisasi kekuasaan pada daerah-daerah, 4) Penegakan supremasi hukum, 5) Perbaikan pada bidang ekonomi dan 6) Penerapan demokrasi yang rasional dan egaliter melalui pemilu yang demokratis. Gerakan mahasiswa tidak hanya berhasil memancing suasana yang memungkinkan terjadinya perpindahan kekuasaan atau pergantian sebuah rezim, tetapi juga menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik dalam membangun oposisi dalam menggulingkan pemerintahan yang di pimpin oleh Soe Hok Gie.

Dalam konteks itu, hakikat pemikiran politik Ibn Khaldun terletak pada kejernihannya memandang segala sesuatu serta konsistensi sikapnya dalam menyokong kebenaran. Untuk memenuhi hakikat inilah lalu muncul kebutuhan lain; tidak partisan secara politik. Sebagiannya tidak memiliki sikap partisan terhadap kepentingan kelompok. Sikap partisan yang ditolerir dari oposisi adalah pemihakannya pada kebenaran. Dan karena perspektif tentang kebenaran dan keliruan yang hidup di tengah masyarakat itu sangat beragam; sikap partisan diperkenankan, yakni partisan terhadap salah satu perspektif kebenaran dan kekeliruan tadi.

Proses pendewasaan kultural ini secara sederhana bisa digambarkan sebagai proses pembentukan kesiapan masyarakat dan semua elemen sistem politik untuk berbeda, berkompetisi

secara sehat, menjalani sirkulasi kekuasaan secara arif, menjadi pemenang yang baik dan mengakrabi perbedaan bukan sebagai masalah tetapi sebagai rahmat.

Dalam konteks sistem dan kultur itulah Pemikiran politik akan tumbuh. Namun sejarah tidak pernah berjalan secara linier dan seragam dimana-mana. Sulit menemukan sebuah negara yang bisa dengan mudah menjalani pembentukan sistemik dan pendewasaan kultural yang sejalan dengan kebutuhan eksistensi itu.. Di banyak tempat termasuk Indonesia hari-hari ini membangun oposisi ternyata harus merupakan pekerjaan alot yang butuh banyak energi dan kesiapan. Sebab, baik prasyarat sistemik maupun kultural yang diperlukan justru sudah terbatas hampir habis oleh praktik politik yang keliru selama sekian lama. Dalam konteks inilah diskusi rancangan aksi tentang pemikiran politik yang di Indonesia hari-hari ini mesti diletakkan.

2. Politik Indonesia.

Sejarah Indonesia sebagai negara berdaulat pada awalnya telah berjalan di jalur yang tepat menuju pembentukan oposisi secara benar. Segera setelah kemerdekaan, setelah wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat No. X pada November 1945, Indonesia memasuki sistem multipartai. Pada saat yang nyaris bersamaan di mulai pula eksperimen demokrasi liberal.

Sekalipun terinterupsi oleh gegap gempitanya Revolusi Kemerdekaan 1945-1949, sistem multipartai dan eksperimen

demokrasi liberal yang berjalan dari awal kemerdekaan hingga pemilu pertama di Indonesia September 1955, telah menghasilkan perangkat sistemik dan kultural yang penting. Secara sistemik, demokrasi liberal telah mengkondisikan terbangunnya peluang bagi perbedaan, kompetisi, dan sirkulasi kekuasaan. Bahkan, dinamika politik di masa itu yang berjalan secara sangat cepat telah melahirkan sistem politik yang dinamis; tentu saja dengan segenap biaya politiknya seperti terbengkalainya program-program kongkret ekonomi.

Pada saat yang sama, eksperimen multipartai dan demokrasi liberal telah membangun perlahan-lahan sejumlah perangkat kultural yang penting. Penghargaan atas dan kesiapan menjalani perbedaan, kesiapan menjalani kompetisi politik secara sehat, kesiapan untuk menjalani sirkulasi kekuasaan, kesiapan untuk menjadi pemenang yang baik dan menjadi pecundang yang baik, serta kesiapan untuk membangun toleransi lintas kelompok, lintas ideologi, lintas kepentingan adalah beberapa perangkat kultural yang dibangun oleh sistem liberal parlementer dikala itu

Pemilu 1955 pun di tandai oleh kesiapan sistemik dan kultural yang relatif baik. Inilah yang membuat Pemilu 1955 sebagaimana diceritakan oleh *Boyd R. Compton, Herbert Feith*, atau alifian menjadi sebuah pemilihan umum yang elegan. Dengan peserta yang banyak di masing-masing daerah pemilihan umum 1955 berjalan tanpa kerusuhan dan korban jiwa (Herbert Feith, 1965:12).

Di samping itu, tradisi oposisi berkembang secara cukup sehat. Studi-studi tentang masa itu, selalu menggambarkan betapa suasana kehidupan politik ditandai oleh pertentangan-pertentangan tajam antar kelompok, antar ideologi, antar kepentingan, namun dalam suasana saling toleransi antar kelompok ideologi kepentingan itu.

Fakta itulah yang diubah oleh perkembangan politik baru mulai tahun 1957, ketika Soekarno dan Angkatan Darat mulai secara agresif menjalankan strategi anti partai politik dan bersekutu untuk mengakhiri eksperimen Demokrasi parlementer yang berbasiskan partai politik. Masa antara 1957-1959 kemudian di tandai oleh kemunduran eksperimen demokrasi parlementer di Indonesia sekaligus terbukanya pintu bagi terbangunnya sistem baru yang lebih sentralistik dan meminggirkan peran partai politik. Inilah fase yang di sebut oleh Herbert Feith sebagai "*The Decline of constitutional democracy in Indonesia*".

Salah satu yang kemudian terbawa bersamaan dengan itu, adalah berjalannya proses penghancuran perangkat sistemik dan kultural bagi politik. Otoritarianisme mulai dibangun secara sistematis. Dan atas nama "Revolusi yang belum selesai" Soekarno di atas dukungan kekuatan Komunis dan Angkatan Darat mulai menggemakan pemberangusan atas kekuatan kontra revolusi. Pada hakikatnya inilah sebuah proses kematian oposisi yang sangat tegas dan telanjang.

Demokrasi Terpimpin kemudian dapat dicatat sebagai periode politik yang ditandai oleh musim kering kehidupan oposisi. Karakter Demokrasi Terpimpin yang sentralistik, eksklusif dan anti publik telah menyebabkan potensi-potensi oposisi mengalami proses pembinasaaan sistematis bahkan potensi oposisi yang terbangun secara sangat lunak melalui pemanjangan rambut di kalangan muda dan sebagainya.

Tak ada diskontinuitas ketika Angkatan Darat dan kekuatan-kekuatan Orde Baru dibawah pimpinan Jenderal Soeharto mulai berkuasa di akhir tahun 1960-an, mengakhiri kekuasaan Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Yang terjadi hanyalah meminjam istilah Mochtar Lubis musim semi kebebasan yang sangat pendek. Setelah satu musim yang penuh janji ini, Indonesia justru memasuki periode rekonsolidasi otoritarianisme yang diam-diam dan menjebak.

Dengan cepat Orde Baru kembali ke karakter-karakter politik otoritarian yang pernah dikembangkan oleh Soekarno. Dalam kerangka ini, kita dapat mengatakan bahwa sejarah Indonesia merdeka sampai dengan lahirnya Orde Baru adalah cerita tentang dimulainya proses pembentukan sistem dan kultur yang pro oposisi tetapi di akhiri dengan cepat oleh praktik-praktik pemberangusan oposisi. Dalam konteks inilah kita bisa memahami sejarah dua dekade awal kemerdekaan Indonesia sebagai cerita yang menyedihkan tentang oposisi.

3. Orde Baru

Pemberangusan di masa Orde Baru dapat diurutkan dengan baik melalui penelusuran tahap demi tahap Rezimentasi yang dijalankan Orde Baru. Rezimentasi ini pada hakikatnya dapat dipahami dengan membaginya ke dalam lima fase.

Fase pertama adalah fase konsolidasi awal rezim (1967-1974). Dalam fase ini rezim Orde Baru baru saja terbentuk dan sedang menata aliansi di dalam dirinya secara internal. Dalam fase ini, Soeharto belum menjadi siapa-siapa, bahkan pada awalnya kurang di perhitungkan oleh banyak orang. Soeharto masih menjadi bagian dari kekuatan politik militer secara kolektif; belum menjadi kekuatan politik mandiri. Fase Rezimentasi ini ter sokong oleh kemenangan mutlak Golkar memperoleh 62,8% suara dalam pemilu 1971 yang dipenuhi represi, mobilisasi, serta ketiadaan kompetisi terbuka dan sehat.

Fase kedua ini, Soeharto disadarkan bahwa kedudukan politiknya sebagai presiden dan penguasa sebetulnya goyah dan sangat rentan oleh konflik intra elite negara sebagaimana tercermin dari konflik Soemitro Ali Moestopo. Maka Soeharto melakukan seleksi ulang orang-orang di sekelilingnya dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik mandiri.

Jika dalam fase pertama terjadi penyingkiran elite politik gelombang pertama Nasution dan kawan-kawan, maka dalam fase kedua terjadi penyingkiran elit politik gelombang kedua dalam skala lebih besar dan dramatis Soemitro dan kawan-kawan. Sebagaimana diceritakan oleh *David Jenkins* dalam

Soeharto and his generals; Indonesia Military 1975- 1983, (1984), dalam fase ini Soeharto menata kekuasaan Orde Baru untuk mempertinggi soliditas penguasaan militer atas Orde Baru sekaligus mulai membangun dirinya sebagai kekuatan politik mandiri.

Fase ketiga Rezimentasi dirinya (1978-1985). Munas II Golkar itu menyepakati pembesaran kekuasaan Dewan Pembina yang memusat pada Ketua Dewan Pembina (Soeharto). Maka mulai satu ini Soeharto berhasil menjadikan Golkar sebagai instrumen politik yang langsung dikendalikannya. Mulailah kekuasaan personal Soeharto terbentuk dalam rezim Orde Baru. Faksionalisme politik di dalam elite politik mulai sulit terbentuk karena tidak diberi peluang pembentukannya oleh Soeharto. Fase ini bisa disebut sebagai fase personalisasi dan sakralisasi kekuasaan Soeharto. Konfigurasi kekuasaan Orde Baru makin mengerucut ke dalam tangan pengendalian Soeharto; elemen-elemen kekuasaan Orde Baru lain praktis sudah berada di bawah penguasaan Soeharto secara hampir penuh.

Fase keempat rezimentasi Orde Baru terjadi antara 1985-1990. Awal fase ini di tandai oleh diundangkannya paket UU pembangunan politik tentang partai politik, organisasi kemasyarakatan, pemilihan Umum, susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPRD, dan referendum yang melegalisasi format politik yang diinginkan dan dibangun oleh Soeharto. Dalam fase ini format politik Orde Baru yang otonom (dalam arti "Anti partisipasi publik") dan sentralisasi, bisa dikatakan "telah selesai

pembentukannya". Penguasaan Soeharto terhadap seluruh elemen kekuasaan Orde Baru makin menguat, terlebih-lebih setelah mulai terbentuk konglomerasi keluarga Cendana.

Fase kelima (1990-1998) ditandai oleh dipakainya simbol Islam sebagai identitas baru Soeharto dan Orde Baru. "Islamisasi" dalam pengertian sekedar simbolik ini memberikan basis legitimasi moral bagi Orde Baru tanpa mengubah karakter kekuasaannya sama sekali. Banyak penjelasan telah dibuat mengenai pelekatan simbol Islam ke dalam Orde Baru ini. Namun secara umum, penjelasan-penjelasan itu dapat di kelompokkan ke dalam dua paradigma. Paradigma pertama, dengan *Robert Williams Hefner* (1993) sebagai salah seorang tokoh terpentingnya, menggambarkan "Islamisasi" sebagai konsekuensi dari menguatnya masyarakat islam terutama kelas menengah muslim perkotaan *Vis a vis* negara Orde Baru. Paradigma kedua, dengan *R Williams Liddle* (1995) sebagai tokoh terpentingnya, menggambarkan "*Islamisasi*" hanya sekedar sirkulasi orang-orang di sekeliling Soeharto.

Apapun penjelasan, dalam fase ini terjadi perubahan basis dukungan politik bagi Soeharto. Kalangan Islam politik menjadi pilar baru yang penting. Fase ini juga ditandai oleh mulai munculnya tanda-tanda keretakan elite politik lantaran dua sebab. *Pertama*, konsekuensi dari naik daunnya tokoh-tokoh Islam politik dan *kedua*, mulai rapuhnya usia biologis Soeharto yang membuat wacana suksesi kepemimpinan nasional beserta fenomena aliansi dan realisasi elite politik di dalamnya makin

menjadi wacana umum. Sekalipun demikian, faksionalisme politik di tubuh elite tidak dapat menemukan peluang untuk mengemukakan dan memperlihatkan dirinya secara tegas karena tertelan oleh sosok Soeharto yang dengan basis kekuasaan politik dan ekonominya sudah menjadi Haji Mohammad the untouchable Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998 dalam posisi seperti ini.

Kelima fase yang dijalani Orde Baru di atas telah menghasilkan empat karakter operasi kekuasaan Orde Baru yang berpusat pada Soeharto. Pertama, sentralistis kekuasaan dikendalikan secara sentralistis dengan alasan pembangunan ekonomi dan stabilisasi. Kedua otonom, kekuasaan Orde Baru bekerja dengan menghilangkan peluang bagi terbentuk publik serta bagi meluasnya partisipasi publik. Kekuasaan bekerja dengan logikanya sendiri otonom dari kepentingan masyarakat. Ketiga personal, setelah berkuasa selama 11 tahun (1967-1978) Soeharto berhasil mengambil ahli kendali Orde Baru ke bawah tangannya. Kemudian kekuasaan mengalami personalisasi, terlebih-lebih setelah Soeharto melalui putra-putrinya juga semenjak pertengahan 1980-an meluaskan kekuasaannya ke wilayah ekonomi.

Semenjak masa ini kekuasaan Orde Baru telah terbangun sebagai meminjam istilah yang di pakai Liddell dalam *Leadership and culture in Indonesia politics* (1997) kekuasaan personal. Keempat sakral, kekuasaan yang telah mengalami sentralisasi, otonomisasi dan personalisasi, akhirnya tak

terbendung sebagaimana telah banyak terbukti dalam hukum besi sejarah otoritarianisme dimanapun mengalami sakralisasi. Kekuasaan menjadi sakral, tidak bisa tersentuh tidak bisa salah atau disalahkan, steril dari dosa. Kekuasaan yang sakral bahkan telah diposisikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah bukan fenomena kerja manusia biasa.

Keempat karakter model operasi kekuasaan Orde Baru itulah yang kemudian diwariskan Soeharto ketika ia meminjam istilah Dedi "Miing" Gumelar *lengser ke plafon* pada 21 Mei 1998. Dalam konteks keempat karakter kekuasaan itulah oposisi telah "Meninggal dengan tenang". Soeharto menggambarkan "Meninggal dengan tenangnya" oposisi itu dalam otobiografinya. Hanya oposisi loyal yang dibolehkan hidup, tutur Soeharto. Dan itu sama artinya dengan tidak boleh ada oposisi yang bisa hidup di Indonesia.

Sejarah kemudian mencatat bahwa sejarah oposisi dimasa Orde Baru adalah sejarah kelim. Memang ada upaya-upaya membangun oposisi seperti di awal Orde Baru, di seputar Malari 1974, dalam tahun 1978 dan yang paling fenomenal terbentuknya petisi 50 pada tahun 1980 namun tidak pernah terakomodasi secara sistemik. Eksperimen pembangunan kekuatan oposisi selama Orde Baru pada dasarnya tidak pernah surut, namun selalu menghadapi represif negara yang sangat efektif.

4. Indonesia pasca Soeharto

Secara umum, pasca Soeharto Indonesia memang memasuki fase kehidupan politik yang berkembang secara dramatis. Namun tentu saja tidak mungkin membayangkan terjadi pembalikan tiba-tiba dalam berbagai aspek mendasar dalam kehidupan politik setelah Soeharto meninggalkan kursi kepresidenan. Yang terjadi dalam pasca Soeharto sejauh ini adalah beberapa gejala berikut.

Pertama, Redefinisi hak-hak politik. Sejak kuartal kedua 1998, gerakan reformasi makin berkembang dan meluas. Sejak saat itu, berbagai tuntutan politik baru makin berkembang di tengah masyarakat. Jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998 itu membuka kemungkinan bagi terealisasinya berbagai tuntutan itu.

Kedua, ledakan partisipasi. Di tengah suasana redefinisi hak-hak politik rakyat, terjadilah ledakan partisipasi politik. Pada tingkat elite, ledakan partisipasi ditandai oleh terjadinya politisasi, aliansi realiansi, oposisi, protes, dan perlawanan politik. Wujudnya beragam maraknya kelompok oposisi, partai tumbuh bakal jamur di musim hujan, pers mengalami politisasi sekaligus liberalisasi.

Ketiga, Surplus percaya diri pada publik. Tidak ada yang menduga sebelumnya bahwa Soeharto akan berhasil dijatuhkan melalui sebuah gerakan massa. Namun sejarah mencatat bahwa sesuatu yang di luar dugaan itulah yang terjadi.

Keempat, De legitimasi dan krisis kredibilitas kekuasaan. Jatuhnya Soeharto membuka peluang bagi berkembangnya agenda de legitimasi Orde Baru beserta seluruh instrumen dan institusi politik yang diwariskannya. Naiknya Presiden Habibie yang selama 20 tahun menjadi pembantu dekat Soeharto yang memimpin sebuah pemerintahan yang berintikan "Orang-orang lama", membuat gelombang de legitimasi kekuasaan justru makin menguat sepeninggal Soeharto.

Kelima, Menegasnya fragmentasi dan disintegrasi politik. Dibawah Soeharto politik elite dan massa terjadi dalam kerangka politik penyeragaman. Faksionalisme tidak pernah bisa mengemuka tanpa bisa ditahan. Pada saat yang sama disintegrasi politik di antara berbagai kelompok menjadi gejala sangat menonjol dalam tahun 1998.

Ada beberapa konsekuensi dari berbagai bentuk perkembangan politik yang begitu dramatis itu. *Pertama*, berkembang ketidakpastian politik, *kedua*, terjadi Ketidaktertaaan pemerintahan (*ungovernabilty*) mengingat pemerintahan baru harus mengkonsolidasikan dirinya di tengah suasana politik yang sangat berbeda yang memungkinkan gerakan protes sosial dan perlawanan politik melakukan kritik dan hujatan sekeras apapun.

Ketiga, berkembang konflik dan kekerasan politik mengingat suasana kebebasan, ledakan partisipasi politik, dan surplus percaya diri publik terjadi di tengah tiadanya kesiapan hampir semua kalangan untuk berpolitik secara sehat dan

dewasa. *Keempat*, berkembang instabilitas dan de stabilisasi politik. *Kelima*, terjadi pergeseran dari otonomi negara ke otonomi massa.

Dalam konteks itu, yang tersedia lebih banyak sebetulnya sumber-sumber kekhawatiran ketimbang harapan. Adalah belum pasti bahwa Indonesia sedang menuju ke arah transisi demokrasi. Adalah jelas tersedia banyak indikasi bahwa kemungkinan ke arah rekonsolidasi otoritarianisme masih sangat terbuka lebar. Dalam konteks inilah, membangun visi dan aksi oposisi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

5. Membangun politik

Membangun politik adalah tugas sejarah yang tertunda-tunda. Tugas ini terpanggul di pundak hampir semua segmen politik yang saat ini mengalami re politisasi, pers, mahasiswa kampus, akademisi, partai politik, orang perorang dan seterusnya.

Tugas sejarah yang Tertunda-tunda terus itu jelas bukan tugas ringan setidaknya karena beberapa alasan. *Pertama*, dalam 40 tahun terakhir politik Indonesia mengalami peniadaan tradisi oposisi. Memulai sesuatu yang sudah lama tak ada tentu saja akan memancing keliruan dan keagapan. *Kedua*, masih ada kecenderungan pada berbagai kalangan politik untuk lebih senang mengurus titik pecah dan malas membangun titik temu. *Ketiga*, berbagai kalangan di Indonesia partai politik, mahasiswa, misalnya saat ini kelihatannya mengalami

disorientasi, terutama dalam kerangka pilihan antara menghela demokratisasi secara konsisten dan ikut menyokong kembalinya otoritarianisme secara diam-diam tanpa sengaja. *Keempat*, surplus percaya diri masih kecenderungan umum dimana-mana. *Kelima*, banyak kalangan politik yang tampaknya salah duga menyangkut reformasi. Mereka kira reformasi adalah sebuah lomba lari jarak pendek, padahal reformasi adalah sebuah maraton.

BAB III

GAMBARAN UMUM SOE HOK GIE

A. Biografi Soe Hok Gie

Gambar 3.1 Soe Hok Gie



Sumber: Daniel Dhakidae. Jakarta; LP3ES, 2011.

Soe Hok Gie lahir pada tanggal 17 Desember 1942 di daerah Kebon Jeruk Jakarta. Ayahnya bernama *Soe Lie Piet* atau Salam Sutrawan seorang penulis dan ibunya *Ni Hoei An*. Soe Hok Gie mempunyai kegemaran membaca, menulis dan memelihara binatang. Kegiatan menulis dilakukan dengan menulis catatan hariannya dan surat-menyurat dengan teman-temannya. Saudara laki-laki satu-satunya adalah *Soe Hok Djien* atau Arif Budiman yang juga merupakan pelapor gerakan mahasiswa era 70'an (Soe Hok Gie, 1983:32).

Pada umur lima tahun masuk sekolah (rakyat) *Sini Hwa School*, sebuah sekolah yang khusus bagi keturunan Cina dan setelah lulus sekolah dasar memasuki SMP Strada, asuhan para Broeder Katolik dan menghabiskan masa sekolah menengah atas di SMA Kansius Jakarta, sebuah sekolah yang termasuk yang terbaik untuk Putera di Jakarta yang tidak banyak jumlahnya.

Sebagai layaknya seorang remaja, Soe Hok Gie melepaskan sekolah menengah dengan penuh kenangan yang sangat besar. Bagi Soe Hok Gie masa ini adalah masa yang sangat berarti baginya karena itu berbagai perasaan aneh menghantuinya (Soe Hok Gie, 1961:23).

Namun dia tidak tenggelam di dalam romantisme kenangan semacam itu. Dia berusaha melawan dengan mengutip salah satu ayat yang dihafalnya secara samar-samar dari Injil (Kalau dia pernah membacanya) *let the dead be dead*, biarlah yang mati tetap mati. Bulan September 1961 dia mengikuti tes masuk Universitas. Dia ditolak dari fakultas psikologi (mungkin lebih-lebih karena dipilihnya sebagai cadangan) dan diterima di dua fakultas yaitu FKIP (Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan) dan diterima di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Sejarah (Soe Hok Gie, 1957:26).

Ketika dia memasuki Universitas Indonesia, maka universitas tersebut menjadi ajang pertarungan intelektual bagi yang mendukung serta membela Soekarno dan yang menentang Soekarno dan dalam Universitas tersebut bermukim tokoh-tokoh yang kadang-kadang dengan gigih menentang Soekarno seperti Sumitro Djojohadikusumo dan anak buahnya dan sebagai mana galibnya pada Universitas pada tahun-tahun 1960-an menjadi mahasiswa serta merta disusul oleh penerimaan orang ke dalam organisasi mahasiswa yang menurut kosakata politik mahasiswa sering disebut sebagai organisasi ekstra universiter, seperti HMI, GMNI, CGMI.

Soe Hok Gie adalah seorang yang sama sekali tidak berminat memasuki organisasi yang berbau agama apapun dan karena itu dia menjadi anggota Gemos (gerakan mahasiswa sosialis), mungkin suatu tradisi yang di warisi dari pihak ayahnya yang meskipun tidak menganut suatu ideologi jelas dan memilih partai yang jelas mengidentifikasi dirinya dengan kelompok Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sutan Syahrir (Soe Hok Gie, 1965:22).

Mungkin sejak dia belajar di Universitas Indonesia dan suasana yang dialaminya di dalam Universitas tersebutlah menyebabkan Soe Hok Gie secara sangat sadar atau makin lama makin sadar mengambil posisinya sebagai seorang intelektual, cendekiawan kemudian memang hampir semua yang menulis tentang dia tidak melepaskan gelar itu, yaitu gelar cendekiawan, intelektual yang seolah-olah sudah melekat pada dirinya.

Tetapi proses yang membuatnya adalah suatu hal lain lagi. Di atas telah kita kemukakan betapa dahsyat proklamasi Soe Hok Gie terhadap generasi sebelumnya. Tetapi hal itu bukanlah yang pertama kalinya di dalam riwayat hidup Soe Hok Gie atau untuk tepatnya bukan situlah pengalamannya yang pertama dengan kekuasaan, meski Soekarno tentu saja adalah *putestas in persona*, kekuasaan yang menjelma menjadi tubuh dalam darah dan daging pada pribadi Bung Karno.

Semuanya berawal pada umumnya yang masih sangat muda, yaitu pada tanggal 4 Maret 1957. Pada waktu itu Soe Hok Gie masih berumur 14 tahun lebih tiga bulan dan berada di kelas

dua SMP Strada. Peristiwa itu terjadi ketika seorang guru SMP seandainya menurunkan nilai ujian di sekolahnya. Bagi Ilmu bumi yang seharusnya diperoleh nilai 8 diturunkan menjadi 5.

Menurut Soe Hok Gie hal itu tidak mungkin karena dia sadar bahwa dia terhitung sebagai seorang yang nomor tiga paling pandai di dalam kelasnya dan dia yakin bahwa kalau dalam mata pelajaran lain ada orang lain yang lebih pandai daripadanya, maka dalam ilmu bumi dia merasa bahwa dialah yang terpandai. Tetapi ketika dia tahu bahwa gurunya secara sewenang-wenang menurunkan nilai ujiannya maka dia menggoreskan kata-kata dalam catatannya.

Dalam perjalanan hidupnya, dendam yang kelak tercermin di dalam sikap hidup terhadap Otoritas itulah yang setiap kali kembali mencuat dan kadang-kadang membersit keras dalam ketiadaan toleransi terhadap pemakai kekuasaan, terhadap siapapun orangnya, baik kekuasaan dalam skala kecil di lingkungan teman-temannya maupun kekuasaan dalam skala besar di tingkat negara. Baik secara vertikal terhadap yang lebih tinggi posisinya dari padanya sendiri, maupun secara horisontal terhadap teman-teman sebayanya yaitu para pemimpin mahasiswa yang juga secara takabur mempergunakan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam secuil pun kekuasaan yang berada dalam tangannya.

Sebenarnya sikap Soe Hok Gie tentang keterlibatan seorang cendekiawan di dalam kekuasaan tidak terlalu jelas. Atau untuk merumuskannya secara lebih tajam Soe Hok Gie

sebenarnya menolak kekuasaan. Hal ini bisa dilacak dalam beberapa tempat dimana dia sendiri mengatakan bahwa perjuangan moral yang terakhir adalah untuk menghabiskan kekuasaan. Dengan kata lain kekuasaan adalah antipode dari moralitas. Dengan demikian secara prinsipil dia memilih untuk berada di luar lingkaran kekuasaan (Soe Hok Gie, 1963: 27).

Namun ketika menentukan sikap dalam hubungan dengan masalah kedua tidak jelas posisinya. Untuk melacaknya bisa kita susuri perjalanan intelektualnya bisa kita bagi dalam dua jalur yang berbeda. Pertama, yaitu perjalanan intelektualnya di dalam rezim Soekarno. Pengalaman pribadi dan pengalaman politik dalam hubungannya dengan kekuasaan menyebabkan dia mengambil sikap tegas terhadap rezim Soekarno meruntuhkan rezim tersebut. Begitu bertentangan kekuasaan (dalam arti rezim Soekarno) dan moralitas sehingga ketika diberikan kesempatan menjumpai Soekarno *in Persona* untuk pertama kalinya pada tahun 1963 dia sama sekali tidak percaya bahwa orang semacam itu bisa memimpin negara bukan berarti arti kemampuan tetapi legitimasi moral baginya yang dalam kata-katanya di katakan.

Namun kekuasaan tidak dapat dilawan hanya dengan keyakinan moral atau sekurang-kurangnya keyakinan moral tidak pernah menjadi suatu *causa efficiens* untuk meruntuhkan kekuasaan itu sendiri. Karena itu Soe Hok Gie sebenarnya tidak ragu-ragu untuk mengambil jalur kekuasaan juga untuk mewujudkan keinginan anti kekuasaan tersebut. Maka dia memutuskan untuk memecahkan dilemanya tentang kekuasaan

itu dengan benar-benar melibatkan dirinya ke dalam suatu pergerakan bawah tanah yang sampai sekarang tidak banyak diketahui orang.

Namun untuk mengetahui dimana tempat dan peran Soe Hok Gie tidak terelakkan untuk mengambil jalur putar. Asal muasal semuanya tidak terlepas dan merupakan kelanjutan dari persoalan-persoalan politik tahun 1950-an. Ketika kabinet Burhanudin Harahap mengganti Kabinet Ali dan pada tanggal 12 Agustus 1955 mulai pemerintah terjadi "Pembersihan" besar-besaran terhadap tokoh-tokoh dalam Kabinet yang di curigai melakukan tindak korupsi.

Tetapi ketika Burhanudin Harahap menyerahkan kembali mandat pada tanggal 3 maret 1956 maka tuduhan yang sama dilontarkan kaum oposisi terhadap anggota Kabinet Harahap. Suasana jegal menjegal itu di pelopori oleh PNI dan PKI. Politik di ibukota tidak aman. Di susul pula oleh oleh tindakan-tindakan di daerah yang tidak mempedulikan pusat misalnya dengan penyelundupan besar-besaran di Sumatera dan Sulawesi dan hasilnya tidak dilaporkan dan bukan untuk mengisi kas pusat. Lantas semuanya mencapai puncaknya dengan meletusnya pemberontakan *Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia* (PRRI) pada tanggal 15 februari 1958 dengan diumumkan bahwa daerah Indonesia Timur dalam keadaan darurat perang dan dikuasai oleh militer.

Pada bulan September 1961 Soe Hok Gie mengikuti tes masuk universitas. Soe Hok Gie ditolak dari Fakultas Psikologi

karena merupakan pilihan kedua dan diterima dua Fakultas yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jurusan Sejarah. Ketika memasuki bangku kuliah , Universitas Indonesia menjadi ajang pertarungan intelektual antara yang mendukung Soekarno dan kalangan yang kadang menentang Soekarno seperti Sumitro Djoyohadikusumo dan anak buahnya. Seperti pada umumnya mahasiswa pada tahun-tahun 1960-an menjadi mahasiswa serta merta menjadi bagian organisasi mahasiswa yang menurut kosakata politik mahasiswa sering disebut organisasi ekstra universiter, seperti HMI, GNNI, CGMI.

Meskipun demikian Soe Hok Gie tidak tertarik untuk masuk dalam salah satu organisasi mahasiswa yang berbau agama. Soe Hok Gie masuk Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMSos) yang mungkin diwarisi dari pihak ayahnya yang meskipun tidak menganut suatu ideologi yang jelas dan partai yang jelas tetapi mengidentifikasi dirinya dengan Partai Sosialis Indonesia (Soe Hok Gie, 1983:33).

B. Tentang Jejak Seorang Aktivist

Masuknya kaum cendekiawan terlalu banyak di dalam roda pemerintahan telah membuat masyarakat Indonesia kehilangan pemikiran-pemikiran besar. Karena itu dia membela adanya segolongan cendekiawan bebas yang disebutnya sebagai *freelance intelligentsia* yang bebas dari kepentingan dan penanaman kepentingan. Pilihan itu diberikan dengan kesadaran

bahwa politik dan pembangunan politik di Indonesia dipegang sepenuhnya oleh Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya ditunjang sedikit oleh partai politik dan intelektual bebas. Menurut pertimbangannya pembangunan politik hanya bisa digerakkan dari dua sudut yaitu dari pemerintahan (kekuasaan efektif) dan dari luar pemerintahan (kekuasaan control atau pemikiran politik).

Namun kalau sekiranya membicarakan masalah dilema kekuasaan dalam diri Soe Hok Gie maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, sikapnya terhadap suatu rezim yang sedang berkuasa. Kedua, sikapnya sendiri terhadap cara bagaimana menghadapi rezim tersebut. Yang pertama mungkin semata-mata berhubungan dengan sikap mendukung atau tidak mendukung suatu rezim, sedangkan yang kedua lebih-lebih menyangkut pilihan tentang metode-metode menghadapinya. Kalau dalam hal pertama menyangkut masalah atau pilihan melibatkan diri di dalam atau di luar rezim, maka yang kedua lebih-lebih menyangkut sikap terhadap pemakaian kekuatan untuk melawan kekuatan, memakai kekerasan untuk melawan kekerasan.

Dalam gerakan itu mempunyai suatu markas besar yang sering berpindah-pindah karena itu disebut sebagai MHQ, *Mobile Head Quarter* yang pernah bermarkas di Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong. Suasana politik dan ekonomi mengharuskannya berpindah ke Zurich (Swiss). Karena terkena peraturan Swiss akhirnya berpindah lagi ke London. Bagian

organisasi yang berada di bawah MHQ adalah Biro Operasi (BO) dengan operasi lebih di luar negeri yaitu di Eropa, Amerika, Asia dan Australia. Di samping Biro Operasi (BO), ada yang disebut sebagai *Case Officer*. Salah satu bagian dari aksi yang dilancarkan oleh CO adalah apa yang mereka namakan sebagai penetrasi dan infiltrasi, yaitu penetrasi dan infiltrasi ke dalam tentara, buruh, cendekiawan, pemuda dan mahasiswa (Soe Hok Gie, 1964:30).

Dalam unit organisasi yang disebut CO inilah, tepatnya CO 5, Soe Hok Gie sejak tahun 1961 melibatkan dirinya dalam infiltrasi dan penetrasi di bidang yang lebih sesuai dengan keahliannya yaitu infiltrasi dan penetrasi ke dalam kaum cendekiawan.

Mungkin dalam hubungan itulah dapat melihat bahwa dalam banyak kesempatan ditunjukkan hubungannya dengan beberapa kolonel yang pada gilirannya berhubungan rapat dengan para cendekiawan lainnya yang pada saat itu terkenal membuka kubu di Universitas Indonesia untuk mengawali suatu pergerakan anti Soekarno. Kesadaran ini semakin mendalam dalam diri Soe Hok Gie pada tahun 1964 yaitu bagaimana mengumpulkan kekuatan untuk melawan suatu kekuatan pula.

Semuanya kelak masih berlanjut ketika mereka mendirikan Radio Ampera dengan semua peralatan diberikan oleh pihak tentara. Boleh jadi sikapnya terhadap kekuasaan sudah dirumuskan jelas, tetapi mempergunakan senjata api sangat besar kemungkinan berada di luar bayangannya,

walaupun dalam salah satu kesempatan dia juga pernah membawa pistol caliber FN 9 mm di dalam ranselnya, yang dipinjam dari temannya (Soe Hok Gie, 1966;32).

Soe Hok Gie mengutarakan di Indonesia hanya ada dua pilihan. Menjadi idealis atau apatis, kemudian Soe Hok Gie sudah lama memutuskan bahwa harus menjadi idealis, sampai batas-batas sejauh-jauhnya. Semua persyaratan itu tidak mungkin dipenuhi oleh bangsa yang terbenam dalam kehidupan subsistensinya. Moral ini harus ditingkatkan. Di luar jaminan ini maka moralitas kerja sebagai bangsa berada dalam pasang surut.

Kemudian di tengah-tengah itu pertentangan politik dan agama, kepentingan golongan. Soe Hok Gie tegak berdiri di atas prinsip perikemanusiaan dan keadilan dan secara jujur dan berani menyampaikan kritik-kritik atas dasar prinsip-prinsip itu demi kemajuan bangsa. Karena itu Soe Hok Gie mendukung dan akan meneruskan cita-cita dan ide-idenya.

Bersama sebagian wadah aksi kawasan Gie beristirahat.

1. GMSos

Ketika Ospek Soe Hok Gie mendapatkan sahabat pelajar jurusan sejarah derajat dua bagaikan "*Leirissa*" sendiri yang serius agak serta melalui sukacita itu menggandengnya, *Ong Hok Ham* sendiri yang mahir serta menasihati berhubungan sadar aktivitas aktivis gerakan mahasiswa sosialis (Gmsos) yang usianya cuman atas kelompok (Soe Hok Gie, 1965:88).

Berawal perkenalan sejak “*Zakse*” keadaan Gie terkadang bertukar pikiran urusan hidup kelompok yang bertambah lama beranjak menyedihkan, sampai kini menyangkut Gie berkolaborasi melalui Gmsos yang membangun akibat warga sosialis di kelompok sosialis Indonesia yang hambatan keberadaan akibat penguasa Soekarno mengikuti waktu tertera.

Sehingga Soe Hok Gie memperoleh pengetahuan semenjak Soedjatmoko dengan *Zakse* sebenarnya amak muda serta pelajar sewajarnya bukan berkarakter apatis serta melaksanakan anak muda dan pelajar bukan hanya bingung, sampai kini mengikuti akan datang Gie melahirkan aktivitas Gmsos serta menetapkan berkolaborasi melalui Gerakan Pembaruan (GP) yang tentang bagi Soemitro Djojohadikusumo dari kawasan pemisahan di Eropa.

Terlepas 14 Januari 1963, Gie ulet serta lanjut dengan kelompok Gmsos, Gie dikasih kewajiban akan memegang rangkaian urutan diskusi yang memiliki maksud menegakkan kelakuan pemberani lapisan pemikir-pemikir muda. Mengikuti sebelumnya beliau berniat mendatangkan Sadli, Soedjatmoko, Said dan Wiratno (Soe Hok Gie, 1965:110). Soe Hok Gie mengutarakan hingga keinginanya untuk keluar suatu ajakan untuk menyarankan momentum kekuatan bicara. Tentang ide dari Soedjatmoko, beliau mempersiapkan

menggali ilmu aliansi berdampingan dengan Ong. Tujuannya supaya memperoleh wajah serta perilaku yang baik bagain pertanyaan yang berjumpa sementara itu (Soe Hok Gie, 1965:115).

Sehingga terlepas Pada tanggal 6 Februari ini dilaksanakan diskusi oleh Soedjatmoko di rumah Maruli Silitonga tentang ide dari Gie. Topik yang dibahas kurun waktu itu tentang kelompok cendekiawan yang batal menangkap pertanyaan Soe Hok Gie bergantung supaya urusan tercatat bisa menggerakkan “pemikiran-pemikiran” serta perilaku yang baik di kalangan calon-calon pemikir muda.

Ketika pengikut mobilitas nasional anggota integensi memiliki mempunyai tugas merebut kemerdekaan dengan solidaritas pada rakyat. Pengikut intelegensia yang bertingkah seperti berhenti menutup dharmanya. Namun sesudah kemerdekaan di rebut bahwa kewajiban itu berganti.

- a. Menyatukan Indonesia, membentuk satu persatuan yang kuat. Indonesia begitu berlainan dalam suku, “asal“ dan sebagainya. Disinilah mengetahui bagi suatu Indonesia baru yang bersatu (integrasi).
- b. Membuat pembangunan ekonomi sesegera mungkin supaya *level of living* bisa baik.

2. Gerakan Pembaharuan

Ketika berdiskusi lewat tokoh Partai Sosialis Indonesia yang dilarang oleh penguasa, Soe Hok Gie dikunjungi oleh aktivis gerakan yang dipimpin oleh tokoh mantan pejabat yaitu Sumitro. Akibat semangat menentang pada penguasa saat itu, Sumitro menyingkirkan diri ke luar negeri. Ketika percakapan tercantum, Soe Hok memohon untuk membantu cara yang berupa *underground publication*, *underground catalog confidential*. Ketika dia menjelaskan sebenarnya beliau mampu mengumpulkan ide cendekia muda seperti seorang Soe Hok Gie sehingga dijadikan sebuah kelompok tulisan berkala yang bertujuan untuk membuat opini tentang persoalan bangsa pada kurun waktu tersebut. Sehingga dia menyebutkan sebenarnya hal tersebut merupakan aksi murni, bukan tampak tanggungan kelompok apapun apalagi institusi manapun (Soe Hok Gie, 1965:178). Sehingga dalam percakapan tersebut, Gie terlihat diam saja. Tidak memberikan respon apapun. Dalam bersama Zakse, Gie mendatangi bekas markas besar PSI. Ketika saat berkunjung disana, Gie berteman dengan Henk Tombokan. Gie merasa adanya kecocokan dalam pengetahuan terkait keadaan politik di wilayah ini serta kegagalan PSI untuk memberikan respon yang tepat. Ketika itu, *Henk* baru saja kembali dari Makassar.

Disana Henk terjun dalam aksi pro-Premesta. Penentang kawasan yang pecah di Sumatera serta Sulawesi ketika pada tahun 1956-1958 berakibat serius bagi PSI karena salah satu pengurus PSI yakni Sumitro Djojohadikusumo (Mantan Dekan FE UI serta menjabat sebagai menteri kabinet selama tiga kali sepanjang dekade 1950-an) sudah mewariskan Jakarta untuk mengikuti dengan penentang. Pengikut Sumitro dalam peristiwa ini memicu kehancuran dalam kelompok PSI. Meskipun dengan tegas mereka telah melepaskan Sjahrir partai ini tetap terkena tuduhan terhadap lawan politiknya karena secara langsung mendukung penentang. Sehingga pada akhirnya PSI dinyatakan tidak sah pada bulan Agustus 1960. Bermula berbagai pijakan di luar negeri Sumitro meneruskan propaganda kuat menyerang penguasa Soekarno, menyangkut ancaman terhadap ekspresi Demokrasi Terpimpin, terkhusus pada rencana ekonomi yang terlampaui tinggi.

Henk bertemu dengan Sumitro di Jakarta serta mengunjunginya pada saat mereka berkunjung ke Manado tahun 1957. Henk bercerita sebenarnya Sumitro berhasil membuat jaringan bawah tanah bagi para pendukung di seluruh wilayah Indonesia. Yang sangat dikenal sebagai Gerakan Pembaharuan, yang bekerja untuk melemahkan penguasa Soekarno. Jaringan tersebut diduga terdiri atas

sekumpulan unit bebas yang dipimpin oleh CO (*case officers*) yang melakukan kontak secara teratur dengan Sumitro di luar negeri. Sehingga di yakini sebenarnya CO yang lainnya terdapat di Jakarta, Bandung, Surabaya serta Medan. Sumitro yang berbasis di Kuala Lumpur, Bangkok, Hongkong serta beberapa tempat di Eropa, yang menurutnya merupakan tempat-tempat bekerja sebagai konsultan ekonomi, mengirimkan instruksi kepada pendukungnya di Indonesia melalui apa yang secara misterius dinamakan sebagai MHQ (*Mobile Head Quartes*). Dengan elah menulis dua puluh dua halaman manifesto aksi pada 1961. Selain itu berisi tentang serangan tajam terhadap Soekarno karena kekacauan politik serta ekonomi yang diakibatkan oleh Demokrasi Terpimpin. Berkas tersebut mengandung daftar panjang reformasi pokok, daftar ini dibagi menjadi kebijakan yang mendesak, yang berjangka pendek, serta berjangka panjang, yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kemakmuran.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadi kudeta dari PKI. Tetapi karena tindakan yang tegas dari MayJen Soeharto usaha kudeta tersebut dapat segera digagalkan. Pasca peristiwa tersebut situasi Negara semakin tidak menentu, presiden Soekarno justru mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak populer mengenai menteri dan

kebijakan tersebut semakin menyebabkan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Kondisi ekonomi yang juga ikut semakin memburuk menjadi pemicu instabilitas Negara ini. Perubahan politik terus berlangsung, namun presiden Soekarno tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa siap untuk melakukan kompromi lebih jauh dengan lawan-lawan politiknya atau menerima pengurangan yang signifikan terhadap otoritas dan kekuasaan kepresidenanya.

Mahasiswa angkatan “66” sebagai pelaku kontrol sosial sangat menarik untuk dikaji. Tidak dapat dipungkiri bahwa angkatan “66” mempunyai andil besar dalam melahirkan Orde Baru. Sebelumnya itu tampilnya angkatan “66” dalam menuntut pembubaran PKI dan perombakan terhadap struktur politik yang dikembangkan Orde Lama. Terbukti tekanan-tekanan yang dilakukan mahasiswa memberikan pengaruh yang sangat besar. Arus lalu-lintas dalam bulan-bulan pertama tahun 1966 mengalami kemacetan, bahkan kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti pertemuan para menteri dan pelantikan kabinet baru sempat terhambat oleh masa mahasiswa.

Peran Soe Hok Gie yang tidak hanya berhenti setelah masa peralihan menunjukkan wawasan yang luas dan tidak terbatas pada satu masalah tertentu pasca jatuhnya Soekarno. Soe Hok Gie mampu melihat situasi dengan cermat ketika diawal berdirinya Soeharto mulai menampakan gelagat yang tidak seharusnya terjadi, ketika

terjadinya pembantaian terhadap rakyatnya sendiri tanpa proses pengadilan hanya karena tuduhan terlibat G 30 S-PKI. Hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu ketika kurangnya kontrol terhadap pemerintah, karena kuatnya posisi tentara dalam percaturan politik, hal ini membuat Soe Hok Gie merasa bahwa ada bom waktu yang kelak akan meledak.

Soe Hok Gie juga menyoroti masalah peran, fungsi, dan tugas mahasiswa yang mulai terjadi pergeseran dan terkikis kepentingan pribadi. Masa itu mahasiswa terpecah menjadi dua yaitu yang setuju dengan peran mahasiswa dalam politik praktis maupun yang tidak setuju dalam keterlibatan mahasiswa dalam politik praktis. Peran dan fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol atas kebijakan pemerintah bukan ikut ambil bagian dalam politik yang ditawarkan Orde Baru karena merasa telah menang perang dengan menjatuhkan rezim Orde Lama.

Maka tibalah hari penentuan dan pada tanggal 14 Desember 1969, tiga hari sebelum ulang tahunnya yang ke 27. Soe Hok Gie dengan rombongan pun melepaskan Jakarta menuju Gunung Semeru. Dalam rapat yang diadakan beberapa hari sebelumnya dibentuk suatu team pimpinan yang oleh Soe Hok Gie diberi nama “tim tua” dan Soe Hok Gie termasuk salah seorang dalam pimpinan tersebut (Soe Hok Gie, 1967:49).

Tidak banyak cerita yang diungkapkan tentang perjalanan ini. Tetapi yang pasti adalah bahwa dengan berlalunya hari, semua peristiwa tidak luput dari catatannya sendiri. Mungkin Soe Hok Gie masih menyimpan satu dua lembar catatan hasil goresan tangannya yang kelak akan dimasukkan ke dalam catatan hariannya.

Tetapi catatan itu sirna bersama nasib yang menjemputnya karena dari Gunung Semeru hanya datang berita bahwa, dari saksi mata. Herman O Lantang, bisa dibuat rekonstruksi peristiwa naas itu. Ketika mencapai puncak gunung tersebut tiba-tiba dia melihat Soe Hok Gie seperti dalam keadaan kejang, kemudian berteriak-teriak dan mengamuk lalu lari menuju jurang. Melihat itu, Herman segera bertindak menangkap Soe Hok Gie.

Tetapi sementara Herman berhasil menangkap Soe Hok Gie mau terjun ke jurang. Setelah itu baik Soe Hok Gie maupun dia berteriak-teriak lagi, kejang dan tidak sadarkan diri. Dia mencoba menolong dengan pernapasan buatan. Tapi usahanya sia-sia dan dua-duanya menghembuskan napas terakhir pada tanggal 16 Desember 1969 karena terjebak ke dalam gas beracun di dalam ketinggian 3.442 meter (Soe Hok Gie, 1969:50).

Namun kematian Soe Hok Gie tidak langsung hilang begitu saja banyak karya-karya yang dilakukan oleh Soe Hok Gie pada masa hidupnya demi kemajuan Negara

Indonesia dengan membuat karya antara lain, 1) Soe Hok Gie, sekali lagi, 2) Soe Hok Gie, zaman peralihan, 3) Soe Hok Gie, lentera merah, 4) Soe Hok Gie, orang-orang di persimpangan jalan, dan yang terakhir yang sangat populer yaitu 5) Soe Hok Gie, catatan seorang demonstran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menggambarkan tentang bagaimana pemikiran politik Soe Hok Gie dalam buku Catatan Seorang Demontran, serta membahas mengenai pola pemikiran politik Soe Hok Gie. Skripsi ini menggunakan teori Ibn Khaldun. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif, sesuai dengan objek kajian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*).

Landasan pemikiran dari teori Ibn Khaldun tersebut kemudian diolah peneliti untuk mempermudah menganalisis permasalahan yang akan dijawab yaitu, bagaimana pemikiran politik Soe Hok Gie dalam buku “Catatan Seorang Demontran”.

A. Pemikiran Politik Soe Hok Gie

Soe Hok Gie semakin dewasa semakin berani menentang ketidakadilan dan kesewenangan-wenangan. Soe Hok Gie telah membaca tentang dinamika politik di berbagai sudut belahan dunia, tentang berbagai macam pergolakan sejarah pemikiran yang bermunculan dari jaman ke jaman, dari mulai filsafat klasik Yunani, hingga ide-ide utopis sebuah masyarakat yang ideal seperti *Marx*, *Paine*, *Hobbes*, *Hegel*. Sehingga terbuai dengan begitu banyak kisah sejarah jatuh bangunnya peradaban, tentang pemikiran-pemikiran progressive tokoh-tokoh dunia yang

memerdekakan rakyatnya seperti *Gandhi*, *Martin Luther K Jr*, *Kartini*.

Bacaan yang dikonsumsinya sedikit berlebihan menularkan pemikirannya, ibarat *Saint Joan* karya *Bernard Shaw*, bacaan ini merupakan bacaan tentang urusan kebenaran akhlak. Pandangan Gie tentang tokoh *Saint John* sangat hidup serta memikat dalam keadaan idealisasi dan interpretasinya. Menurut *Shaw*, *Joan* adalah seorang saksi “Protestan” yang pertama, oleh sebab itu *Joan* memperbolehkan bicara bahwa Tuhan telah langsung memberinya tugas tidak lewat gereja, melainkan langsung mengedepankan wahyu. Dialog serta ide-ide dari bacaan tersebut meningkatkan Gie untuk berpikir lebih dalam keadaan memaknai hidup.

Dalam keadaan ini Gie juga mengapresiasi sastra kelas dunia yang menggambarkan romantisme emosi dan pemikiran setiap jaman seperti *Nietzsche*, *Tagore*, *A. Camus*, *G. Orwell*, *Steinbeck*, *Pramoedya*. Posisi Soe Hok Gie pada saat itu jelas menentang Soekarno sebagai politikus, tapi bukan berarti Gie tidak menghormati Soekarno.

Dalam pemikiran-pemikiran politik yang ditulis dalam salah satu catatan hariannya, Soe Hok Gie dengan langsung melontarkan pemikirannya sebagai berikut:

1. Saya kira saya menyukai Soekarno sebagai seorang manusia, tapi sebagai seorang pemimpin tidak, Soe Hok Gie. Dalam pemikirannya tersebut menjelaskan bahwa memang dalam memahami kehidupan seseorang

tidak bisa melihat hanya dari satu sisi kehidupan saja. Tidak bisa melihat sebuah keputusan atau kelemahan manusia sebagai hal yang seolah-olah bisa menjawab, merangkum, serta mewakili seluruh kehidupan seseorang. Jadi apa yang disampaikan Soe Hok Gie pada pemikiran yang ditulis dicatatan harian tersebut. Gie pada jaman itu dan tidak mewakili sosok yang dia kritik secara menyeluruh pada masa-masa itu.

2. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus . Tetapi aku memilih untuk menjadi manusia merdeka, Soe Hok Gie. Sedangkan dalam pemikirannya dalam hal satu ini, Soe Hok Gie menjelaskan bahwa hal ini diwujudkan dalam tindakannya dalam pergaulan menjalin pertemanan tanpa melihat latar belakang etnis dan profesi. Hal ini cukup sulit ditemukan di kehidupan saat ini, ketika masih jamak ditemui kaum muda Tionghoa yang berkumpul dengan sesama etnisnya dan cenderung mengeklusifkan diri.
3. Politik adalah barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor, Soe Hok Gie. Sehingga apa yang Soe Hok Gie lakukan dalam pemikirannya menjelaskan bahwa yang membuat politik itu kotor adalah individu yang bermain politik. Kehausan dan keserakahan akan kekuasaan dan uang itulah yang membuat politik itu kotor.

4. Saya bermimpi tentang sebuah dunia dimana tokoh agama, buruh dan pemuda bangkit dan berkata: stop semua kemunafikan! Stop semua pembunuhan atas nama apapun! Tak ada rasa benci pada siapa pun, agama apapun, dan bangsa apapun. Dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik, Soe Hok Gie. Dalam pemikiran tersebut Soe Hok Gie menjelaskan bahwa Gie berharap pemikirannya ini bisa menjadi sekedar bukti, bahwa pada akhirnya Gie tidak benar-benar sendirian. Bahwa obor yang di bawah selama hidupnya, diestafetkan pada begitu banyak pemuda di generasi-generasi berikutnya.
5. Sebenarnya dijelaskan apa sebenarnya maksud ini. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak memungkinkan tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung, Soe Hok Gie. Dalam pemikiran politiknya yang terakhir Gie menjelaskan bahwa bagi seorang Gie, rasa nasionalisme dan kecintaan pada bangsa itu tidak bisa dipupuk hanya dengan slogan-slogan dan bentuk

propaganda yang dicekoki oleh pemerintah (makanya terjadi banyak pemberontakan pada masa itu). Menurut Soe Hok Gie rasa nasionalisme dan rasa kebersatuan dengan bangsa itu hanya bisa tumbuh jika orang yang bersangkutan terlibat dan menyentuh langsung secara tulus dan melalui proses yang sehat.

Keberanian Soe Hok Gie mengungkapkan fakta dan pemikiran pada masa itu mungkin bagi sebagian orang saat itu dinilai naïf, sembrono, bahkan mungkin tidak sayang nyawa. Tapi bagi seorang Soe Hok Gie, itu adalah panggilan sebagai seorang intelektual. Untuk berani menyatakan kebenaran. Ada seorang teman Soe Hok Gie dari Amerika yang menulis bahwa Soe Hok Gie akan selalu menjadi intelektual yang bebas tapi juga seorang pejuang yang sendirian.

Dengan alasan pemikiran tersebutlah pria kelahiran Jakarta 17 Desember 1942 tersebut tidak mau masuk dunia politik. Disini Gie memahami sebenarnya bukan masalah ekonomi ataupun lingkungan atas dasar pandangan terhadap teman-temannya serta dirinya sendiri. Soe Hok Gie melayani bahwa dorongan yang sangat berperan dalam mempengaruhi daya minat belajar seorang. Gie menganggap dorongan yang dimiliki oleh Tionghoa adalah dalam segi ekonomi.

Dalam berjumpa melalui sentiment melawan Tionghoa hingga penyelidikan tentang daya minat belajar etnis Tionghoa yang Gie lakukan jika diklasifikan menurut Weber, mewujudkan cita-cita diri. Dimana cita-cita diri tersebut menjadi dasar dari

tindakan yang dilakukan. Mengikuti dengan kelompok yang sepakat dengannya tindakan yang dipilihnya. Dimana yang bertujuan untuk menyerukan ide asimilasi yang menurutnya sebagai suatu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh kedaerahan Tionghoa di Indonesia.

Faktor yang mendorong Gie begitu membenci ketidakadilan serta penguasa yang begitu penengkar. Sehingga dapat melacaknya, serta bisa ditelusuri dari keturunan, bacaan apa saja yang dimusnahkan, serta perjalanan aktivisnya. Gie merupakan golongan Tionghoa rakyat biasa, serta hidupnya langsung bersentuhan dengan permasalahan-permasalahan bangsa pada masa itu. Peran orangtua juga mendominasi pemikirannya. Soe Hok Gie juga merupakan keturunan dari jurnalis serta penulis yakni Salam Sustrawan (Soe Lie Piet), maka keturunan darah itulah mungkin memunculkan minat menjadi manusia lantang yang mengedepankan kebaikan.

Dalam seperti peristiwa yang menjadi dorongan Gie sehingga menimbulkan pemahaman kritis, dimana Gie menjauhkan untuk bersikap membisu. Sehingga mengemukakan pendapatnya melalui kritik yang disampaikan pada catatan hariannya serta selebaran yang ditulisnya ketika berada di kelompok yang di ikuti. Perbuatan warga tertindas yang sudah memiliki kesadaran kritis pantasny Gie menuju ke dua arah, yaitu bentuk diri serta mengubah sistem penguasa yang buruk. Oleh sebab itu, dia mempertanggungkan asal mula kelompoknya sendiri yang masih dalam lingkaran pengaruhnya, yakni dengan

melakukan tindakan protes terhadap kekuasaan “Paduka” (Presiden Soekarno), dengan berbagai jalan baik itu dengan jalan hati, sehingga turun ke jalan melakukan aksi maupun jalur politik, melakukan persatuan dengan militer.

Sehingga menyadari bahwa pemikiran Soe Hok Gie jauh melampaui pemikiran remaja seusianya. Didukung oleh sumber bacaan yang sangat berkualitas, banyak dan beragam. Ketika berada pada masa Indonesia yang baru merdeka dan banyak pengetahuan baru pun berhamburan untuk para intelektual mulai tentang marxisme, sosialisme, komunisme, hingga nasionalisme, liberalisme dan kapitalisme.

Kesadaran Soe Hok Gie terhadap dunia dan sekelilingnya mulai terwujud dalam ekspresi politiknya semasa di SMA. Kritik-kritik tajam di alamatkan kepada Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh politik lain yang tertulis dalam catatan hariannya tanggal 10 Desember 1959, pernyataan eksplisit yang pertama dalam catatannya tentang pemahamannya tentang dunia politik. Pengalaman melihat orang kelaparan yang mencari sisa-sisa makanan ditumpukan sampah di dekat rumah di Kebon Jeruk, yang membuat Soe Hok Gie meluncurkan kecaman pedas pada penguasa. Dalam catatan hariannya dituliskan bahwa “Siang tadi bertemu dengan seorang (bukan pengemis) tengah memakan kulit mangga.

Rupannya ia sedang kelaparan. Ini merupakan gejala yang mulai nampak di ibukota. Dan kuberikan uang Rp 2,50 dari uangku dan kuisakan Rp 15,- untuk cadangan. Dua kilometer

dari sini paduka (yang dimaksud Presiden Soekarno) mungkin sedang tertawa dan makan-makan dengan istri-istrinya yang cantik-cantik. Timbul dalam hatiku kebanggaan bahwa generasiku ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacu, yaitu koruptor-koruptor tua seperti Iskak, Djodi, Dadjar, dan Ibnu Sutowo. Yang dijadikan generasi yang memakmuran Indonesia. Yang berkuasa sekarang adalah orang-orang yang dibesarkan zaman Hindia Belanda. Mereka adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang gigih lihatlah Soekarno, Hatta, Syahrir, Ali dan sebagainya. Tetapi kini mereka telah mengkhianati apa yang diperjuangkan. Soekarno telah berkhianat terhadap kemerdekaan. Yamin telah memalsukan (atau masih dalam zaman romantik) sejarah Indonesia. Hatta tak berani menyatakan kebenaran (walaupun kadang-kadang ia menyatakan). Dan rakyat makin lama makin menderita.

Tulisan yang memperlihatkan dengan jelas mengenai sikap kritis oleh seorang anak muda yang mempunyai wawasan yang mendalam atas situasi yang ada. Bagian tulisan yang luar biasa seminggu sebelum ulang tahun Soe Hok Gie yang ketujuh belas dan beberapa bulan sebelum memasuki tahun kedua di SMA. Tulisan yang mengungkapkan tidak hanya antipatinya terhadap para pemimpin bangsa yang telah berjuang merebut kemerdekaan tetapi juga menunjukkan keyakinan yang kuat dan ketugahan moral yang luar biasa, bahwa generasinya adalah yang kelak akan menjadi pemecah segala permasalahan yang dihadapi bangsanya.

Soe Hok Gie mampu mematahkan pandangan stereotip secara umum yang berpandangan bahwa etnis Cina yang ada di Indonesia sebagai kelompok materialistik yang hanya mengejar keuntungan untuk kepentingan pribadinya. Soe Hok Gie telah menunjukkan bahwa latar belakang keturunan tidak berpengaruh pada idealisme dan kesadaran sosial seseorang.

Gambar 4.1 Mahasiswa Demontran



Sumber: Sumber: Daniel Dhakidae. Jakarta; LP3ES, 2011.

Tahun 1966 ketika mahasiswa tumpah ke jalan melakukan aksi Tritura, Gie termasuk di barisan paling depan. Konon, Gie juga salah seorang tokoh kunci terjadinya aliansi mahasiswa ABRI pada 1966. Hari-harinya diisi dengan program demonstrasi, termasuk rapat penting di sana-sini. Soe Hok Gie ingin agar mahasiswa-mahasiswa ini, menyadari bahwa mereka adalah *the happy selected few* yang dapat kuliah dan karena itu mereka harus menyadari dan melibatkan diri dalam perjuangan bangsanya dan kepada rakyat ingin ditunjukkan, bahwa mereka dapat mengharapkan perbaikan-perbaikan dari keadaan dengan menyatukan diri di bawah pimpinan patriot-patriot universitas.

Sampai 1967 Soe Hok Gie dipandang sebagai mahasiswa senior yang menonjol dan populer di Rawamangun. Perannya

dalam peristiwa dalam gerakan mahasiswa awal tahun 1966 telah meningkatkan reputasinya di kalangan mahasiswa. Pemilihan senat mahasiswa yang diselenggarakan September 1967 membuat pencalonannya berjalan dengan mudah untuk menang atas lawannya dari GMKI dan HMI. Posisi ketua senat merupakan jembatan yang bisa dilakukan untuk dekat dengan lingkup yang lebih tinggi dan dapat memperlancar tujuan untuk mengadakan semua kegiatan yang positif di kalangan mahasiswa.

Tahun antara 1967-1969 merupakan masa yang produktif bagi Soe Hok Gie. Pada saat itu Indonesia mengalami masa transisi pada tingkat elit kekuasaan dari era Orde Lama ke era Orde Baru. Pada masa transisional situasi kondusif bagi muncul banyak-banyak pemikiran-pemikiran baru disebabkan belum adanya penguasa yang mengatur secara penuh, belum adanya sentralisasi dan penyeragaman produksi. Sebagai seorang yang mempunyai kesadaran sosial yang tinggi Soe Hok Gie tidak melewatkan masa kondusif tersebut begitu saja. Ketika rekan-rekan mahasiswa larut untuk berebut kekuasaan dalam kancah politik Soe Hok Gie menunjukkan konsistensinya dengan tetap pada jalur idealisme yang dimiliki.

Soe Hok Gie tetap melakukan kritik pada pemerintah ketika terjadi pembantaian besar-besaran terhadap tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung, tidak langsung maupun yang hanya dicurigai terlihat peristiwa Gestapu di Jawa dan Bali. Pembantaian yang dilakukan dengan alasan sebagai reaksi atas

99

kekejaman PKI terhadap para Jendral Angkatan Darat. Pimpinan-pimpinan PKI mulai melakukan maneuver politik guna mencari keselamatan untuk diri sendiri. Sedangkan yang tidak selamat menjadi ajang balas dendam massa. Sebagai contohnya kejadian di Bali dimana sekurang-kurangnya delapan puluh ribu manusia menjadi korban pembantaian yang dilakukan tanpa proses peradilan.

Pada pertengahan tahun 1968 merupakan masa akhir bagi Soe Hok Gie sebagai seorang mahasiswa. Masa dimana Gie mengalami kekecewaan atas kemunduran yang dialami mahasiswa atas peran sebagian dari pimpinan mahasiswa yang memasuki institusi pemerintahan yang ditawarkan Orde Baru. Melalui kritik-kritiknya di media massa segala pemikiran kritisnya tersalurkan dan banyak mendapatkan perhatian. Soe Hok Gie yang tetap pada pendirinya yaitu krisis atas segala perkembangan politik yang terjadi membuat terasing dari teman-teman seperjuangannya dulu.

Sehingga secara cukup jelas kelihatan sikap yang dirumuskan bagi dirinya sendiri, yaitu mendapatkan kekuatan (politik), secara riil menyusun kekuatan (politik) kotor, dengan pertimbangan mengambil keputusan dan menerima resiko-resikonya yang bakal keluar karena keputusan ini.

Dalam rangka pemikiran inilah dalam dirinya timbul rasa muak dengan manusia di dalam lingkaran-lingkaran politiknya yaitu orang-orang senior dari PSI yang dianggapnya "Kaum sosialis salon". Sosialisme mereka adalah slogan-slogan dan *lip*

service saja. "Musuh kami adalah kemiskinan dan kebodohan", menurut Soe Hok Gie adalah slogan yang paling kosong yang pernah mereka dengungkan dan dalam kerangka itu pula Soe Hok Gie yang sangat dekat hubungannya dengan Nugroho Notokusanto yang juga sendiri terkenal sebagai seorang yang sangat dekat hubungannya dengan Kolonel Suwanto menjalin semacam hubungan dengan SSKD yang kelak menjelma menjadi SESKOAD yaitu sekolah yang direncanakan untuk mendidik kaum cendekiawan dalam uniform, yaitu militer yang dianggap memiliki kemampuan manajerial yang kelak bisa ditempatkan di dalam posisi di dalam negara.

Dalam hubungan-hubungan pribadi inilah kelak dapat dijelaskan ketika Soe Hok Gie melibatkan dirinya seluruhnya di dalam kegiatan melawan Soekarno secara habis-habisan dalam demonstrasi mahasiswa untuk meruntuhkan rezim Soekarno pada awal tahun 1966. Dalam hubungan ini pula dapat melihat bahwa benih-benih hubungan dengan militer tetap dipergunakan. Ketika mahasiswa berdemonstrasi melawan Soekarno Soe Hok Gie selalu menghubungkan dirinya dengan para tentara baik untuk meminta pengamanan kepada tentara atau keperluan lainnya.

Jadi dalam peristiwa yang dicatat ini sebenarnya Soe Hok Gie secara sadar memberikan pilihannya untuk berserikat dengan tentara untuk melawan rezim Soekarno dan ini semua dengan kesadaran sebagaimana telah dilakukannya dalam hal ini.

Namun didalam diri manusia seperti Soe Hok Gie perserikatan semacam ini tidak pernah menjadi sesuatu yang

abadi, karena pertimbangan moralitas berada di atas segala-galanya. Karena pertimbangan moralitas berada di atas segala-galanya. Karena itu di dalam riwayat "Perjuangan mahasiswa" Yaitu dengan tentara akhirnya juga pecah. Dalam kehidupan pribadinya juga pecah semacam itu, ketika Soe Hok Gie yang "asli" yaitu seorang yang menempatkan nilai-nilai moral di atas kekuasaan, merasakan bahwa kekuasaan akhirnya memiliki jalannya sendiri yang tidak senantiasa berdamai dengan moral.

Dalam arti ini pula dilema Soe Hok Gie sebagai seorang cendekiawan muncul lagi setelah "kemenangan" demonstrasi Januari - Maret 1966. Semuanya dituliskannya dengan jelas-jelas dalam penilaiannya tentang gerakan mahasiswa pada umumnya dan organisasi mahasiswa khususnya yang semuanya mencerminkan keterlibatan pribadinya di dalam dilema besar antara moral dan politik yang kadang-kadang dilihatnya dengan sangat hitam putih sebagai moral atau politik dan tidak pernah dalam kerangka politik yang bermoral atau keyakinan moral dalam ungkapan berpolitik. Tetapi disini pula apa yang telah disebutkan di atas sebagai pandangannya yang tidak jelas kembali muncul. Penilaiannya juga tidak pernah konsisten dari suatu pernyataan kepada pernyataan yang lain.

Namun dilema tersebut sebenarnya dimaksudkan lebih-lebih bersifat kedalam yaitu dilema peran dia sendiri dan peran mahasiswa secara keseluruhan dan terutama peran yang harus dimainkan oleh organisasi-organisasi mahasiswa. Dia mempersoalkan adanya dua kelompok mahasiswa di dalam

organisasi pergerakan mahasiswa yaitu suatu kelompok yang bergerak atas aspek perjuangan moral yang bergerak atas ukuran benar dan salah. Yang kedua adalah yang bergerak atas perhitungan politik praktis yang bergerak atas pertimbangan tentang yang kuat dan lemah. Didalamnya dia melihat wajah kembar organisasi mahasiswa seperti KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) .yaitu sebagai kekuatan moral dan kekuatan politik yang menurut penilaiannya sebagai pangkal kekuatan KAMI katanya adalah perjuangan untuk merumuskan hakikat mahasiswa itu sendiri yaitu menegaskan dirinya sebagai kekuatan moral atau kekuatan politik. Namun dalam penglihatannya KAMI tidak mampu menjawab hakekat dasar itu (Soe Hok Gie, 1967:34).

Namun dalam kehidupannya sendiri dia berusaha untuk menjawabnya yaitu bahwa pergerakan dan organisasi mahasiswa adalah dan tetap menjadi kekuatan moral dan yang tidak pernah mendasarkan tindakan-tindakannya pada perhitungan politik. Organisasi dan perjuangan mahasiswa adalah seperti perjuangan *cowboy*.

Dia membuat pilihan itu dan ikut mendirikan *Radio Ampera* yang seperti Don Kisah melancarkan siaran-siaran kritik kemana saja. Dari Soekarno, Ibnu Sutowo sampai semua organisasi mahasiswa, KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajaran Indonesia) yang katanya, mabuk kemenangan dan mengecamnya hanya sebagai antek-103

antek dari cabang organisasi politik besar dan hanya berfungsi sebagai pembawa suaranya tuan-tuan, di luar dirinya. Semuanya tidak segan-segan dia kemukakan kepada siapa saja. Ketika dia mendaki Gunung Slamet pada tahun 1967 dan berbicara tentang Jakarta dengan pemuda-pemuda desa dia jelaskan tentang korupsi dalam kalangan mahasiswa (Soe Hok Gie, 1967:35).

Kini kembali kepada analisa Soedjatmoko tentang dilema kaum cendekiawan pasca kemerdekaan. Dilema berikutnya adalah usaha seorang cendekiawan untuk memperluas kaki langit pergaulan kelompok primordial dan berusaha menjembatani nya dengan *kelompok solidaritas* yang lain demi bertumbuhnya lembaga-lembaga intelektual nasional dan *Trans komunal*. Dalam hubungan itulah Soedjatmoko secara singkat namun khusus memberikan acuan kepada kegiatan-kegiatan Soe Hok Gie semasa hidupnya sebagai seorang cendekiawan. Penilaian Soedjatmoko yang khas disini adalah tentang semangat yang memungkinkannya "mengenai batasan-batasan tradisional yang letaknya atas dirinya yang telah dijadikan oleh banyak orang semata-mata karena dia adalah keturunan Cina".

Dalam rintangan atau kendala ini bukanya tidak disadari oleh Soe Hok Gie sendiri. Dari saat ke saat dia seolah-olah mengalami frustasi karena kesadaran itu. Namun ini harus diingat bahwa dia tidak menolak ke Cinaanya. Dia terima kenyataan bahwa manusia siapapun pada dasarnya dilemparkan, dihempaskan tanpa kemampuannya untuk memilih kepada jenis

ras mana dia sebaiknya dihempaskan oleh nasib dan kehidupan ini. Dan ini dibuktikan sekuat-sekuatnya dalam sikapnya sendiri.

Beberapa anggota keluarganya menggantikan nama Cinaanya menjadi nama Indonesia. Sudah dikatakan di atas ayahnya sendiri menggantikan namanya dari *Soe Lie Piet* menjadi salam sastrawan, saudara kandungnya dari *Soe Hok Djin* menjadi Arief budiman, tetapi Soe Hok Gie tetap memilih menjadi Soe Hok Gie. Dia begitu yakin bahwa namanya tidak akan mengurangi sedikitpun rasa ke Indonesianya.

Namun masalah minoritas non-pribumi dan terutama masalah ke Cinaanya bukan suatu yang bisa ditafsirkan begitu saja. Dia sangat sadar akan hal yang disebutnya sebagai "permasalahan yang sudah *out of date* tapi sangat aktual dan misterius". Kesadaran ini muncul terlebih ketika dia berada di tingkat-tingkat pertama di perguruan tinggi. Yang dipersoalkan disana adalah sebuah mitos yang bisa juga kita katakan bersama Soe Hok Gie, "Yang sudah usang tapi sangat aktual" dan terlebih-lebih misterius. Yang dipersoalkan adalah mengapa harus dia bersama seorang kawannya seorang keturunan Cina yang terpandai dalam bahasa Inggris dan mungkin juga dalam semua mata pelajaran. Meskipun dia menolak semua alasan rasialis yang menyebabkan keistimewaan itu. Dia juga menolak determinisme ekonomis seseorang dalam menentukan prestasinya (Soe Hok Gie, 1962:36).

Demikian dia sendiri tidak pernah percaya kepada alasan-alasan rasial untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa sosial. Tetapi

persoalan menjadi sangat aktual yaitu bahwa masalah rasial masih tetap menghantui Indonesia dalam hubungan Pribumi dan Non-pribumi. Setiap kerusuhan sosial dan politik bisa dialihkan dan dibalikkan ke arah kerusuhan rasial artinya antara Pribumi dan Cina. Ini pun dalam arti yang lebih kongkret secara fisik dalam arti pemukulan dan pengrusakan. Semua itu sangat disadarinya.

Karena itu dia berusaha untuk memberikan sumbangannya untuk memecahkan permasalahan yang misterius ini yaitu dengan memasuki dan menjadi anggota LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) suatu organisasi yang di sponsori angkatan bersenjata untuk menggalang kesatuan di kalangan keturunan Cina untuk melawan organisasi Cina lainnya yaitu Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia).

Bisa diduga bahwa Soe Hok Gie sendiri setuju dengan banyak prinsip yang dikemukakan oleh LPKB yang terkenal sebagai paham asimilasi yang sangat dipertentangkan dengan paham *integritas* yang dianut Baperki. Sedangkan di pihak Baperki menganut prinsip yang persis sebaliknya. Pertahankan pluralisme di Indonesia. Sebagai mana ada begitu banyak kelompok etnis di Indonesia, maka anggaplah orang-orang Cina memiliki segi etniknya sendiri. Artinya anggaplah kelompok Cina merupakan satu suku tersendiri sama seperti suku Jawa, Minang dan lain-lain.

Persoalannya bukanlah meninggalkan kecinaan seseorang tetapi dalam kecinaannya berintegritas ke dalam bangsa

Indonesia sehingga ke Indonesiaan adalah suatu mozaik yang terdiri dari berbagai kelompok etnis. Karena itu semua orang Cina yang mengakui Indonesia sebagai negaranya adalah sah sebagai seorang Indonesia. Namun dalam perjalanannya Baperki lebih banyak beranggotakan mereka yang berorientasi kiri (Soe Hok Gie, 1966:38).

Dengan uraian yang sangat singkat ini sebenarnya agak diluar dugaan bahwa Soe Hok Gie memasuki organisasi seperti LPKB yang berusaha untuk menanggalkan kecinaannya. Melihat kekukuhannya sendiri mempertahankan namanya hampir-hampir bisa diduga bahwa dia "Seharusnya" berada di dalam kubu Baperki bersama Yap Thiam Hien. Tetapi sangat boleh jadi permusuhannya dengan golongan Komunis lah yang menyebabkan keputusannya untuk memasuki organisasi tersebut.

Dalam pembicaraan dengan Onghokham, seorang penandatanganan manifesto LPKB, dikemukakan alasan berikut. Manusia seperti Soe Hok Gie adalah seorang "*Eternal Oppositionist*" yang tak tahan dengan *Establishment*. Tentu saja Soe Hok Gie akan berpihak kepada Baperki dalam soal pluralisme kultural karena inilah salah satu segi demokrasi yang ingin di pertahankan nya. Namun di pihak lain Baperki adalah penganut Sosialisme suatu yang tidak bertentangan dengan Soe Hok Gie dan kekiri-kirian.

Namun semuanya menurut Onghokmam bukan karena prinsipnya tetapi lebih karena oportuniste Baperki. Inilah alasan mengapa bila harus memilih antara dua maka Soe Hok Gie akan

memilih LPKB. Di pihak lain LPKB cenderung untuk anti Cina, anti komunalisme, suatu yang juga menarik perhatian Soe Hok Gie. Dan di dalam LPKB lah dia menemukan banyak tokoh yang kelak akan dijumpainya pula di dalam gerakan penggulingan Soekarno (Soe Hok Gie, 1966:38).

Seperti kita lihat dilema ini menghantui Soe Hok Gie dalam banyak kesempatan. Dia mencatat misalnya 12 April 1962 ketika dia berdebat tentang masalah ini. Perdebatan yang katanya sendiri menjurus kepada debat Kusir. Misalnya ada tuduhan bahwa "Orang Tionghoa itu semua materialis, pengkhianat dan sebagainya".

Semuanya menunjukkan betapa sakitnya Soe Hok Gie berjuang untuk membongkar garis batas kelompok solidaritas Cina untuk dihubungkan dengan kelompok solidaritas lain yang juga masih begitu pluralistis. Bagaimana membangun jembatan *Irans-komunal* yang menghubungkan kelompok agama satu dengan yang lain kelompok etnis dan ras di Indonesia dengan yang lainnya. Kesakitan itu semakin bertambah kalau dia ingat akan perjuangannya untuk meluluhkan semua kelompok solidaritas sempit itu dalam kerja-kerjanya selama ini (Soe Hok Gie, 1962:39).

Tetapi di pihak lain ini juga mencerminkan adanya dilema tajam dalam dirinya sejauh menyangkut *asimilasi* dan *integritas*. Seharusnya Soe Hok Gie juga sependapat dengan Bung Karno yang berpendapat tidak ada bedanya antara asimilasi dan integritas. Solidaritas nasional dan kesatuan nasional hanya dapat

diperjuangkan melalui hak yang sama di antara berbagai *suku* dan kelompok peranakan (Leo Suryadinata, 1979:124).

Namun di balik nama yang kelihatannya tidak mengandung perbedaan ini terdapat dua kelompok pesaing besar yang ingin menghabiskan yang lain. Agaknya Soe Hok Gie sendiri tidak mampu mengatasi dilema besar memilih antara keduanya. Karena itu meskipun Soe Hok Gie menyetujui beberapa azas LPKB dan membenci Baperki, tetapi di dalam hati kecilnya dia juga merasa "dihina" oleh pandangan yang sebenarnya konservatif dari kelompok itu, yaitu menghapus kecinaanya. Tetapi kebencian kepada Soekarno dan rezimnya, dan PKI memaksakannya untuk menerima LPKB, betapapun dalam hati kecilnya dia sebenarnya tidak sepenuhnya menyukainya. Inilah juga yang mendorongnya betapa gigihnya dia membela *Yap Thiam Hien*, seorang tokoh Baperki dari sayap lain, ketika Yap ditangkap dalam aksi penggayangan PKI (Leo Suryadinata, 1977:40).

Dalam dilema semacam inilah dia berangkat menuju puncak pertarungan batinnya dan kini benar-benar terjelma di dalam pertarungan fisik ketika dia katakan bahwa pada tanggal 8 Maret 1966 dia "diadili" oleh LPKB. Dan pada hari itu juga dia di pecat dengan alasan "diberhentikan dengan permintaan sendiri dengan ucapan terimakasih atas segala jasa-jasanya". Secara resmi inilah pemberhentian atas permintaan sendiri, tetapi mengingat hal itu sangat menusuk perasaannya cenderung berkata bahwa dia di pecat.

Soe Hok Gie sendiri berpendapat bahwa itulah hari penting baginya, tetapi hari yang "Sungguh muak dan Mendegilkan". Menurut Onghokham pemberhentian itu sebenarnya harus di pahami dari segi psikologi minoritas. LPKB, yang mendapat dukungan Angkatan Darat, tidak menyetujui kegiatan yang terlalu frontal Soe Hok Gie yang menentang Soekarno. Dan pada bulan Maret 1966 adalah saat yang paling tidak pasti dan penuh ke guncangan dalam politik. Kalau harus memilih maka LPKB memilih untuk menghentikan Soe Hok Gie yang terlalu aktif dalam politik (Leo Suryadinata, 1977:40).

Dilema besar dalam menghadapi sikap orang-orang Cina sendiri tentang "kecinannya" tidak dapat di pecahkannya. Dia dipecah LPKB, dia tidak mungkin menjadi anggota Baperki. Dalam suasana itulah dia harus pula menghadapi suatu "kepastian" sikap pribumi terhadap masalah Cina yang tidak peduli dan tak mau pusing mempersoalkan apakah itu artinya asimilasi dan apakah itu integritas dan menganggap dua-duanya sama saja. Suatu kutub Rasis bersebelahan dengan Nasionalisme Bung Karno. Dan itu dialaminya sendiri pada awal tahun 1969 ketika dia akan berurusan dengan imigrasi dalam rangka mengadakan perjalanan ke luar negeri.

Soe Hok Gie keliru dia katakan seluruh prosedur itu hanyalah proses birokratis aparat RI. Itu sebenarnya suatu penolakan dari manusia-manusia anonim, tanpa wajah, tanpa nama terhadap usaha-usahanya sendiri untuk menghapus

ketegaran kelompok solidaritas dan membangun jembatan Trans komunal.

Mungkin karena usaha-usaha yang tidak henti-hentinya untuk menampilkan dirinya sebagai seorang Indonesia, dan penderitaan-penderitaan batin yang juga tidak putus-putusnya dalam hubungan itulah yang memaksa Soedjatmoko untuk tidak bisa berbuat lain dari mengatakan bahwa Soe Hok Gie adalah suatu contoh bagi kemungkinan lahirnya suatu tipe orang Indonesia, yakni orang Indonesia yang betul-betul Indonesia.

Pemikiran-pemikiran semacam ini, katanya hanyalah semacam "teologi politik" dan tidak mampu memberikan pemecahan politik. Mereka sadar bahwa yang dibuatnya semata-mata menafsirkan dunia ini dalam tulisan-tulisannya dan bukan merombaknya, karena itu lebih menjadi *hermeneutika* daripada *politik*.

Karena itu pula keduanya sebenarnya menjadi penghuni dunia mimpi itu yang tidak lagi bersinggungan dengan dunia "nyata". Kematian mereka masing-masing secara simbolik menunjukkan tiadanya garis singgung itu di dalam dunia politik yang mereka geluti bersama. Ahmad Wahib mati ditabrak seorang panunggang sepeda motor yang tidak ketahuan siapa orangnya dan dia ditolong segerombolan gelandangan yang juga tidak diketahui siapa pula orangnya.

Soe Hok Gie mati dalam kedinginan udara puncak gunung. Dia dibantu bukan oleh orang yang tidak dikenal. Seorang sahabat dekat ada disampingnya. Dia dicari dan diselamatkan

oleh Angkatan Udara Republik Indonesia dan ditangisi oleh seluruh kampusnya, disambut dengan histerisnya tangisan gadis-gadis yang dulunya menolak semua uluran tangan Soe Hok Gie sendiri.

Namun kedua-duanya sama-sama bukan menjemput maut tetapi di tarik dan dihempaskan ke dalam ketiadaan dan kesepian, terlebih kesepian karena tidak ada orang yang secara sosial dan politik menerimanya. Dan lebih dramatis lagi bagi Soe Hok Gie, bahkan jenazahnya pun tidak diterima kota kelahirannya Jakarta. Suatu penolakan tandas, sehabis-habisnya.

Dengan bersama sejumlah koleganya, Soe Hok Gie menaiki Gunung Semeru di daerah Lumajang, Jawa Timur. Kebetulan tanggal pendakian bersamaan dengan peringatan hari kelahirannya yang ke-27. Ahli-ahli merayakan dengan sukacita, Gie dan seorang rekan pendakinya, Idhan Lubis meregang nyawa di puncak Mahameru, peristiwa memilukan itu bertemu pada tanggal 16 Desember 1969, hanya berjarak satu hari dengan peringatan hari kelahiran Gie.

Jenazah Gie terus dimakamkan di pemakaman Menteng Pulo, sebelum dipindahkan ke pemakaman Kebon Jahe Kober, Tanah Abang, suatu kompleks peristirahatan terakhir yang sebetulnya diperuntukkan bagi mayat warga negara Belanda. Ketika dibangun pada 1795, kompleks Kebon Jahe Kober awalnya diperuntukkan khusus bagi petinggi serta bangsawan Belanda. Luasnya sekitar 5,5 hektar.

Dimana seluruhnya peristirahatan terakhir yang terus bertambah sehingga angka ribuan memperhatikan Gubernur DKI Jakarta kala itu, oleh Ali Sadikin, memerintahkan dan menjadikannya museum. Sejumlah besar jenazah dikembalikan ke kampung halaman. Disaat itu, penolakan keluarga Gie terhadap upaya pemindahan mayat akhirnya membawa jasad Gie ke crematorium. Hasilnya jurang Mandalawangi di sebuah Gunung Pangrango menjadi tempat abu jasad Gie untuk selamanya.

Namun kematian mereka membangkitkan dalam diri kita satu hal. Di atas sudah dikatakan dua-duanya mewakili salah satu aspek dari generasi pasca kemerdekaan. Dua-duanya sama dalam pesimisme namun pesimisme yang tidak melahirkan sikap pasif tetapi keaktifan dalam memberikan sumbangan bagi suatu perubahan sosial dan politik.

Dalam diri keduanya, terlebih dalam penolak-penolakan terhadap keduanya sebenarnya kita melihat bangkitnya suatu dasawarsa baru dalam kehidupan intelektual di negeri ini yaitu bangkitnya konflik yang semakin lama semakin besar antara dua jenis cendekiawan. Konflik ini tidak dapat dihindari karena merupakan hasil perubahan yang kita canangkan dan kita "rencanakan".

Ketika pabrik pendidikan secara massal mencetak anak didik, ketika perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut cendekiawan jenis lainnya maka tidak terhindarkan konflik antara yang disebut " *humanistic intellectual* ", seperti yang

diwakili Soe Hok Gie dan Ahmad Wahib dengan “ *technical intelligentsia* ” yang secara bermentalitas teknokratis dan teknokratisme dan kaum profesional lainnya. *Humanistic intellectual* tidak pernah disukai karena nafsu-nafsu pembongkaran dan penelanjangan paradigmatis terhadap masalah-masalah sosial dan politik dan ekonomi.

Kecenderungan umum jatuh pada pilihan bagi *technical intelligentsia* yang setiap saat bisa mengajukan jawaban kepada rahasia "teka-teki silang masalah sosial-politik dan ekonomi". Jenis ini tidak mengganggu, tidak punya kecenderungan membongkar dan menelanjangi. Mungkin disini lah terletak kekecewaan dalam diri dua-duanya dengan perubahan yang baru saja berlangsung yang dirumuskan Soe Hok Gie dalam kata-kata "kehancuran cita-cita", "demoralisasi", "kehancuran kepercayaan" dan lain-lain (Soe Hok Gie, 1965:33).

Namun dalam menoleh ke belakang, satu hal pantas pula dipertanyakan disini dalam hubungan ini. Apakah begitu hitam putihnya moralitas dan politik, moralitas dan pengelolaan kehidupan bersama. Ataupun ada jalan tengah di antara keduanya dalam arti ada suatu jenis kebijaksanaan yang mampu menggabungkan keduanya sehingga moralitas bukan sesuatu yang mampu menggabungkan keduanya sehingga moralitas bukan sesuatu yang hanya berada di langit.

Dengan kata lain adakah upaya yang bisa membuat politik tidak sepenuhnya kotor dan pengelolaan kehidupan umum bersama tidak sepenuhnya tenggelam dalam lumpur-lumpur

kedegilan, permainan dalam hidupnya keduanya berupaya mencari pemecahannya dengan melibatkan dirinya sepenuhnya dalam kehidupan sosial. Mereka memperjuangkan suatu iklim yang memungkinkan kaum cendekiawan jenis humanistik masih diberi tempat untuk menciptakan hidup yang lebih manusiawi tetapi mereka ditolak (Soe Hok Gie, 1965:57).

B. Aksi Soe Hok Gie Dalam Meruntuhkan Partai Komunis Indonesia

Soe Hok Gie merupakan sosok yang penuh kontradiksi. Dia gencar mengkritik Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi menjadi orang pertama yang memprotes keras terjadinya pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI tahun 1965-1966. Tidak hanya itu, Soe Hok Gie juga turun ke lapangan dan mengumpulkan data-data mengenai hal tersebut yang kemudian ditulis menjadi dua artikel dengan nama samaran Dewa. Tulisannya sangat tajam, dan karya akan detail di lapangan.

Tentang pembantaian itu Gie pertama kali diturunkan oleh Mahasiswa Indonesia Jawa Barat, pada Minggu II Desember dan Minggu III Desember 1967, dengan judul “Di Sekitar Peristiwa Pembunuhan Besar-Besaran di Pulau Bali.” Menurut pengamatan Gie, Bali sebelum 1965-1966, bukan daerah yang strategi. Kepulauan ini tidak punya kepentingan politik, ekonomi, dan militer yang menentukan perebutan kekuasaan. Tetapi tidak demikian menurut Presiden Soekarno. Bagi Soekarno, Bali

merupakan ibu kota Republik Indonesia (RI) kedua setelah Jakarta. Di Bali, Soekarno suka menghabiskan banyak waktu di Tampak Siring. Selain itu, Bali juga memiliki makna sentimental, karena ibunda Soekarno orang Bali.

Pendukung Soekarno di Bali cukup besar. Gubernur Bali Suteja yang merangkap jabatan Kepala Peperlada adalah anak didik Soekarno. Dikalangan Militer Soekarno juga memiliki banyak pengikut dan orang-orang setia, serta loyal kepadanya. Situasi itu tidak berubah sebulan setelah kudeta. Keadaan mulai memanas setelah kabar mengenai adanya pembantaian massal di Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai ke Bali. Pembantaian dimulai dengan provokasi anggota PNI Dewa Made Wedagama.

Dengan propaganda tersebut, orang-orang PNI yang awalnya mendukung Nasakom mulai berbalik arah mengancam PKI. Saat itu, Soekarno masih menjadi Preside. Namun,, dia sudah tidak punya kekuatan. Semua telah dikendalikan Soeharto. Sejak itu, pasukan-pasukan pertikelir yang terkenal dengan seragam hitamnya, dengan peresenjataan pedang, pisau, pentungan, dan senjata api, mulai melakukan pembakaran-pembakaran rumah PKI sebagai waspada untuk tujuan yang lebih bengis.

Selama tiga bulan, Bali yang indah menjadi neraka penyembelihan-penyembelihan. Menurut Perkiraan yang paling konservatif, pembunuhan-pembunuhan itu telah menean korban jiwa 80 ribu, terdiri dari orang tua, muda, laki, dan perempuan.

Rumah-rumah yang dibakar dan harta benda yang dijarah masih belum dihitung jumlahnya. Begitupun dengan kasus pemerkosaan-pemerkosaan terhadap mereka yang dituduh Gerwani. Ironisnya, perbuatan terkutuk itu dicontohi pemuka partai setempat. Contoh paling monumental adalah yang dilakukan tokoh PNI di Negara Widagda. Pria ini adalah adik dari Wedastra Suyasa, seorang tokoh PNI Bali yang menjadi anggota DPR GR pusat. Belasan wanita dituduh Gerwani telah dijinahinya.

Tiga orang pemerkosaan Widagda kemudian melaporkan apa yang dialaminya ke meja hijau. Widagda lalu diseret ke muka sidang, dan dijatuhi vonis penjara tiga tahun oleh Pengadilan Negeri di Negara. Hukuman yang sangat setimpal. Pembantaian massal di Bali jelas meninggalkan luka mendalam dan kesedihan. Berapa banyak janda yang ditinggal mati para suami mereka dan anak-anak yang jadi yatim, maupun yang ditinggal mati oleh kedua orangtuanya dalam jagal-jagal iyu.

Para pejabat-pejabat setempat tidak melakukan apa-apa dalam peristiwa itu. Bahkan dalam banyak kasus, justru merekalah yang memulai dan memberi contoh kepada rakyat untuk melakukan penyembelihan-penyembelihan sangat keji tersebut. Selain di Bali Soe Hok Gi juga menyorot kasus pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi, Jawa Tengah. Dia bahkan terjun langsung ke lapangan dan melihat sendiri bagaimana amuk massa berlangsung sangat mengerikan saat itu.

Untuk mencegah lebih banyak korban, Gie banyak melakukan tindakan-tindakan advokasi untuk penghentian tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan tersebut. Dia juga banyak melakukan kontak dengan para pejabat militer di daerah dan pusat. Simpati Soe Hok Gie tidak hanya kepada para korban pembantaian massal, tetapi juga terhadap para tahanan 1965 dan stigma yang dilekatkan kepada mereka. Berbagai peristiwa ini rupanya membuat Gie merasa sangat dihantui. Tentang nasib tahanan 65, bukan Gie saja sangat dihantui tetapi anggota-anggota lainnya juga. Yaitu sejumlah akibat dari pembunuhan massal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Bali terdahulu. Jumlah yang dibunuh atas nama Pancasila kurang lebih dari 300 ribu orang.

Sedangkan mereka yang menjadi korban dari peristiwa itu, menurut perkiraannya mencapai angka satu juta orang. Jumlah itu termasuk anak-anak yang tidak tahu apa-apa, tetapi dimusuhi oleh masyarakat, dan akan menjadi pembenci masyarakat. Terlebih setelah Gie membaca surat pembaca Kompas pada 24 April 1969 tentang perlunya surat G30S atau surat tanda bukti tidak terlibat Gestapu untuk anak-anak SD kelas V dan VI. Perlu diketahui, untuk membuat surat itu tidak gratis.

Menurut Gie para siswa SD itu tidak tahu apa-apa tentang G30S dan Komunisme. Bahkan dari 22 juta PKI yang klaim sebagai anggota, hanya beberapa ribu saja yang mengerti Marxisme dan Leninisme, sedangkan sisanya banyak ikut-ikutan saja.

Dengan tegas Gie mengatakan, mereka yang benar-benar terlibat G30S harus ditindak tegas. Tetapi kepada mereka yang hanya ikut-ikutan PKI harus dilakukan penindakan. Selain memperlihatkan keprihatinannya yang besar terhadap anggota dan simpatisan PKI yang menjadi korban penangkapan, penyiksaan, dan pembantaian massa, Gie juga banyak mengkritisi pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Sikap Kritis Gie terhadap pemerintahan Orde Baru yang ikut dibidannya juga bagian dari bentuk kontradiksi pria kelahiran 17 Desember 1942 ini. Menurutnya, Orde Baru telah bertindak di luar batas dengan berusaha mengontrol pemikiran masyarakat.

Sejak 1 Oktober 1965 hingga 6 Desember 1965, semua dokumentasi buku telah musnah dibakar. Termasuk 5.000 judul buku dan beberapa ton koleksi surat kabar Pramoedya Ananta toer yang dia kumpulkan atas jerih payah sendiri selama 15 tahun. Sehingga sampai disini perjuangan Soe Hok Gie untuk mewujudkan cita – cita bangsa yang maju tidak mulus begitu saja banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dilewatkan Gie tersebut, mulai dari penggayangan PKI sampai menjatuhkan Pemerintahan Soekarno pada waktu itu.

C. Analisis Teori Ibn Khaldun Terhadap Pemikiran Politik Soe Hok Gie Dalam Buku Catatan Seorang Demonstan

Menurut Ibn Khaldun, bahkan dari perspektif, banyak memberikan kontribusi dalam wacana pengembangan peradaban dunia, khususnya umat islam. Konsep dan teori yang tertuang

dalam *magnum opusnya*, *Muqaddimah*, telah memberikan inspirasi para intelektual Barat maupun Islam dalam membangun peradaban.

Pemikiran Ibn Khaldun khususnya teori sejarahnya telah merambah ke seluruh struktur masyarakat Semua kalangan; baik rakyat, pemerintahan maupun kaum terpelajar mempunyai semangat yang tinggi untuk mempelajari pemikirannya. Oleh karena itu sejarah merupakan disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dari berbagai generasi. Sejarah mengeksplorasi keterangan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau. Kemudian ia tampil dengan berbagai bentuk ungkapan dan perumpaan.

Peristiwa itu mengajak semua kalangan memahami keadaan makhluk, bagaimana situasi dan kondisi manusia dalam membentuk peradaban. Bagaimana pemerintah memperluas wilayah kekuasaannya, dan bagaimana memakmurkan bumi sehingga terdorong mengadakan perjalanan jauh, hingga ditelan waktu dan menyusuri bumi.

Penulis menyakini bahwa untuk melaksanakan suatu pemikiran politik harus perlu melakukan suatu yang dimana pemikiran politik atau kritikan kepada seluruh rangkaian kebijakan kunci dari rezim yang berkuasa, tetapi tidak menolak sistem itu sendiri, dengan konsep teori dari Ibn Khaldun dalam konsep ini pemikiran politik tidak hanya ingin menggulingkan pemerintah dan mendapatkan kekuasaan, tetapi juga ingin mengganti sistem parlemen dan bahkan dasar Negara. Oleh

karena itu peran model tersebut sangat penting untuk menjamin pelaksanaan sistem demokrasi. Dengan demikian langkah selanjutnya ialah “bekerja sama” antar pihak mahasiswa, masyarakat serta para organisasi-organisasi yang mendukung suatu kebijakan rezim yang dipimpin oleh Soe Hok Gie berhasil di tingkat operasional untuk kelancaran bersama.

Kegagalan politik di Indonesia selama ini disebabkan tidak menjaga hukum keseimbangan dan tidak dikembangkannya budaya pemikiran politik. Padahal sebuah pemikiran politik merupakan kelompok yang dihormati, pemikiran politik tidak akan dibebani skandal korupsi. Peran pemikiran politik sama pentingnya dan sama kuatnya. Oleh karena itu adanya pemikiran politik yang kuat dalam sebuah tatanan parlemen sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Kehadiran pemikiran politik oleh sebuah aktivis di Negara pada masa lampau di tafsirkan sebagai anti persatuan, lebih sacral lagi bahwa kehadiran pemikiran politik bertentangan pada budaya masyarakat setempat. Akan tetapi jika tidak ada maka pemerintah yang berkuasa menjadi bersifat otoriter, tanpa peduli adanya kritik, kontrol dan serta cenderung lebih pro kepada kelompoknya, sehingga dapat ditafsirkan bahwa membungkam perbedaan pendapat, orang baru teringat pentingnya oposisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan masyarakat bukan semata-mata demi kepentingan dan legitimasi keabsahannya tetapi Negara Indonesia justru membutuhkan masyarakat untuk

mendapat filter moral dan etika agar kekuasaan politik dapat berjalan sesuai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Sehingga dalam suatu pemuda yang terdidik tanpa sebuah kelompok yang kuat dengan kumpulan Tionghoa serta malah berkurang adanya ketertarikan terhadap tradisi serta budaya Tiongkok, Gie lebih banyak bergerak untuk mengikuti menjadi barisan pendukung campuran. Dimana sepenuhnya mendapati dirinya mengikuti tanah kelahirannya. Sebenarnya jika melihat lingkungan keluarga Gie bukanlah pedagang meskipun pengusaha, beliau menolak sikap istimewa terhadap kalangan etnis Tionghoa di perguruan tinggi, serta anggapan keinginan terhadap dunia bisnis serta uang walaupun hanya bergelut pada ekonomi memperbanyak orang. Gie menentukan bahwa kelakuan tersebut berperan dalam munculnya kecurigaan serta rasisme yang bertumbuh di masyarakat.

Keterikatan terhadap ide asimilasi sehingga pemikiran politik kelompok etnis Tionghoa di Indonesia secara umum menjadi semakin mendalam pada pertengahan 1962 saat itu menjadi asisten *Mary Somers* (seorang kandidat doktor dari Amerika dalam sebuah bidang ilmu politik yang sedang mengadakan peninjauan tentang politik peranakan Tionghoa) selama dua belas bulan selanjutnya, Gie ditugaskan secara waktu membaca arsip-arsip dari berbagai surat kabar Tionghoa peranakan tahun 1920 sampai 1940-an yang disimpan di Perpustakaan Museum Pusat, khususnya harian *Sin Tit Po*, serta harian *Hong Po*, dan *Kung Yung* dari Jakarta.

Dimana hikmah dalam pekerjaannya sebagai asisten, semakin memperdalamnya tentang proses sejarah yang menunjang kelompok Tionghoa peranakan di Indonesia pada abad kedua puluh serta memperluas pengetahuannya tentang sejumlah tokoh penting dari sebuah kalangan. Pengalaman serta pengetahuan tersebut digunakan sebagai penunjang sebuah aksi asimilasi. Setelah menandatangani piagam asimilasi pada Januari 1961, *Lauw Chuan Tho* serta yang beda mendirikan panitia Penyuluhan Asimilasi serta mulai mencari pengikut yang lebih luas bagi aksi tersebut.

Akibar dari pihak Baperki telah mendapat dukungan dari PKI serta simpati dari penguasa Soekarno, bahwa aksi asimilasi ini kemudian mendekati kelompok-kelompok tertentu dalam angkatan bersenjata serta mendapat dukungan Jenderal Nasution (Menteri Pertahanan serta Kepala Staf Angkatan Darat) serta beberapa anak buahnya. Akibatnya, dibentuklah sebuah badan Urusan Pembinaan Kesatuan Bangsa (UPKB) serta dengan dukungan dari kelompok tentara, yaitu Badan Pembina Potensi Karya (BPPK) yang merupakan badan pengimbang Front Nasional. Pada awal Agustus 1962, Soe Hok Gie menghadiri peresmian UPKB di Jakarta serta disana bertemu *Lauw Chuan Tho* serta beberapa pendukung asimilasi.

Setelah berhasil mendapatkan suatu persetujuan Soekarno terhadap ide-ide mereka pada tahun 1963. Dimana dalam kelompok ini merencanakan untuk mengadakan perundingan asimilasi tanggal 10-12 Maret sebelum mulai kongres Baperki

123

dimulai beberapa hari kemudian. Dalam konferensi tersebut diumumkan pembenahan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB). Gie merupakan salah satu seorang yang terpilih dalam sebuah kepemimpinan pusat kelompok yang diketahui oleh pegawai bagian hukum angkatan laut Sindhunata.

Dalam dua tahun berikutnya, Gie aktif dalam seksi awalan serta penhkajian lembaga. Sehingga sangat membantu pembuatan sejumlah brosur serta pamflet informasi yang berisikan pandangan LPKB tentang asimilasi. Serta juga berusaha menempatkan isu asimilasi Tionghoa dalam sebuah kedudukan yang lebih luas dari perkembangan sejarah Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Soe Hok Gie berpendapat bahwa pada masa pergerakan nasionalis, kemudian pada era perjuangan kemerdekaan, persatuan nasional, telah terancam oleh kelompok yang berusaha mempertahankan kepentingan golongan yang sempit. Selain itu, kebijaksanaan pemerintah Kolonial Belanda telah memperparah perpecahan dalam masyarakat dengan memanfaatkan perbedaan ras, etnis, dan daerah. Hal tersebut merupakan taktik untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkuat identitas etnis dan mendorong prasangka rasial untuk menghancurkan persatuan nasional.

Asimilasi merupakan ide yang pada dasarnya patriotik, yang mana mengambil inspirasi yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh nasional terdahulu layaknya Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. LPKB menganggap

integrasi merupakan usaha untuk mendahulukan kepentingan minoritas di atas kepentingan nasional. Adapun komentar *Daniel Dakhidae* terkait asimilasi yang dipegang oleh kaum keturunan Tionghoa diwakili oleh *Tjung Tin Jan* dan *Lauw Chuan Tho*, yakni menginginkan asimilasi, atau peleburan orang-orang Tionghoa Indonesia sehabis-habisnya ke dalam penduduk pribumi Indonesia. Hal tersebut menyiratkan bahwa etnis Tionghoa peranakan haruslah meleburkan diri seluruhnya ke dalam suku-suku yang ada di Indonesia hingga ke tingkat meninggalkan ke Tionghoannya.

Sehingga pihak Baperki menganut prinsip sebaliknya, yaitu sebuah integrasi. Yang dimana ingin mempertahankan sistem sosial di Indonesia. Banyak etnis di Indonesia, bahwa menganggap etnis Tionghoa memiliki segi etniknya tersendiri atau merupakan suatu suku tersendiri. Akan tetapi permasalahannya tidak meninggalkan etnis seorang, melainkan dalam ke “Tionghoan” tersebut berpisah ke dalam bangsa Indonesia sehingga ke Indonesiaan merupakan yang terdiri dari berbagai etnis.

Dalam perdamaian dengan Onghokham, seorang penandatanganan manifesto LPKB dikemukakan alasannya sebagai berikut. Manusia seperti Gie adalah seorang “eternal oppositionst” yang dimana tahan berhadapan dengan establishment. Tentu saja Gie akan berpihak kepada Baperki dalam soal pluralisme kultural karena dianggap salah satu segi demokrasi yang ingin dipertahankannya namun, dari pihak lain Baperki adalah kelompok establishment yaitu penguasa Soekarno (Soe Hok Gie, 1965:172).

Bahwa penjelasan ini begitu sangat mengejutkan ketika melihat pilihan Gie memasuki kelompok LPKB yang mana berusaha meninggalkan ke Tionghoannya. Akan tetapi dimana Gie tetap mempertahankan namanya yang dimana seharusnya berada dalam kelompok Baperki bernama *Yap Tian Hien*. Baperki merupakan pengikut sosialisme yang tidak bertentangan dengan Gie serta menuduh siapapun. Namun karena kejujuran Baperki, Gie lebih memilih memilih ke LPKB. Dalam perkembangannya terjadi didalam dilema yang begitu berat dalam dirinya menyangkut antara asimilasi serta integritas. Seharusnya dimana Gie juga sependapat dengan Soekarno bahwa tidak ada perbedaan antara asimilasi dengan integrasi. Solidaritas nasional serta kesatuan nasional hanya dapat diperjuangkan melalui hak yang sama di antara berbagai suku serta kelompok peranakan. Akan tetapi kebencian terhadap penguasa Soekarno serta rezimnya terhadap tingkah PKI membuatnya untuk menerima LPKB.

Berdasarkan Weber, dorongan datang serta perilaku terjadi, begitu dengan yang dilakukan Gie. Disini Soe Hok Gie memutuskan untuk mendukung kampanye asimilasi meski dia sendiri tetap mempertahankan namanya yang tegas merupakan nama asli keturunan Tionghoa karena tidak menginginkan adanya pembagian etnis yang cenderung menghakimi bahwa etnis Tionghoa materialis serta hanya bersungguh-sungguh pada urusan ekonomi serta memperbanyak diri saja. Gie merupakan

kelompok manusia yang berbuat etika serta berusaha memerangi kenakalan yang terjadi.

Sehingga dapat dikeluarkan kesimpulan bahwa secara umum status pemikiran serta posisi Gie terkait identitasnya yang sudah melampaui persoalan asimilasi serta integrasi. Bahwa benar apa yang dilakukan Soekarno tentang aspirasi bahwa suatu ketika ras Indonesia hanya didukung oleh suatu wilayah yang bulat serta tidak setuju dengan keadaan rasialisme. Melalui yang lain harus ada peleburan seutuhnya dari semua kalangan etnis agar wilayah Indonesia seutuhnya jadi bangsa.

Sudah membentuk rahasia umum sebenarnya penguasa yang berkuasa tidak dapat dilawan hanya dengan keyakinan etika, atau paling sedikit keyakinan watak tidak pernah menjadi suatu *causa efficiens* untuk menjatuhkan kekuasaan itu sendiri. Sedangkan kelompok aksi yang dilakukan Gie atas dasar inisiatif itu sendiri. Karena secara kasatmata mempengaruhi gambaran politik oleh karena itu, Gie tidak curiga mengambil jalur gerakan untuk mewujudkan keinginan anti kekuasaan tersebut. Mengenai keterlibatan diri Gie ke dalam suatu pergeseran bawah tanah melalui GMSos serta Gerakan Pembaharuan masuk dalam klasifikasi gerakan politik nilai (*values political movement*) melainkan bukan gerakan politik kekuasaan (*power political movement*) pantasny partai politik. Dua gerakan tersebut merupakan gerakan PSI pasca pembubaran terutama dengan komandannya Soemitro Djojohadikusumo.

Sebenarnya tidak ada yang “wah“ dalam aktivis Gie serta sahabatnya di GP. Karena Demokrasi Terpimpin yang mana penguasanya sebagai kaum penindas menghalangi sebuah ungkapan perlawanan politik secara terbuka, kelompok-kelompok oposisi terpaksa melakukan tindakan bawah tanah atau disebut dengan politik persatuan. Ketika peristiwa pada akhir tahun 1965 terungkap, banyak kelompok lain yang mempersiapkan serta menyusun rencana yang tidak diketahui oleh khalayak.

Dengan bentuk menyampaikan Manipol-USDEK, konfrontasi, serta Nasakom, para aktor utama ternyata mulai membuat rencana yang akan mereka lakukan pada saat yang tepat. Ketika saat ketegangan politik di Indonesia menyebarkan kekhawatiran bahwa krisis sudah diambang pintu, sehingga banyak pengamat yang menyadari konfrontasi antara PKI dengan militer akan terjadi. Sementara Gie serta sahabatnya menunggu waktu yang tepat serta tetap diam-diam mendorong orang-orang disekitar mereka agar tidak kehilangan semangat sementara mereka menunggu terbukannya antara untuk menerobos sistem tersebut.

Tindakan rasional dari Soe Hok Gie masuk dalam klasifikasi Rasionalitas Instrumental, dapat dikatakan bahwa tindakan Soe Hok Gie ini mengedepankan alat untuk melengserkan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat. Pada akhirnya Soe Hok Gie turun ke jalan untuk memprotes pemerintahan yang tidak sesuai dengan ideologinya. Yakni

pemerintahan yang sejalan dengan kebutuhan serta harapan rakyat.

Sehingga acuan utama *Weber* yaitu rasionalitas dalam mengidentifikasikan tindakan manusia. Maka semua tahu sebenarnya Gie menolak kekuasaan dalam arti terjun dalam kancah politik serta penguasa. Dengan sendiri mengatakan bahwa perjuangan moral yang terakhir adalah untuk menghabiskan kekuasaan. Dengan kata lain kekuasaan adalah antipati yang dari moralitas. Secara prinsip mereka memilih berada di luar lingkup kekuasaan. Namun ketika menentukan sikap dalam hubungannya dengan masalah kedua, mereka tidak jelas posisinya.

Kesadaran kritis yang dimiliki Gie membuatnya bersiap diri untuk menghadapi konflik yang terjadi pada masa itu. Demokrasi merupakan sarana yang digunakan oleh Gie dengan perhitungan rasionalnya, ketika menempatkan kekuasaan pada konteks bagaimana pola pengelolaan dan pengaturan sebuah pemerintah yang menjaga keadilan serta kesejahteraan rakyatnya. Maka oleh sebab itu, ketika sebuah penguasa dijalankan dengan korupsi, oligarki, manipulasi, otoriter, diktator, sehingga tidak peduli siapa pun yang berkuasa baik itu dari kalangan sipil ataupun kalangan militer, maka akan dikritik oleh Gie. Sebenarnya, mereka mengatakan perlu diruntuhkan dengan jalan apapun termasuk dengan politik serta kekerasan.

Dalam sebuah rezim yang memerintah tersebut maka telah begitu parah, misalnya sang pemimpin asyik senang-senang

dengan para selubung, sedangkan korupsi merajalela dilakukan para pembantunya sementara rakyat menderita kelaparan. Jadi, ketika penguasa Soekarno yang menurutnya sudah tidak layak lagi dipertahankan. Penguasa yang menurutnya tirani, otoriter serta banyak pejabatnya melakukan korupsi. Kemudian, kepribadian Soekarno sendiri kurang beretika dalam urusan cinta serta perempuan, sementara kondisi ekonomi rakyat yang sangat menderita akibat melonjaknya harga BBM ditambah lagi kondisi pertarungan politik begitu memanas terutama antara kubu PKI dan tentara Angkatan Darat.

Diduga sebenarnya kehancuran PKI membuka jalan untuk melakukan perjuangan mahasiswa. Pada hari jumat tertanggal 7 Januari, Gie berkunjung ke senat mahasiswa, saat itu beberapa kelompok mahasiswa terlihat serius membicarakan kenaikan bus yang awalnya hanya Rp. 200 menjadi Rp. 1.000. Sehingga banyak yang menduga sebenarnya politik serta kenaikan harga dari penguasa merupakan usaha sementara para menteri untuk mengalihkan perhatian rakyat dari pengganyangan PKI menjadi isu perut.

Namun untuk mencapai itu semua bukanlah perjalanan yang mudah. Untuk melacak bagaimana posisi Soe Hok Gie dalam pusara pergerakan mahasiswa saat itu tidak dapat dilepaskan dan merupakan kelanjutan dari persoalan-persoalan politik 1950-an. Ketika kabinet Burhanuddin Harahap mengganti kabinet Ali I serta pada tanggal 12 Agustus 1955 mulai penguasa

terjadi “pembersihan“ besar-besaran terhadap aktivis dalam kabinet Ali yang dicurigai melakukan tindakan korupsi.

Akan tetapi, ketika Burhanuddin Harahap menyerahkan kembali mandat pada 3 Maret 1965, maka tuduhan yang sama dilontarkan kaum oposisi terhadap anggota Kabinet Harahap. Sesaat dorong-mendorong itu dipelopori oleh PM sereta PKI mengakibatkan politik ibukota tidak aman. Disusul oleh perencanaan di daerah yang tidak mempedulikan pusat. Tindakan ini misalnya, dengan penyelundupan besar-besaran di Sumatera serta Sulawesi yang hasilnya tidak dilaporkan serta bukan untuk mengisi kas pusat. Lantas semuanya mencapai puncak dengan meletusnya pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) ketika tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera disusul oleh Perjuangan Semesta Alam (Permesta) yang diproklamasikan pada 2 Maret 1958 dengan diumumkan di daerah Indonesia Timur dalam keadaan darurat perang dan dikuasai oleh militer.

Sehingga Gie sangat kecewa dengan kelompok sosialis, karena kelompok sosialis Indonesia yang ditemuinya kebanyakan slogan sok pintar, sok dekat dengan rakyat serta sok paling benar. Disinilah kemudian akhirnya menjalin hubungan dengan Nugroho Notokusanto dimana dekat dengan Kolonel Suwanto serta menjalin hubungan dengan SSKD yang kelas menjadi SESKOAD, ketika sekolah yang direncanakan untuk mendidik kelompok cendekiawan dalam uniform, yaitu militer yang

dianggap memiliki kemampuan manajerial yang kelak bisa ditempatkan di dalam posisi pemimpin negara.

Selanjutnya, tahu sebenarnya bahwa Soekarno gila wanita. Dari pihak lain posisi Gie sendiri sangat menghargai kehormatan serta martabat seorang perempuan. Ini kemudian menjadi pengetahuan bersama bagaimana Gie dalam beberapa catatan hariannya begitu muak dengan perilaku Soekarno terhadap perempuan apalagi berkaitan dengan jabatannya sebagai pemimpin wilayah. Selanjutnya, harus melihat bagaimana aktivitasnya Gie banyak dipengaruhi oleh kalangan sosialis. Ini perlu dicatat sebab para tokoh sosialis serta partai Masyumi pasca pemberontakan PRRI-Permesta. Dari sini pula kalangan sosialis melakukan perlawanan baik, dengan tindakan bawah tanahnya, menjadi gerakan yang melakukan kritik besar-besaran terhadap Soekarno yang dianggap sebagai penguasa menampakkan keotoriterannya.

Secara implikasi, konsep gerakan sosial yang dilakukan Gie bisa dikatakan meliputi lingkup studi politik dengan mengakui aksi politiknya di luar ranah politik dalam kelompok yang terlembagakan. Sederhananya, suatu aksi yang dilakukan merupakan suatu proses untuk mencapai perubahan jangka panjang yang visioner. Sedangkan aksi yang dilakukan oleh Gie merupakan gerakan yang memihak pada tataran nilai watak universal yaitu mendukung kepentingan nilai yang menurutnya berpihak pada rakyat, bukan mendukung kekuatan parpol secara politis. Sehingga sebaliknya, jika parpol ataupun lembaga

maupun organisasi yang di pihaknya sudah tidak lagi memperjuangkan nilai-nilai dengan standar moralitas yang dikehendaki, maka dia tidak segan untuk menjadikan diri sebagai oposisi. Seperti ungkapan yang ditulis dalam catatan hariannya, organisasi dan perjuangan pelajar diibaratkan perjuangan *cowboy*.

Seorang *cowboy* yang datang ke sebuah kota serta horison yang jauh. Dimana kota ini sedang merajalela perampokan, perkosaan, serta ketidakadilan. *Cowboy* ini menantang sang bandit berduel dan ia menang. Setelah banditnya mati, penduduk kota yang ingin berterimakasih mencari *cowboy* Tetapi ia telah pergi ke horison yang jauh. Ia tidak ingin pangkat-pangkat atau sanjungan-sanjungan dan ia akan datang lagi kalau ada bandit-bandit berkuasa (Soe Hok Gie, 1966:34).

Sehingga dalam wujud ini, bentuk-bentuk aksi yang dilakukan oleh Gie mulai dari aktivitas intelektual yang kritis, diskusi dengan berbagai aktor, serta pernyataan protes terhadap pemerintah dengan menulis selebaran kritik serta ide-idenya dalam buletin dari gerakan eksponen merupakan klasifikasi gerakan politik yang bentuknya konservatif. Kemudian berkembang menjadi radikal yang dimulai dari aksi demonstrasi bersama KAMI.

Sehingga demikian, semua aksi serta pemikiran yang dilakukan Gie landasannya adalah moralitas. Karena persoalan moral dari dahulu hingga nanti tetap sama yaitu soal kebenaran, keadilan, kebijakan serta kebaikan. Bahwa garisnya adalah hitam serta putih. Dari sini Gie memandang penguasa itu haruslah

dikawal dengan moralitas sebagai penyeimbang. Maka terjadi tragedi yang tak manusiawi jika suatu bangsa tidak penyeimbang layaknya moralitas.

Sehingga apa yang dilakukan Soe Hok Gie dengan membuat sebuah gerakan yang didasarkan oleh moral sehingga terbentuknya gerakan sosial atau politik untuk menentang rezim penguasa yang bertindak sewenang-wenangnya. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kehidupan bangsa yang tengah terjadi ketimpangan dan keidaksejahteraan yang dirasakan oleh rakyat. Gerakan tersebut dilakukan dengan cara aksi demonstrasi dengan ratusan mahasiswa yang terkoordinir. Soe Hok Gie sebagai arsitek dalam beberapa agenda demonstrasi dan menjadi orator untuk menyemangatkan perjuangan. Gerakan tersebut meminta 3 tuntutan yang bernama “Tiga Tuntutan Rakyat (TRITURA)” yang berisi 1. Bubarkan PKI, 2. Perombakan Kabinet dan 3. Turunkan harga. Dari awal Januari 1966 hingga Maret Gie beserta rekannya tidak lelah menuntut sebuah perubahan bagi bangsa. Walaupun gerakan tersebut untuk kemajuan di Indonesia dikarenakan pemerintahan yang sudah melakukan penyelewengan dari permasalahan politik hingga ekonomi. Apa yang dilakukan Gie sebagai upaya mengembalikan keadaan kondusif terhadap negara. Soe Hok Gie menyukai Soekarno sebagai manusia, tetapi tidak untuk jadi pemimpin tidak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan rumusan masalah, hasil Penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemikiran Politik Soe Hok Gie dalam buku “Catatan Seorang Demonstran “. Dari temuan ini peneliti dapat menyimpulkan, bahwa Pemikiran Politik Catatan Seorang Demonstran Soe Hok Gie merupakan pemikiran seorang pemuda yang detail menunjukkan luasnya minat Gie, mulai dari persoalan sosial politik Indonesia modern. Dengan kekuatan bahasa pada pemikiran-pemikiran Gie tersebut. Pemikiran Politik Catatan Seorang Demonstran Gie bisa turut membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Tetapi sudah tentu masih banyak variasi gaya hidup mahasiswa selain yang nampak dalam buku ini. Buku ini penting pula karena Soe Hok Gie tergolong pemimpin mahasiswa, sehingga permasalahannya cukup kompleks. Mahasiswa dianggap memiliki peran yang penting dalam kehidupan bangsa, selain memiliki kewajiban belajar mahasiswa juga bertanggung jawab dalam menumbuhkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran-saran yaitu, menurut dalam Pemikiran Politik Soe Hok Gie lakukan kepada para mahasiswa, jangan pernah berhenti memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Para mahasiswa yang berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan hendaknya tetap menjadi mahasiswa *independent* yang memperjuangkan *moral force* bukan *political force* yang menjadi tunggangan dari kepentingan-kepentingan politik golongan *vested interest* tertentu. Hendaknya mahasiswa tidak melakukan tindakan-tindakan anarkhisme maupun vandalisme, dan tetap menjaga etika berdemonstrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Castle, Lance. 1965. *Pemikiran Politik Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Fauzi, Ihsan. 1994. *Bahasa politik Ibn Khaldun*. Jakarta: Gramedia.
- Feith, Herbert. 1965. *Pemikiran Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Harahap, Burhannudin. 1955. *Mengambil Kebijakan*. Purworejo: Pustaka Merah.
- Jusuf. 2012. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Bandung: Mestika Zed.
- Kuntowijoyo. 1955. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Diva Press.
- Lubis, Mochtar. 1965. *Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Madjid, Nurcholish. 1998. *Indonesia Kita*. Jakarta: Mizan Store.
- Mira, Lesmana. 1989. *Penentang Pergerakan*. Jakarta: Merah Putih.
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: DEPDIKBUD DIRJEN DIKTI.
- Putranto. 2005. *Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rhoma Dwi. 2006. *Negara Indonesia*. Yogyakarta: Berjaya Bersama.

Soe Hok Gie. 1961. *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2017. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Prenada Media.

Sunarti. 1982. *Revolusi dan Isu Nasional Indonesia*. Makassar: Kepustakaan Populer Gramedia.

Tempirin. 1986. *Pemikiran politik teori Ibn Khaldun*. Bandung: Eresco.

Wardi, Bachtiar. 1999. *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Bina cipta.

Jurnal

Haris, Syamsudin. 2014. *Demokrasi di Indonesia*. Jurnal ilmu-ilmu sastra Indonesia Vol 11 No. 102.

Salim, Suadi. 1984. *Pergerakan Nasional Pemuda*. Jurnal ilmu politik Vol 17 No. 150.

Suryadinata. 1981. *Sastra Peranakan Pada Abad ke 19*. Jurnal ilmu-ilmu sejarah Indonesia Vol 8 No. 147.

Warsiman. 2016. *Kompetensi Pemaparan Data*. Jurnal ilmu-ilmu sastra Indonesia Vol 09 No. 117.

Skripsi

Alvin, Liasta. 2018.. *Nilai-Nilai Kritis Soe Hok Gie Dalam Demokrasi Indonesia*. Sumataera Utara: Skripsi Strata Satu Sarjana Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Cahyono, Edi. 2005. *Di Bawah Lentera Merah Soe Hok Gie*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga.

Fathoni, Faris. 2017. *Keterlibatan Soe Hok Gie Dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis Di Indonesia 1961-1966*. Malang: Skripsi Sarjana Strata Satu Sejarah, Universitas Negeri Malang.

Liana, Corry. 2014. *Soe Hok Gie Dalam Wacana DWIFUNGSI MAHASISWA*. Surabaya: Skripsi Sarjana Strata Satu Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Surabaya.

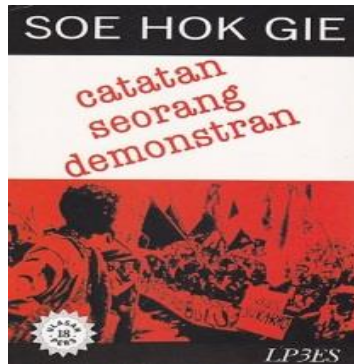
Nafisatun, Arina. 2016. *Kritisme Pelajar Tionghoa Pada Pengasa Soekarno Di Era Demokrasi Terpimpin (Studi Tentang Pemikiran Dan Gerakan Politik Soe Hok Gie)*. Surabaya: Skripsi Strata Satu Ilmu Ushuludin Dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tarigan, Christ Fandi. 2008. *Orang-Orang dipersimpangan kiri jalan Soe Hok Gie*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Strata Satu Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sumber internet.

Kristen, Lidia. 2019, Juli 06. Nawacita pada pemerintahan Jokowi, di akses dari cnbcindonesia.com Program Kebijakan Jokowi | books google. Go. Id..

LAMPIRAN



Buku Catatan Seorang Demonstran



Soe Hok Gie



Mahasiswa Demonstran



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B. 25 /Un.09/VIII/PP.01/01/2021
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n. **Irvan Meidiansyah**, tanggal 17 April 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Lembaga Islam Departemen RI Nomor KEP/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Kap.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2018;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Ainur Ropik, M.Si.	197906192007101005	Pembimbing I
Mariatul Qibtiyah, MA.Si.	2011049001	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Irvan Meidiansyah
N I M : 1617020050
Prodi : Ilmu Politik
Judul Skripsi :

"*Pemikiran Politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demontran.*"
Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 06 Januari 2021 s/d 06 Januari 2022

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Perasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
5. Asip;





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

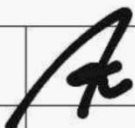
Jalan Prof. KH ZainalAbidinFikry Km. 3,5 Tlp. 0711 354668 Palembang

Kartu Bimbingan Skripsi

Nama : Irvan Meidiansyah
Nim : 1617020050
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Pemikiran politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demontran.

Pembimbing 1 : Aimur Ropik, M.Si.

No	Hari/Tanggal	Catatan Pembimbing	Paraf
1.	Jumat/ 27-11-2020	Perbaiki dan silahkan lanjutkan sampai bab terakhir.	A
2.	Kamis/ 27-05-2021	Pada bab IV belum menemukan Pemikiran politik dari seorang Soe Hok Gie. Di bab IV hanya menjelaskan cerita dan riwayat hidup Soe Hok Gie.	A
3.	Jumat/ 28-05-2021	Coba cermati rumuan masalah. Jadi pada bab 4 dan kesimpulan itu menjawab rumusan masalah.	A
4.	Senin/ 31-05-2021	Pada Bab 4 alinea 1 sd 5 buang Karena itu hanya cerita masa kecil. Selanjutnya ppemikiran-pemikiran Soe Hok Gie tidak cukup di sebutkan saja. Maka harus dijelaskan. Dan untuk abstrak kata kuncinya cukup: Pemikiran politik, Soe Hok Gie itu saja.	A

5.	Rabu/ 02-06-2021	Silahkan daftar untuk ujian komprehensif dan Munaqosah.	





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : IRVAN MEIDIANSYAH
NIM : 1617020050
Judul : Pemikiran politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demontran
Dosen Pembimbing : MARIYATUL QIBTIYAH S.Sos

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2021-01-13 23:44:18	Assalamu'alaikum wr wb saya Irvan Meidiansyah mohon maaf sebelumnya buk saya ingin mengirimkan hasil revisian Irvan yang sudah saya perbaiki, apabila Kata-kata saya ada yang salah mohon di maafkan sebelumnya saya ucapkan terimakasih wassalamualaikum wr wb.	Wa'alaikumsalam., silahkan dicek di kolom komentar pada file lampiran., ,mohon diperhatikan teknis penulisan typo., imbuhan dan EYD dalam bahasa Indonesia., malulah masa' udah mahasiswa tp buat karya ilmiah banyak typo!! Perlu diingat., pembimbing 2 bukan editor yg melihat kesalahan penulisan kamu!!!kamu harus membaca ulang dulu karya kamu dan perbaiki teknis penulisannya!!!
2	2021-02-25 02:35:12	Assalamu'alaikum wr wb, saya Irvan Meidiansyah angkatan 2016 prodi Ilpol, mohon maaf sebelumnya buk sudah mengganggu waktunya sebentar, Irvan mau menginfokan kalau saya sudah mengirimkan hasil revisian di halaman bimbingan ini buk, apabila kata-kata data ada yang kurang sopan mohon di maafkan sebelumnya saya ucapkan terimakasih, wassalamualaikum wr wb.	Revisi.,
3	2021-03-08 22:17:11	Assalamu'alaikum wr wb, Saya Irvan Meidiansyah prodi ilmu politik, mohon maaf buk sudah mengganggu waktunya sebentar, Irvan mau mengirimkan hasil revisian skripsi yang sudah Irvan perbaiki, sebelumnya Irvan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kata-kata Irvan ada yang kurang sopan, sebelumnya saya ucapkan terimakasih wassalamualaikum wr wb.	REVISI!!! -perhatikan eyd dan typo penulisan!!! -kerangka teorinya belum dimasukkan pemikiran politik yg akan digunakan dalam analisis nanti., revisi ini dulu dan lanjutkan bab 2

4	2021-03-21 05:41:30	Assalamu'alaikum wr wb buk, mohon maaf sudah mengganggu waktunya sebentar buk Irvan mau mengirimkan hasil revisian di Bab 1 yang kemarin, dan akan di teruskan ke bab 2, apabila kata-kata Irvan ada yang kurang sopan mohon di maafkan sebesar-besarnya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih wassalamualaikum wr wb.	typo dan eyd penulisan diperhatikan lg. utk F.Kerangka Teori Oposisi Pemikiran Politik Soe Hok Gie ubah menjadi F.Kerangka Teori saja dan bahaslah mengenai Pemikiran Politik dan Oposisi. kalimat ini "Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif, teori sebagai alat acuan dan kerangka dasar untuk menganalisa data yang didapatkan dari hasil penelitian. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Oposisi dari Skilling" dihapus saja. jelaskan dulu seperti apa pemikiran politik kemudian kerucutkan ke oposisi..
5	2021-03-28 04:41:24	Assalamu'alaikum wr wb, saya Irvan Meidiansyah mohon maaf sebelumnya buk, Irvan mau mengirimkan hasil revisian yang sudah Irvan perbaiki, apabila Irvan ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih wassalamualaikum wr wb.	konsep pemikiran politiknya ditambah lg., lanjutkan bab 2.,
6	2021-03-30 01:15:00	Assalamu'alaikum wr wb, Saya Irvan Meidiansyah prodi Ilmu Politik mohon maaf buk sudah mengganggu waktunya sebentar, Irvan Mau mengirimkan skripsi Irvan di Bab 2 yang sudah Irvan kerjakan, apabila kata-kata Irvan ada yang kurang sopan mohon dimaafkan sebesar-besarnya sebelumnya saya ucapkan terimakasih, wassalamualaikum wr wb.	- Lain kali utk bimbingan selanjutnya cantumkan dari bab 1 ya., - ini mana tambahan pemikiran politiknya pd bab I???sdh direvisi belum??? - baca lg pedoman skripsi kita, seperti apa membuat bab 2 itu., jadi bukan per konsep kata judul kamunya yg dijadikan sbg sub judul., apalagi bab 2 itu cukup berbeda dg kerangka teori ya.,
7	2021-03-31 21:40:46	Assalamu'alaikum wr wb, Saya Irvan Meidiansyah mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya sebentar, Irvan mau mengirimkan skripsi Irvan yang sudah di perbaiki di bab 1 dan bab 2 yang sudah saya gabungkan dan saya jadikan pdf, apabila kata-kata Irvan ada yang kurang sopan mohon dimaafkan sebesar-besarnya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih wassalamualaikum wr wb.	-Baca lg pedoman skripsi dalam membuat bab 2., bukan hanya sub judulnya saja yang ditambah kalimatnya karna secara umum bab 2 ini cukup berbeda dg kerangka teori., misalnya bisa dibahas mengenai gerakan mahasiswa sbg agent of change dan oposisi pemerintah shg sub ini membahas diskursus yg lbh besar lg dari sekedar konsep teoritis oposisinya. - hati hati ketika copas., klo bs diparafrase saja kalimatnya, jgn karna copas sampai hurufnya saja tdk diubah, jenis hurufnya di times new roman kan., klo sdh direvisi silahkan lanjutkan bab 3 nya.,

8	2021-04-28 10:14:21	Assalamu'alaikum wr wb, saya Irvan Meidiansyah mohon maaf sebelumnya buk kalau sudah mengganggu waktunya, Irvan mau mengirimkan skripsi Irvan yang sudah di perbaiki di bab 2 dan juga Irvan mengirimkan hasil dari bab 3, apabila kata-kata Irvan ada yang salah atau kurang sopan mohon di maafkan sebesar-besarnya sebelumnya saya ucapkan terimakasih, wassalamu'alaikum wr wb.	Silahkan direvisi sesuai hasil bimbingan offline, terutama analisis teori.
9	2021-04-28 11:11:09	Bab 1,2,3 dan 4	Revisi bab analisis dan lengkapi semua bab.
10	2021-05-19 14:11:40	Assalamu'alaikum buk Irvan mau mengirimkan hasil skripsi Irvan yang sudah lengkap di abstrak, daftar isi, bab 5 dan juga di daftar Pustaka, apabila kata-kata Irvan ada yang salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih, wassalamu'alaikum wr wb.	Wa'alaikumsalam, abstraknya perbaiki ya, lokusnya & fokusnya tonjolkan, usahakan jg isi abstrak itu mencakup latar belakang singkat mengapa harus mngambil judul tsrbt, tujuannya apa, metodenya, teorinya, isi, serta signifikansi penelitian trsebut di akhir kalimat.
11	2021-05-24 12:36:22	Assalamu'alaikum wr wb, saya Irvan Meidiansyah mohon maaf sudah mengganggu waktunya sebentar, Irvan mau mengirimkan hasil revisian skripsi Irvan di bagian abstrak yang sudah Irvan perbaiki, apabila kata-kata Irvan ada yang salah mohon di maafkan sebesar-besarnya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih wassalamu'alaikum wr wb.	Revisi lagi sesuai kolom komentar.
12	2021-05-26 17:05:10	Assalamu'alaikum wr wb, saya Irvan Meidiansyah, mau mengirimkan hasil revisian terbaru di bagian abstrak yang sudah di perbaiki. Sebelumnya saya ucapkan terimakasih wassalamu'alaikum wr wb.	Saya selaku dosen Pembimbing 2 Skripsi memberikan *ACC Skripsi* kepada mahasiswa yang bernama Irvan Meidiansyah untuk dapat dilanjutkan ke pembimbing 1 dan tahap pengajuan ujian komprehensif. 26 Mei 2021 Dosen Pembimbing 2 Skripsi *Mariatul Qibtiyah, S.Sos, MA.Si*



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Irvan Meidiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 1617020050
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Pemikiran Politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demonstran.*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TDK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ainur Ropik, M.Si.	Pembimbing I	
2	Mariyatul Qibiyah, MA,Si.	Pembimbing II	
3	Dr. Kun Budianto, M.Si.	Penguji I	
4	Hatta Azzuhri, M.Si.	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

REKAPITULASI NILAI

Berita acara munaqasyah skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nama : Irvan Meidiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 1617020050
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Hari / Tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021
Judul Skripsi : *Pemikiran Politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demontran.*

Komponen Penilaian :

No.	Tim Penguji	Jabatan	Nilai
1	Ainur Ropik, M.Si.	Pembimbing I	85
2	Mariyatul Qibtiyah, MA,Si.	Pembimbing II	82
3	Dr. Kun Budiando, M.Si.	Penguji I	77
4	Hatta Azzuhri, M.Si.	Penguji II	80
5	Nilai Rata-rata Ujian Komprehensif		73,6
Nilai Keseluruhan			397,6
Nilai Rata-rata			79,52
Nilai Akhir Dalam Huruf			B

IPK :
Total SKS :

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 19620620 198803 1 001

Palembang, 4 Agustus 2021

Wakil Dekan I

Dr. Yenzizal, S.Sos., M.Si
NIP. 197401232005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Irvan Meidiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 1617020050
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Pemikiran Politik Soe Hok Gie dalam Buku Catatan Seorang Demontran.*

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ____

Palembang, 4 Agustus 2021
Ketua Sidang

Dr. Eh Yusnita, S.Ag.,M.HI.
NIP. 197409242007012016